Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH PENDIDIKAN
DAERAH JAWA BARAT



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1998

SEJARAH PENDIDIKAN
DAERAH JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1998

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH JAWA BARAT

Penulis	:	Dr. Edi S. Ekajati Dra. Iyan Tiarsah Drs. Sobana Hardja Saputra Drs. Eman Sulaeman
Penyunting	:	Drs. Sutrisno Kutoyo

Diterbitkan ulang oleh	:	Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta 1998

Edisi I 1987

Edisi II 1998

Dicetak oleh	:	CV. PIALAMAS PERMAI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek, buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian yang mendalam sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Diharapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbang pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, September 1998

Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Edi Sedyawati

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat* adalah satu di antara hasil-hasil pelaksanaan kegiatan penulisan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986. Proyek tersebut menerbitkannya pada tahun 1987 sebagai cetakan pertama.

Buku ini memuat uraian tentang pertumbuhan pendidikan di Jawa Barat, mulai dari pendidikan tradisional, pendidikan Barat abad ke-19, pendidikan formal abad ke-20 sampai pendidikan zaman Jepang dan Indonesia pada masa kemerdekaan.

Berkaitan dengan kandungan isi buku tersebut, masyarakat luas terutama kalangan masyarakat "biasa baca" dan "butuh baca" sangat menaruh minat untuk memperolehnya. Sementara itu, persediaan buku hasil cetakan pertama telah habis disebarluaskan secara instansional.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional mempercayai Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat untuk melakukan penyempurnaan, perbanyakan, dan penyebarluasan buku ini kepada masyarakat dengan jangkauan lebih luas.

Terbitan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kebudayaan dan memberikan informasi memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, September 1998

Pemimpin Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat,

Soejanto, B.Sc.
NIP. 130 604 670

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Budaya Masyarakat

Berdasarkan data arkeologis dan geologis, sejak masa prasejarah di Jawa Barat telah ada kehidupan manusia yang bermasyarakat dan berbudaya, betapapun sederhananya. Hasil penelitian di beberapa situs prasejarah, seperti Pesisir Utara antara Rengasdengklok dan Tanggerang, Klapa Dua (Jakarta), Kampung Muara dan Pasir Angin (Bogor), dataran tinggi Bandung, Lembah Leles (Garut), dan Kuningan telah membuktikan hal itu. Bahkan kehidupan kelompok masyarakat di Pesisir Utara, Kampung Muara, Pasir Angin, dan Lembah Leles terus berlanjut sambil mengalami perkembangan tingkat budaya dan memasuki masa sejarah. Pada masa itu (sejak jaman Batu Tengah atau Mesolithicum sampai abad ke-4 Masehi) di daerah-daerah tersebut hidup suatu masyarakat dengan cara hidup berladang, menangkap ikan dan berdagang secara sederhana. Kelompok masyarakat ini telah mempunyai kepercayaan yang disebut animisme dan dinamisme. Yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang, melalui sebuah atau sekumpulan benda, terutama benda-benda yang dibuat dari batu dengan ukuran besar atau megalitis.[1] Kepercayaan tersebut dianggap sebagai kepercayaan asli setempat, balikan asli di kawasan Asia Tenggara.[2]

Pengaruh kebudayaan India di Jawa Barat pada awal abad Masehi mendorong masyarakat Jawa Barat untuk meningkatkan tahapan sosial budayanya sehingga dapat memasuki gerbang sejarah pada awal abad ke-5 Masehi.

Pada masa itu masyarakat Jawa Barat yang berpusat di sekitar Bogor dan Bekasi telah terorganisasi secara lebih teratur dalam bentuk kerajaan. Kerajaannya dinamai Tarumanagara dan rajanya antara lain Purnawarman. Mereka telah mengenal tulisan, yaitu huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Huruf dan bahasa tersebut berasal dari India. Di samping itu mereka masih memiliki bahasa pergaulan sehari-hari yang menurut berita Cina disebut bahasa "Kwun-lun". Kehidupan keagamaan di Tarumanagara telah menampakkan ciri-ciri agama Hindu, paling tidak di lingkungan keraton. Sedangkan kalangan rakyat banyak masih tetap menganut kepercayaan lama yang memuja arwah nenek moyang. Begitu pula hubungan antara Tarumanagara dengan negeri lain, seperti India, Kutai dan Cina, telah terjalin dengan teratur.[3]

Kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh agama Hindu di Jawa Barat terus berlangsung, betapapun kecil intensitasnya bila dibandingkan dengan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah Kerajaan Tarumanagara lenyap, kemudian muncul Kerajaan Sunda pada abad ke-8 Masehi.[4] Kerajaan Sunda berhasil mencapai zaman keemasannya pada masa Sri Baduga Maharaja yang memerintah antara tahun 1482--1521.[5]

Orang Sunda merupakan bagian terbesar penghuni wilayah Jawa Barat. Di samping itu terdapat pula orang Jawa yang menempati daerah bagian utara Banten dan Cirebon; serta orang Betawi bertempat tinggal di daerah-daerah sekitar Jakarta, Tanggerang, Bekasi dan Bogor. Perbedaan yang menonjol di antara mereka ialah bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Orang Sunda berbicara bahasa Sunda, orang Betawi berbicara bahasa Betawi, dan orang Jawa di Banten dan Cirebon menggunakan bahasa Jawa dialek setempat.

Pada mulanya masyarakat Sunda memperlihatkan kehidupan demokratis, baik ditinjau dari segi adat-istiadat, bahasa, isi naskah-naskah kuna, cerita pantun, atau bentuk Sastra lisan lainnya. Bukti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Budaya Masyarakat

Berdasarkan data arkeologis dan geologis, sejak masa prasejarah di Jawa Barat telah ada kehidupan manusia yang bermasyarakat dan berbudaya, betapapun sederhananya. Hasil penelitian di beberapa situs prasejarah, seperti Pesisir Utara antara Rengasdengklok dan Tanggerang, Klapa Dua (Jakarta), Kampung Muara dan Pasir Angin (Bogor), dataran tinggi Bandung, Lembah Leles (Garut), dan Kuningan telah membuktikan hal itu. Bahkan kehidupan kelompok masyarakat di Pesisir Utara, Kampung Muara, Pasir Angin, dan Lembah Leles terus berlanjut sambil mengalami perkembangan tingkat budaya dan memasuki masa sejarah. Pada masa itu (sejak jaman Batu Tengah atau Mesolithicum sampai abad ke-4 Masehi) di daerah-daerah tersebut hidup suatu masyarakat dengan cara hidup berladang, menangkap ikan dan berdagang secara sederhana. Kelompok masyarakat ini telah mempunyai kepercayaan yang disebut animisme dan dinamisme. Yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang, melalui sebuah atau sekumpulan benda, terutama benda-benda yang dibuat dari batu dengan ukuran besar atau megalitis.[1] Kepercayaan tersebut dianggap sebagai kepercayaan asli setempat, balikan asli di kawasan Asia Tenggara.[2]

Pengaruh kebudayaan India di Jawa Barat pada awal abad Masehi mendorong masyarakat Jawa Barat untuk meningkatkan tahapan sosial budayanya sehingga dapat memasuki gerbang sejarah pada awal abad ke-5 Masehi.

Pada masa itu masyarakat Jawa Barat yang berpusat di sekitar Bogor dan Bekasi telah terorganisasi secara lebih teratur dalam bentuk kerajaan. Kerajaannya dinamai Tarumanagara dan rajanya antara lain Purnawarman. Mereka telah mengenal tulisan, yaitu huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Huruf dan bahasa tersebut berasal dari India. Di samping itu mereka masih memiliki bahasa pergaulan sehari-hari yang menurut berita Cina disebut bahasa "Kwun-lun". Kehidupan keagamaan di Tarumanagara telah menampakkan ciri-ciri agama Hindu, paling tidak di lingkungan keraton. Sedangkan kalangan rakyat banyak masih tetap menganut kepercayaan lama yang memuja arwah nenek moyang. Begitu pula hubungan antara Tarumanagara dengan negeri lain, seperti India, Kutai dan Cina, telah terjalin dengan teratur.[3]

Kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh agama Hindu di Jawa Barat terus berlangsung, betapapun kecil intensitasnya bila dibandingkan dengan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah Kerajaan Tarumanagara lenyap, kemudian muncul Kerajaan Sunda pada abad ke-8 Masehi.[4] Kerajaan Sunda berhasil mencapai zaman keemasannya pada masa Sri Baduga Maharaja yang memerintah antara tahun 1482--1521.[5]

Orang Sunda merupakan bagian terbesar penghuni wilayah Jawa Barat. Di samping itu terdapat pula orang Jawa yang menempati daerah bagian utara Banten dan Cirebon; serta orang Betawi bertempat tinggal di daerah-daerah sekitar Jakarta, Tanggerang, Bekasi dan Bogor. Perbedaan yang menonjol di antara mereka ialah bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Orang Sunda berbicara bahasa Sunda, orang Betawi berbicara bahasa Betawi, dan orang Jawa di Banten dan Cirebon menggunakan bahasa Jawa dialek setempat.

Pada mulanya masyarakat Sunda memperlihatkan kehidupan demokratis, baik ditinjau dari segi adat-istiadat, bahasa, isi naskah-naskah kuna, cerita pantun, atau bentuk Sastra lisan lainnya. Bukti

yang masih hidup hingga sekarang adalah masyarakat Kanekes (Baduy) di Banten Selatan. Baru setelah masuknya pengaruh Mataram ke wilayah Priangan, kehidupan "feodal" memasuki masyarakat Sunda melalui pendopo-pendopo kabupaten. Cara hidup feodal itu tumbuh terus, karena pemerintah Hindia Belanda memberi kesempatan untuk hidup suburnya cara hidup demikian. Pemerintah Hindia Belanda menggunakan kaum feodal itu sebagai perantara dalam menjalankan kekuasaannya. Pengaruh kehidupan feodal dalam masyarakat Sunda cukup besar; dalam beberapa hal masih terasa hingga sekarang.

Kerajaan Sunda cenderung merupakan kerajaan agraris. Pusat kegiatannya selain berada di daerah pedalaman, seperti tampak pada letak ibukotanya yakni di Galuh, Kawali, Saunggalah, dan Pakuan. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya ialah bertani. Pertanian yang diusahakan oleh mereka ialah berladang. Sebagai masyarakat peladang dengan sendirinya kebudayaannyapun, termasuk cara berpikirnya bercorak ladang.[6]

Sifat yang paling menonjol dari masyarakat ladang ialah kebiasaan suka berpindah tempat tinggal untuk mengikuti garapan ladangnya. Corak hidup demikian mengakibatkan pola berpikir, cara hidup, dan kebudayaan mereka sederhana, karena keseluruhan hidupnya dipengaruhi oleh cara hidup mereka sehari-hari yang berpindah-pindah. Dari sudut inilah kiranya harus dipandang, mengapa di wilayah Jawa Barat sedikit sekali ditemui peninggalan sejarah kuno yang bersifat megah, seperti candi, keraton; tak ditemui naskah yang tebal, tidak berkembang jenis kesenian yang banyak peralatannya, dan lain-lain. Yang didapatkan hanyalah beberapa buah prasasti, naskah yang sedikit isinya, dan bekas bangunan candi yang kecil dan sederhana bentuk serta hiasannya. Begitu pula kesenian yang berkembang hanyalah kesenian yang sederhana, seperti pantun. Jenis kesenian gamelan yang banyak jumlah peralatannya seperti di Jawa tidak berkembang.

Bentuk kesenian yang dianggap asli Sunda, antara lain "pantun", ketuk tilu, degung, karinding, calung, angklung. Pantun adalah suatu jenis pertunjukan yang mempergunakan alat musik pantun (kecapi). Dalam pertunjukan tersebut dideklamasikan sebuah cerita di luar

kepala oleh seorang juru pantun sambil diiringi oleh petikan pantun dengan lagu-lagu tertentu. Pertunjukan itu berlangsung selama satu malam suntuk. Beberapa cerita yang dipantunkan ialah Lutung Kasarung, Ciung Wanara, Mundinglaya di Kusumah dan lain-lain. Bentuk-bentuk kesenian lain yang populer di kalangan masyarakat Sunda ialah wayang golek, reog, tayuban, banjet, debus, dan lain-lain.

Pertanian dengan sistem bersawah baru diperkenalkan terhadap masyarakat Sunda pada pertengahan abad ke-16 Masehi oleh orang-orang Demak yang datang ke Banten,[7] seiring dengan penyebaran agama Islam di daerah ini. Selain itu, orang-orang Mataram yang ditempatkan oleh Sultan Agung (1613--1645) di daerah antara Sungai Cimanuk dan Sungai Citarum untuk persiapan menyerang Batavia, membuka pula pesawahan di daerah pemukimannya.[8] Selanjutnya. pesawahan di wilayah Priangan dibuka atas rintisan orang-orang pendatang dari Pekalongan dan Banyumas serta mendapat dorongan dari pemerintah Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19 Masehi.[9] Sesudah itu berkembanglah pertanian dengan sistem sawah di Jawa Barat, bahkan kemudian Indramayu dan Krawang menjadi daerah gudang beras di Pulau Jawa.

Walaupun demikian Kerajaan Sunda memiliki pula kota-kota pelabuhan yang terletak di sepanjang pesisir utara yaitu Banten, Pontang, Cikande, Tanggerang, Kalapa, Cimanuk, dan Cirebon. Di kota-kota pelabuhan tersebut sudah barang tentu masyarakatnya berpenghidupan dari usaha pelayaran, perniagaan, dan juga perikanan. Menurut Tome Pires[10], pada tahun 1513 Banten, Kalapa, dan Cirebon termasuk kota pelabuhan yang cukup baik dan besar. Kegiatan perniagaan di kota-kota pelabuhan itu lebih menonjol dibandingkan dengan kegiatan di kota-kota pelabuhan lainnya. Saudagar-saudagar dari berbagai daerah dan negara datang dan pergi dari kota-kota pelabuhan itu, di samping saudagar-saudagar Sunda sendiri. Kegiatan perniagaan dengan ibukota Kerajaan Pakuan Pajajaran dihubungkan oleh Sungai Ciliwung melalui kota pelabuhan Kelapa yang dapat dilayari selama 2 hari. Hasil produksi Kerajaan Sunda, berupa beras, lada, kayu dan beberapa jenis makanan merupakan barang-barang yang diekspor dari kota-kota pelabuhan itu sedangkan kain, sutera, barang keramik dan lain-lain diimpor untuk keperluan dalam negeri.

Kegiatan perniagaan itu terus berlanjut, sampai masa Kesultanan Cirebon dan Banten yang beragama Islam (abad ke-16 dan 17 Masehi). Banten, terutama yang berhasil mengembangkan kegiatan perniagaan hingga kota pelabuhannya merupakan kota pelabuhan internasional sejajar dengan kota-kota pelabuhan besar di Asia.[11]

Peranan Banten dan Cirebon dalam bidang perniagaan menurun, bahkan kemudian dapat dikatakan lenyap, setelah berdirinya pusat kegiatan dan juga kekuasaan Belanda di Batavia (Jakarta) sejak awal abad ke-17 Masehi.

Kegiatan perniagaan di kota-kota pelabuhan Kerajaan Sunda atau sepanjang pantai utara Tanah Sunda (Jawa Barat) merupakan bagian dari rangkaian kegiatan perniagaan di Kepulauan Nusantara dan Asia, bahkan di dunia Perniagaan di pesisir utara Tanah Sunda Jawa Barat waktu itu bersambung dengan arus perniagaan dunia melalui jalan dagang Eropa, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan terus ke Asia Timur. Di Asia Tenggara jalan dagang tersebut melewati pantai barat Sumatra, Selat Sunda, pesisir utara Jawa Barat dan terus ke timur sampai ke daerah-daerah Indonesia bagian timur; atau lewat pantai timur Sumatra ke Malaka, selat Bangka, pesisir utara Jawa Barat, dan terus ke timur sampai ke daerah-daerah Indonesia bagian timur. Barang dagangan rempah-rempah yang dihasilkan di bumi Indonesia, termasuk Tanah Sunda berupa lada dari Banten, menjadi penyambung mata rantai kegiatan perniagaan itu.

Arus perniagaan itulah yang memperkenalkan Indonesia ke wilayah Asia Barat (Dunia Arab) yang sejak abad ke7 Masehi secara berangsur-angsur menjadi negara Islam. Sebaliknya, arus perniagaan itu pula yang membawa agama Islam secara langsung dan berantai dari negeri Arab ke Indonesia, termasuk wilayah Jawa Barat.

Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, agama Islam masuk ke Jawa Barat melalui dari daerah pesisir, Cirebon dan Cimanuk adalah kota-kota pelabuhan pertama yang menerima pengaruh Islam yang dibawa para saudagar muslim.[12] Setelah penduduk Cirebon dan Cimanuk berangsur-angsur memeluk agama Islam, akhirnya pada tahun1479 Cirebon melepaskan diri dari ikatannya dengan Kerajaan Sunda, kemudian disusul oleh Cimanuk (Indramayu). Selanjutnya, Cirebon ingin berdiri sendiri dengan

dukungan Kesultanan Demak dari Jawa Tengah.[13] Banten dan Kalapa jatuh ke dalam kekuasaan Islam, setelah ekspedisi tentara Demak ke dua kota pelabuhan tersebut pada tahun 1526 dan 1527. Yang bertindak selaku pimpinan ekspedisi Demak itu ialah Faletehan atau Fatahillah.[14]

Dari daerah pesisir utara, agama Islam disebarluaskan ke daerah pedalaman Kerajaan Sunda. Cirebon dan Banten bertindak sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Cirebon menyebarkan agama Islam ke daerah pedalaman sebelah timur, sedangkan Banten ke daerah pedalaman sebelah barat, dengan garis batasnya ialah Sungai Citarum. Dalam proses penyebaran agama Islam itu peranan para mubalig dan ulama sangat menonjol. Selanjutnya, mesjid dan pesantren berperan dalam memperkuat keimanan kaum muslimin yang baru masuk Islam itu.

Lembaga pesantren bukan saja merupakan tempat pendidikan mereka yang berminat memperdalam pengetahuan agama Islam, tetapi juga menjadi pusat kehidupan kebudayaan. Di pesantren berkembang jenis-jenis kesenian tertentu, seperti pencak silat (seni bela diri), musik dan seni tari. Selanjutnya, pesantren menjadi pusat kegiatan anti penjajah (Belanda), setelah kekuasaan penjajah merasuk ke dalam keraton dan pendopo kabupaten.

Pesantren-pesantren yang terkenal berperanan besar di Jawa Barat, antara lain pesantren-pesantren Buntet di Cirebon, Lengkong di Kuningan, Pamijahan di Tasikmalaya, Caringin di Banten.

Seiring dengan penyebaran agama Islam, lepas pulalah kekuasaan Kerajaan Hindu Sunda di daerah-daerah tersebut. Ibukota Kerajaan Sunda di Pakuan baru dapat direbut Banten pada tahun 1579 Masehi.[15]

Dalam perkembangan selanjutnya, Cirebon tetap sebagai pusat kegiatan yang bertalian dengan keagamaan, sedangkan Banten lebih cenderung berkembang sebagai pusat perniagaan. Cirebon mencapai puncak kejayaan sebagai pusat kegiatan agama Islam pada masa pemerintahan Susuhunan Jati (1479--1528) dan Fatahillah (1552--1570). Sedangkan Banten mencapai puncak kejayaan dalam kegiatan perniagaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651--1683).[16]

Agama Islam dapat diterima oleh seluruh penduduk tanah Sunda (Jawa Barat), kecuali oleh masyarakat Baduy di Banten Selatan yang dianggap sebagai pelarian masyarakat Kerajaan Sunda Pajajaran. Pengaruh agama Islam pun sangat mendalam dalam keseluruhan hidup masyarakat Sunda. Hukum adat dalam masyarakat Sunda, misalnya, sangat dipengaruhi oleh agama Islam, seperti hukum waris, pernikahan, mengurus jenazah, dan lain-lain. Agama Islam terus dianut hingga sekarang oleh bagian terbesar masyarakat Sunda dan mereka melaksanakan ajaran agama tersebut dengan patuh. Dewasa ini dapat dikatakan di seluruh desa dan kampung di Jawa Barat akan dijumpai mesjid atau langgar tempat ibadah.

Sesudah runtuhnya Kerajaan Sunda, daerah pedalaman Tanah Sunda terbagi atas kabupaten-kabupaten yang masing-masing berdiri sendiri, seperti Galuh, Sumedanglarang, dan Ukur, kemudian Bandung, Parakanmuncang, Sukapura, dan Cianjur. Di antara kabupaten-kabupaten itu terjalin hubungan kadang-kadang erat dan kadang-kadang renggang. Hubungan yang erat biasanya dimungkinkan oleh pernikahan di antara keluarga keraton itu dan kerenggangan hubungan itu sering disebabkan oleh perselisihan mengenai tapal batas daerah, masalah penduduk, dan penggantian jabatan-jabatan tertentu, termasuk jabatan bupati sendiri.[17]

Sejak akhir abad ke- 16 Mataram menaruh perhatian ke arah barat untuk memperluas daerah kekuasaannya. Pada tahun 1625 kekuasaan Mataram telah merasuk ke dalam wilayah Cirebon dan Priangan. Bahkan pada tahun 1628 Mataram telah menggunakan pasukan dari Priangan (Ukur dan Sumedang) untuk menyerang Batavia.[18]

Masuknya kekuasaan Mataram ke bagian timur dan tengah tanah Sunda membawa pengaruh besar dalam bidang kebudayaan. Beberapa unsur kebudayaan Jawa diterima oleh masyarakat Sunda, terutama oleh kalangan atas seperti bahasa Jawa (untuk bahasa tulisan), "undak-usuk" (tingkatan) bahasa, bentuk puisi tembang yang memiliki 17 pupuh. Begitu besar pengaruh tersebut sehingga bahasa Jawa menggeser peranan bahasa Sunda sebagai bahasa tulisan kurang lebih selama 2 abad (pertengahan abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke- 19). Bahasa Jawa berperan juga sebagai bahasa pengantar dalam lingkungan pesantren di tanah Sunda. Begitu pula bentuk

tembang menjadi populer sekali dalam sastra Sunda pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20.[19] "Undak usuk" bahasa menjadi ukuran pemakaian bahasa yang baik, bahkan di kalangan tertentu berlaku hingga sekarang.

Walaupun demikian pengaruh dari Mataram itu kemudian berkembang sendiri sesuai dengan lingkungan kebudayaan Sunda dan akhirnya menjelma bentuk-bentuk kebudayaan yang tidak lagi memperlihatkan pengaruh asalnya. Misalnya, bentuk pupuh yang 17 macam berkembang di Jawa Barat sehingga akhirnya berlainan dengan pupuh yang berlaku di Jawa. Tembang Cianjuran yang semula merupakan pengaruh tembang Jawa, dalam perkembangannya mendapat pengaruh kuat dari lagu "degung" dan pantun sehingga akhirnya mempunyai warna tersendiri dan tidak mempunyai persamaan lagi dengan tembang Jawa.

Sistem yang digunakan dalam menjalankan hubungan antara Mataram dengan daerah-daerah kekuasaannya di tanah Sunda ialah dengan mengangkat penguasa-penguasa daerah setempat menjadi penguasa di daerahnya secara turun-temurun sepanjang tidak memberontak kepada pemerintah pusat. Hanya tiap-tiap tahun mereka diharuskan datang ke ibukota Mataram sebagai tanda setia sambil membawa upeti berupa hasil bumi dan tenaga kerja dalam jumlah tertentu.

Sistem hubungan tersebut terus digunakan oleh VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda di wilayah Priangan, setelah kekuasaan mereka memasuki wilayah ini, menggantikan kedudukan Mataram sejak tahun 1677. Oleh VOC sistem ini dinamai *Preanger Stelsel* (Sistem Priangan) dan belaku hingga tahun 1871.[20]

Dalam bidang kebudayaan, kekuasaan Belanda di tanah Sunda tidak berpengaruh besar. Pengaruh mereka nyata sekali dalam bidang ekonomi. Hal ini memang sesuai dengan tujuan kedatangan mereka di Indonesia, yaitu untuk berdagang, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun selanjutnya, orang Belanda menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Pada pertengahan abad ke-19 Masehi seluruh wilayah Jawa Barat pada dasarnya telah jatuh ke dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Pada awal abad ke-20 barulah kebudayaan Belanda, kebudayaan Eropa pada umumnya memperlihatkan pengaruhnya ke dalam masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Sunda, meskipun pada mulanya terbatas pada kalangan ningrat. Pengaruh kebudayaan Belanda itu merembes ke dalam masyarakat Indonesia terutama melalui sarana pendidikan.

Sejak pemerintah kolonial Hindia Belanda menganut dan menjalankan politik etis, dibukalah sekolah-sekolah menurut sistem Barat di Indonesia. Pembukaan sekolah-sekolah ala Barat itu diperluas sampai teruntuk segenap kalangan masyarakat. Dalam sekolah-sekolah tersebut diperkenalkan pengetahuan dan kebudayaan Barat, khususnya kebudayaan Belanda. Penyebarluasan pengetahuan dan kebudayaan Barat itu semakin besar, setelah muncul dan dilaksanakan politik asosiasi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sampai tingkat tertentu.

Politik asosiasi adalah kebijaksanaan (policy) yang menghendaki agar bangsa Indonesia dibina sehingga menjadi berpengetahuan dan berbudaya Barat.

Pada tingkat dan kalangan tertentu politik etika dan politik asosiasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda itu berhasil. Sejumlah pengetahuan dan budaya Barat diterima dan dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Sudah barang tentu pengaruh kebudayaan Barat itu mempunyai akibat positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Akibat positifnya kalah dengan munculnya tokoh-tokoh cendekiawan bangsa Indonesia yang kemudian mengambil inisiatif dan mempelopori Pergerakan Nasional dan Revolusi Kemerdekaan. Akibat negatifnya ialah munculnya kalangan bangsa Indonesia yang cara hidupnya meniru bangsa Belanda (kebelanda-belandaan), dan menganggap rendah pola hidup bangsa kita. Untunglah akibat positifnya lebih besar daripada akibat negatifnya.

Adalah sangat menguntungkan perkembangan kebudayaan Sunda, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda membuka sekolah-sekolah di Jawa Barat dan mendirikan badan yang menerbitkan bacaan bagi rakyat (*Volkslectuur*, kemudian menjadi Balai Pustaka). Karena sejak

itu (perempatan ketiga abad ke-19) bermunculan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Sunda, sebelumnya karya tulisan itu biasa ditulis dalam bahasa Jawa. Sejak itu penerbitan buku-buku berbahasa Sunda sebagai bahasa tulisan makin berkembang dan sejalan dengan sastra Sunda.

1.2 Perkembangan Pendidikan

Pada dasarnya dunia pendidikan dimulai sejak adanya manusia. Dengan dianugerahi akal oleh penciptaNya, manusia dapat mengembangkan kehidupannya sehingga makin lama semakin maju.

Ditinjau dari sudut sejarah, kita tidak dapat tahu pasti bagaimana pendidikan diselenggarakan pada masa manusia generasi pertama, karena data tentang hal itu tidak ada. Berdasarkan penelitian sejarah, baru pada jaman Mesir Kuna (tahun 5000 sebelum Masehi) terdapat petunjuk tentang suatu pendidikan diselenggarakan secara agak teratur.

Pada zaman Mesir Kuna pendidikan hanya dinikmati oleh masyarakat yang tergolong pendeta dan prajurit. Penyelenggara pendidikannya pun golongan pendeta. Pada masa itu pendidikan di Mesir dimaksudkan untuk tujuan kesusilaan dan keagamaan. Di samping pelajaran membaca, menulis, berhitung, ilmu alam, ilmu bintang, dan bahasa, dalam pendidikan itu diajarkan pula ilmu mengukur tanah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehubungan dengan kehidupan mereka banyak tergantung kepada pertanian banjir Sungai Nil. Sebagai bahan bacaannya ialah buku-buku yang memuat bacaan suci dan lain-lain sebanyak 42 buah. Khusus bagi para calon pendeta diadakan pusat pendidikan di suatu tempat dengan sistem tertentu, misalnya di Thebe, Heliopolis, Memphis. Di pusat pendidikan itu yang dinamai Sekolah Kuil terdapat perpustakaan, asrama guru, dan asrama pelajar.

Wilayah lain di Asia yang telah menyelenggarakan pendidikan dengan teratur jauh sebelum tarikh Masehi ialah India dan Cina.

Masyarakat India adalah masyarakat yang mengutamakan hidup beragama. Kehidupan di dunia sekarang dipersiapkan dan diperuntukkan bagi kebahagiaan dan kesempurnaan hidup kelak

sesudah mati. Cara hidup demikian mempengaruh dunia pendidikan. Di sini pendidikan bertujuan menanamkan kesanggupan jiwa yang akan menghubungkannya nanti dengan alam materi. Selain itu, dunia pendidikan di India dipengaruhi oleh ajaran yang dianutnya, yaitu agama Hindu. Menurut agama Hindu, masyarakat terbagi atas 4 kasta yang satu dengan lainnya tak boleh bercampur. Keempat kasta itu ialah brahmana, ksatriya, waisya, syudra. Di luar keempat kasta itu ada lagi kelompok masyarakat yang disebut kasta paria.

Di India pendidikan hanya diberikan oleh mereka yang tergolong kasta brahmana. Sedangkan yang mendapat pendidikan itu ialah yang tergolong kasta-kasta brahmana, ksatriya, dan waisya. Kasta syudra dan lebih-lebih kasta paria tidak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan.

Sistem pendidikan yang digunakan di India disebut Sistem Guru Kula. Dalam hal ini guru dan murid berada dalam satu asrama sebagai pusat pendidikan. Ongkos pendidikan biasanya diperoleh dari hasil produksi suatu bidang tanah yang dianugerahkan raja kepada asrama. Di samping belajar murid-murid itu membantu gurunya dalam kehidupan sehari-hari. Selama dalam pendidikan terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi murid. Murid harus tunduk, patuh, dan hormat kepada gurunya. Singkatnya, selama belajar murid itu benar-benar menjadi anggota keluarga guru.

Sistem pendidikan di Cina lain lagi. Di negeri ini pendidikan sejalan, bahkan menjadi alat filsafat. Etika sangat diutamakan dalam pendidikan di Cina. Hal itu dapat dipahami berhubung dengan bangsa Cina terkenal dengan para filusufnya. Salah seorang filusuf terkenal yang menjadi peletak dasar Etika Cina ialah Kung-fu Tze (551--479 sebelum Masehi).

Menurut Etika Cina, masyarakat manusia ialah sebuah keluarga besar. Tiap-tiap orang dalam keluarga besar itu mempunyai tempat dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Untuk mencapai keharmonisan dalam masyarakat hendaknya selalu dijaga hubungan baik antara bapak dengan anak, raja dengan rakyatnya, suami dengan istrinya, adik dengan kakaknya, kawan dengan temannya. Kalau semua orang berusaha untuk menjaga nama baik

hubungan itu dengan penuh rasa cinta tanpa mengutamakan keuntungan pribadi, maka masyarakat yang teratur yang diidam-idamkan akan tercapai. Dalam Etika Cina, dari Kung-fu Tze tidak mengenal segi-segi ketuhanan. Orang Cina mempunyai sifat realistis dan praktis.

Sebagai seorang filusuf Kung-fu Tze mewujudkan buah pikirannya dalam bentuk tulisan. Karya tulisannya cukup banyak. Sembilan buku karya Kung-fu Tze dipandang sebagai buku-buku suci ajaran Kung-fu Tze yang terus-menerus dipelajari oleh masyarakat dan cendekiawan Cina.

Untuk memahami buku suci itu, pertama-tama mempelajari tulisan-tulisan Cina yang banyak jumlahnya, karena tiap-tiap makna mempunyai lambang tulisan sendiri. Setelah menguasai 25.000 -- 30.000 huruf Cina, barulah seseorang dapat membaca buku-buku karya Kung-fu Tze. Selain itu, bahasanyapun harus di pelajari pula, sebab buku-buku Kung-fu Tze mempergunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa Cina sehari-hari.

Pendidikan Cina erat hubungannya dengan pemerintahan, sebab setiap pegawai negeri terlebih dulu harus menempuh ujian negara. Bahan yang diujikannya ialah macam-macam soal sejak masalah politik hingga soal-soal bertanam padi. Ujiannya sendiri mempunyai sistem tersendiri. Sistem ujian di Cina didasarkan atas tingkatan administrasi pemerintahan sehingga ada ujian distrik, ujian propinsi, dan ujian kerajaan.

Ujian distrik diadakan di distrik masing-masing. Peserta ujian disuruh membuat tiga buah karangan berdasarkan bahan dari buku suci. Ujian diadakan di ruangan pejabat distrik setempat selama 18--14 jam. Ujian Propinsi diadakan di ibukota propinsi masing-masing. Peserta ujian ini ialah mereka yang lulus dalam ujian distrik. Peserta ujian propinsi yang lulus diperbolehkan mendapat kedudukan dalam pemerintahan. Mereka yang lulus ujian distrik diberi gelar *Shu Tsai* dan yang lulus ujian propinsi mendapat gelar *Chi Yen* yang masing-masing berarti orang pandai dan orang pandai istimewa. Para *Chi Yen* mendapat hak untuk menempuh ujian kerajaan. Para peserta ujian diharuskan membuat karangan berdasarkan buku-buku klasik dan

karangan tentang keadaan dalam negeri saat itu. Peserta ujian yang lulus mendapat gelar *Chin Shih* yang berarti pujangga. *Chin Shih* dapat dipilih menjadi menteri, gubernur atau pegawai tinggi. Chin Shih pun mendapat tempat untuk duduk sebagai anggota Akademi Kerajaan (Han Lin Yuen)

Dengan demikian pendidikan di Cina berdasarkan dan berisikan buku-buku karangan Kung-fu Tze. Untuk mempelajari buku-buku tersebut diperlukan waktu belajar 15 tahun.

Pada tahun 570 di tanah Arab lahir seorang besar yang membawa pembaharuan bagi masyarakat Arab dan masyarakat dunia pada umumnya. Orang itu ialah Muhammad bin Abdullah (570--632) yang diangkat utusan Allah. Muhammad memperkenalkan agama Islam kepada penduduk Arab dan penduduk dunia. Agama Islam yang membawa perubahan dalam kepercayaan bangsa Arab, membawa perubahan pula dalam bidang pendidikan setempat.

Agama Islam mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem pendidikan. Berbeda ajaran Hindu yang mementingkan kehidupan di alam sesudah manusia mati, Agama Islam mementingkan baik kepentingan hidup di alam akherat maupun kepentingan hidup di dunia ini. Agama Islam menyatakan bahwa manusia lahir laksana kertas putih, bagaimana mengisi kertas putih itu tergantung kepada manusianya itu sendiri. Hanya dinyatakan bahwa jika manusia itu ingin hidup bahagia di dunia dan di akherat kelak, hendaknya menunaikan perintah-perintah Allah Yang Esa dan mencegah larangan-Nya. Kejatuhan seseorang ke dalam lembah kehinaan akibat ia mengikuti hawa nafsunya.

Dengan pernyataan tersebut, maka agama Islam sangat mementingkan pendidikan. Menurut agama Islam, sumber pengetahuan itu ialah Al-Qur'an yang menjadi kitab suci umat Islam.

Di tanah Arab pendidikan agama Islam mula-mula diadakan di mesjid-mesjid. Mesjid menjadi pusat kegiatan pendidikan Islam. Baru pada abad ke-4 didirikan madrasah-madrasah sebagai tempat belajar. Madrasah-madrasah itu didirikan dengan bantuan para penguasa rakyat setempat, Satu abad kemudian lahir pula jenis lembaga pendidikan

lain yang disebut "kuttab". "Kuttab" diselenggarakan oleh pihak swasta. Di mesjid diajarkan pengetahuan dasar, berupa membaca dan menulis, dalam rangka bisa memahami al-Qur'an. Mula-mula di madrasah hanya diajarkan pengetahuan tentang agama Islam, tetapi kemudian diajarkan pula ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. "Kuttab" telah merupakan lembaga pendidikan yang serupa dengan sekolah sekarang. Pendidikan dilaksanakan secara klasikal dengan dibimbing oleh seorang guru. Murid-murid yang memasuki kuttab adalah anak-anak yang berusia 9--10 tahun. Bila di mesjid dan madrasah belajar itu dilangsungkan dengan cara duduk, tetapi di "kuttab" telah menggunakan meja dan kursi.

Adapun tujuan pendidikan Islam di Arab waktu itu ialah :

1. menanamkan kepercayaan akan adanya satu Tuhan yang wajib disembah serta percaya kepada para nabi sebagai utusan Allah, dan Muhammad sebagai nabi terakhir;
2. menanamkan akhlak yang baik dan budi pekerti yang luhur.

Di Eropa pendidikan itu berakar pada tiga hal yaitu kebudayaan Yunani Rumawi, agama Kristen, dan unsur-unsur kebudayaan setempat masing-masing.

Pendidikan di kalangan bangsa Yunani bertitik tolak dari bidang sastra dan olahraga yang menjadi kegemaran bersama, walaupun kehidupannya terpecah-pecah dalam beberapa kota (polis) yang masing-masing berdiri sendiri. Karya sastra Ilias dan Odysos menjadi buku pelajaran yang mula pertama dipelajari oleh anak-anak. Pendidikan dimaksudkan untuk membentuk watak.

Berbeda dengan bangsa Yunani, pendidikan di kalangan bangsa Sparta (850 sebelum Masehi) diarahkan untuk membentuk manusia yang selalu siap untuk berperang dan mempunyai sifat-sifat keperwiraan dan kepahlawanan. Hal demikian disebabkan bangsa Sparta yang sedikit jumlahnya harus selalu menghadapi pemberontakan dari bangsa-bangsa yang dikuasainya yang jumlahnya lebih banyak. Anak-anak "Sparta" yang berusia 7--18 tahun dimasukkan ke dalam tangsi untuk mendapat pendidikan dasar. Pada umur 18--20

tahun mereka mendapat pendidikan latihan-latihan perang, dan pada usia 20--30 tahun diharuskan menjadi tentara.

Sebaliknya pendidikan bangsa Sparta yang bersifat militeristis dan konservatif, maka orang Athena bersikap terbuka atas kebudayaan asing. Mereka selalu berusaha mencari kemajuan dari pengalaman dan pengetahuan bangsa lain. Sampai usia 7 tahun anak-anak Athena dididik oleh orang tuanya di rumah. Sesudah itu anak laki-lakinya mengikuti sekolah yang diadakan oleh partikelir dengan diantar oleh seorang pengiring (paidagogos). Di sekolah mereka belajar menulis, membaca, musik, olah raga. Sedangkan anak-anak perempuannya tetap tinggal di rumah masing-masing guna mempelajari soal-soal rumah tangga dari ibunya.

Pada abad ke-5 sebelum Masehi terjadi perubahan besar di kalangan bangsa Yunani yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Berkat usaha para filusuf dari kaum Sophist yang mengutamakan pada masalah alam perasaan, cita-cita, dan fikiran, kecenderungan terhadap latihan fisik dalam pendidikan berubah menjadi cenderung kepada latihan berpikir.

Berbeda dengan struktur negara di Yunani yang terdiri atas polis-polis, di Italia terbentuk suatu kerajaan dengan satu pusat pemerintahan. Pendukung kerajaan ini ialah bangsa Rumawi. Jika bangsa Yunani selalu berusaha untuk melakukan percobaan dan penyelidikan, maka bangsa Romawi selalu dihadapkan pada masalah politik praktis dalam rangka menguasai seluruh wilayah kekuasaannya. Pendidikan di kalangan anak Rumawi berpangkal pada masalah yang praktis berguna, dari menguntungkan negara. Pendidikan ditujukan untuk membentuk manusia yang cakap berperang, mematuhi disiplin dan menjaga agama dan kesusilaan. Tiap orang tua mendidik anaknya masing-masing di dalam rumah tangga sendiri dan kemudian ke lapangan bagi anak laki-laki atas bimbingan ayahnya. Pada tahun 449 sebelum Masehi barulah rnuncul sekolah rendah yang disebut "ludus". Tetapi di sekolah pun yang diajarkan hanya bermain/berolahraga, ditambah pelajaran membaca dan menulis.

Sistem pendidikan di Romawi mengalami perubahan setelah Yunani dapat dikuasai Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi.

Bangsa Romawi menerima ilmu dan kebudayaan Yunani yang telah tinggi tingkatannya. Buku-buku berbahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Sikap tersebut memungkinkan sistem pendidikan Yunani digunakan di Romawi dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi setempat. Dengan demikian terbentuklah sistem pendidikan baru di Romawi.

Menurut sistem baru tersebut pendidikan dibagi atas batas-batasnya yang jelas Pertama, sekolah rendah atau "ludus". Kedua, sekolah menengah atau sekolah *grammaticus*. Dan ketiga, sekolah tinggi atau *rhetor*. Sekolah rendah diperuntukan anak-anak berusia 6/7 tahun sampai 12 tahun. Mata pelajarannya terdiri atas membaca, menulis, berhitung, adat sopan santun, kesusilaan dan undang-undang. Di sekolah menengah diajarkan tatabahasa, kesusastraan, kesusilaan, sejarah, mitologi, dan ilmu bumi. Sekolah tinggi ditujukan untuk mengajar para pemuda berpidato sebagai persiapan bagi jabatan-jabatan tinggi.

Faktor dominan lain yang mempengaruhi bidang pendidikan di Eropa ialah pengaruh agama Kristen. Pada mulanya agama Kristen yang dibawakan oleh Isa Al-Masih ditolak oleh orang Eropa. Tetapi sejak abad ke-3 Masehi agama ini diterima sebagai salah satu agama yang diakui oleh negara. Bahkan Kaisar Romawi *Constantijn* kemudian menetapkan agama Kristen sebagai satu-satunya agama boleh dianut rakyatnya.

Perkembangan agama Kristen yang pesat ini berkat usaha para pemuka dan pemimpinnya yang adil dan bijaksana. Mereka mendirikan sekolah-sekolah di biara-biara. Di sekolah tersebut diajarkan ilmu agama dalam rangka membentuk kader-kader penyebar agama.

Pantainos, mempelopori perubahan dalam pendidikan di kalangan biara dengan membuka sekolah di Iskandariah. Di samping ilmu agama ia mengajarkan pula kesusastraan Yunani, sejarah, dialektika, ilmu ukur, ilmu alam, dan ilmu bintang. Sekolah model baru ini kemudian didirikan di berbagai kota di wilayah kerajaan Romawi

Dalam perkembangan sejarah Eropa selanjutnya dikenal Zaman Pertengahan, yaitu zaman yang meliputi periode tahun 500 sampai

dengan tahun 1500 Masehi. Dalam zaman ini masyarakat Eropa mengalami kegoncangan-kegoncangan, baik akibat pergolakan di dalam masyarakat Eropa sendiri ataupun akibat datangnya pengaruh dari luar, terutama dari kaum muslimin. Pada waktu itu tingkat budaya dan pengetahuan umat Islam lebih tinggi dari masyarakat Eropa. Kenyataan itu menyadarkan orang Eropa akan ketinggalannya dan bertekad untuk mengejar ketinggalan itu. Keadaan demikian mempengaruhi bidang pendidikan, sehingga tiap-tiap lapisan masyarakat mempunyai corak pendidikan sendiri-sendiri.

Pendidikan bagi kelompok ksatria diarahkan untuk kepentingan istana, sebagai tenaga pembantu keraton. Pendidikan terdiri atas 3 tingkatan, yang dimasuki anak-anak pada usia 7 tahun, 14 tahun, dan 21 tahun. Di dalamnya diajarkan naik kuda, berenang, memanah, main anggar, berburu, main catur, dan membuat syair. Sedangkan anak-anak kaum buruh dididik untuk dipersiapkan sebagai calon buruh. Sementara itu, di gereja-gereja atau katedral-katedral diadakan pendidikan bagi calon petugas gereja. Lama kelamaan sekolah-sekolah di gereja ditingkatkan menjadi universitas. Di dalam universitas pun dibedakan tiga tingkatan.

1. *Apprentice*; di sini murid-murid dididik selama 4--5 tahun sejak usia 2--14 tahun. Pada akhir tingkat mendapat gelar *bachelor* (sarjana muda).
2. Jika seorang *bachelor* melakukan studi lagi selama 3--4 tahun pada beberapa orang guru sampai ia membuat skripsi yang dipertahankan, akan mendapat *licentia docendi.*
3. Studi untuk mencapai sarjana. Kini ia dapat bekerja dengan mendapat gaji.

Berabad-abad lamanya sistem pendidikan unversitas berlangsung tanpa mengalami perubahan berkat pengelolaan gereja yang memegang kekuasaan. Namun kemudian (abad ke-15) keadaan bergeser kepada kekuatan nasional dengan timbulnya cita-cita nasional, kalangan gereja mendapat tantangan hebat, Tantangan itu disebabkan oleh lahirnya, gerakan renaissance dan reformasi yang menutut perubahan keadaan. .

Gerakan *renaissnce* dan reformasi itu dipelopori oleh kaum cendekiawan, pangeran, dan hartawan yang menaruh perhatian besar dan menggali kesusastraan dan kesenian Yunani dan Romawi. Gerakan ini memperjuangkan kemerdekaan atas kungkungan dari Zaman Pertengahan, berupa adat, pendeta, dan raja. Kaum renaissance menaruh perhatian terhadap tindakan, kesenangan hidup, dan penghargaan terhadap alam.

Pengaruh gerakan renaissance terhadap pendidikan ditandai dengan munculnya sekolah-sekolah yang memakai bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dan sekolah menengah yang disebut *Gymnasium* di Jerman, *Lyseum* di Perancis, dan *English Public Schools* di Inggris. Sekolah-sekolah itu didirikan oleh golongan atas, termasuk golongan kaya. Di sekolah-sekolah ini buku-buku klasik yang lepas dari ikatan agama Kristen dijadikan inti pelajaran. Oleh karena itu, tidak aneh bila gerakan pembaharuan ini dimusuhi oleh kalangan gereja dan universitas. Namun berkat dukungan kalangan istana gerakan pembaharuan itu terus bergerak dan berkembang. Dengan gerakan ini kedudukan guru menjadi lebih meningkat. Sistem pendidikan ini terus berpengaruh hingga zaman sekarang.

Dalam pembahasan gerakan renaissance ini tidak dapat dilupakan gerakan reformasi yang dipelopori oleh tokoh agama Kristen Jerman Martin Luther pada awal abad ke-16 Masehi. Luther melancarkan perlawanan terhadap gereja Katholik dan mendirikan aliran baru yang dinamai Protestan.

Dengan gerakannya itu Luther mengadakan pembaharuan di lingkungan gereja dan sekolah-sekolah yang dikelola oleh gereja. Menurut Luther, sistem pendidikan di universitas harus diubah. Ia juga menganjurkan kepada pemerintah agar mendirikan dan memelihara sekolah rakyat bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Anak-anak diwajibkan mengunjungi sekolah paling tidak selama 2 jam setiap hari. Yang diajarkan dalam sekolah ini ialah gerak badan, menulis, membaca, bernyanyi, dan agama dengan pangantar bahasa daerah (bahasa Jerman). Konsep Luther dilaksanakan oleh Johannes Bugenhagen. Sekolah rakyat itu dapat berjalan dengan hasil yang baik sehingga Martin Luther dijuluki Bapak Sekolah Rakyat.

Di samping sekolah rakyat Luther mengadakan pula pembaharuan atas sekolah menengah. Menurut Luther, sekolah-sekolah lanjutanlah yang menjadi alat terpenting bagi perluasan cita-cita reformasi. Di sekolah menengah diajarkan bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, retorika, dialektik, sejarah, ilmu alam, ilmu pasti, musik, dan gerak badan. Pelaksanaan konsep sekolah menengah ini dijalankan oleh *Sturm*, *Melanchton*, dan *Trotzendorf*. Sekolah menengah yang disebut juga Sekolah Latin berfungsi untuk mencetak kader-kader pemimpin gereja dan negara, merupakan pembuka gerbang untuk memasuki universitas.

Selanjutnya, sejajar dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa, dunia pendidikan pun mengalami pembaharuan dan perubahan. Pembaharuan dan perubahan itu berpangkal pada kemajuan ilmu pengetahuan yang menitikberatkan metode kritis dan hasil percobaan di laboratorium. Selain itu, sistem pendidikan dipengaruhi bukan hanya oleh penemuan dalam ilmu Mendidik, tetapi juga oleh penemuan-penemuan disiplin ilmu lain yang kemudian dijadikan ilmu bantu dalam dunia pendidikan, seperti Ilmu Jiwa, Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan lain-lain.

Demikianlah, perkembangan pendidikan umum secara garis besar. Model-model pendidikan tersebut ada hubungannya dengan perkembangan pendidikan di Indonesia berhubung dengan perkembangan sejarah Indonesia.

Catatan

1. Teguh Asmar dkk., *Sejarah Jawa Barat Dari Masa Pra-Sejarah Hingga Masa Penyebaran Agama Islam*, Proyek Penunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat, 1975, hal. 3--7.
2. Robert Heird - *Geldern, Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara,* Terdj. Deliar Noer, tjet. ke-2, Djakarta, 1972, , hal. 1--27.
3. Teguh Asmar dkk., *op. cit.*, hal. 24--38.
4. *Ibid.*, hal. 49--54.
5. Lihat: Amir Sutaarga, *Prabu Siliwangi* Bandung, Duta Rakyat, 1965. Saleh Danasasmita, *Ya Nu Nyusuk Na Pakuan*, Bandung, Lembaga Kebudayaan Universitas Padjadjaran, 1973.
6. Teguh Asmar dkk., *opcit.*, hal. 42--44.
7. A. Suryadi, *Masyarakat* Sunda Budaya dan Problema, Bandung, Alumni, 1974, hal. 31
8. F. De Haan, Priangan, III, Batavia, BGKW, 1910, hal.

9 A. Suryadi, *op.cit.*, hal. 31--32.

10. Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tome Pires*, London, The hakluyt Sosiety, 1944, hal. 170, 172, 175

11. J.C. van Leur, *Indonesian Trade and Society*, The Hague, Bandung, W. van Hoeve, 1955, hal. 133--134, 142--143.

12 Armando Cortesao, *op.cit.*, hal. 183.

13 Atja, *Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari*, Jakarta, Ikatan Karyawan Museum Pusat, 1970., hal. 53--54.

14. J. Hageman, "Geschidenis der Soendalanden", TBG, XVL 1866., hal. 219--220

15. Uka Tjandrasasmita, *Sultan Ageng Tirtajasa Musuh Besar Kompeni Belanda*, Jakarta, Jajasan Kebudajaan Nusalarang, 1967, hal. 28--30.

16. Edi S. Ekadjati, *Cerita Dipati Ukur, Suatu Karya Sastra Sejarah*, Disertasi Jakarta, Universitas Indonesia, 1979, hal. 149, 151, 395--459.

17. P.A. Leupe, "Verhael van de belegeringhe der stadt Batavia in't coninckrijck van Jaccatra, Anno 1628, den 22 Augustij", *BKI*, III,1855, hal. 289--291

18. Edi S. Ekadjati *Priangan Historiography*, paper, presented at the Historical Conference Dutch - Indonesia, Lage Vuursche, 1980, hal. 9--11 El S. Ekadjati (ed), *Masyarakat dan Kebudajaan Sunda*, Bandung, Pusat Ilmiah Dan Pembangunan Regional (PIPR) Jawa Barat, 1980, hal.. 81, 99.

19. Edi S. Ekadjati (ed), *op.cit.*, 1980, hal. 99.

20 Henri Charles van Meerten, *Overzicht van de hervorring van het PreangerStelsel*, proefschrift, Leiden, J.J. Goen, 1887. Yacob Wauter de Klein, *Het Preanger Stelsel* (1677--1871); en Zijn Nawerking, proefschrift, Delft, 1931.

BAB II

PENDIDIKAN TRADISIONAL

2.1 Pengaruh Agama Hindu dan Buda

Sebagaimana telah dikemukakan di atas (bab I), bahwa pada dasarnya pendidikan dimulai sejak manusia ada dan daerah Jawa Barat telah dihuni manusia sejak masa pra-sejarah (sebelum abad ke 5 Masehi). Oleh karena itu, dunia pendidikan di daerah Jawa Barat kiranya telah berjalan sejak masa pra-sejarah, betapapun sederhananya, sesuai dengan tingkat budayanya. Tetapi bagaimana sistem pendidikan yang berlaku waktu itu tak diketahui dengan pasti, sebab keterangan tentang hal itu belum ada. Hanya dapat diperkirakan bahwa pendidikan masa itu langsung berjalan dengan praktek (pendidikan non-formal).

Dalam masyarakat petani, sejak kecil anak-anak telah dibawa oleh orang tua mereka ke ladang tempat bekerja. Anak-anak dilatih bekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat usia[1] dan jenis keahlinnya. Dengan latihan itu, akhirmya anak-anak dapat mengerjakan tanah pertanian mereka sendiri seperti orang tua mereka atau bahkan melebihi cara kerja orang tua mereka. Masyarakat yang menetap di pinggir sungai atau tepi danau, seperti masyarakat daerah Kalapadua, Kampung Muara, dan Lembah Leles, akan melatih anak-anak dengan mengikutsertakan mereka dalam pekerjaan sehari-hari, yaitu menangkap ikan, berlayar, dan lain-lain.

Sesudah daerah Jawa Barat memasuki masa sejarah, kiranya sistem pendidikan yang berlaku dalam masyarakat yang menempati daerah ini telah mengalami sedikit kemajuan dan perubahan, berhubung dengan masuknya pengaruh agama Hindu dan Buda. Pada zaman Kerajaan Tarumanagara (abad ke-5 sampai dengan abad ke-7) diberitakan telah banyak brahmana yang mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan. Pada masa itu dijumpai beberapa peninggalan tertulis (prasasti) yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dari waktu itu ditemui pula peninggalan hasil karya seni berupa patung yang telah baik cara pembuatannya dan indah hasilnya. Sudah barang tentu bukti-bukti itu memperlihatkan kemajuan dan perkembangan tingkat budaya masyarakat Jawa Barat, dan merupakan hasil pendidikan.

Dapat diperkirakan pada mulanya pendidikan itu dilaksanakan oleh brahmana yang berasal dari India. Baru kemudian mungkin sekali pendidikan itu dilaksanakan oleh orang pribumi sendiri, setelah di antara mereka ada yang menjadi kaum brahmana. Berdasarkan kenyataan terbatasnya pengaruh agama Hindu dan Buda dalam masyarakat Tarumanagara, kemungkinan besar pendidikan yang dipengaruhi agama Hindu itu hanya diberikan kepada anak-anak di lingkungan istana. Tidak ada petunjuk mengenai sistem pendidikan yang berlaku waktu itu, hanya dapat diperkirakan bisa jadi tidak jauh berbeda dengan sistem gurukula seperti yang digunakan di India.

Pada zaman Kerajaan Sunda (abad ke-8 sampai abad ke-16) pendidikan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buda dapat dipastikan ada di Jawa Barat. Terbukti menurut naskah "*Siksa Kandang Karesian* yang disusun tahun 1518, pada waktu itu telah hidup"istilah-istilah "pamagahan" (nasehat), "warah sang darma" (didikan pendeta), "maha pandita", "sang pendita" (pendeta), dan yang lebih jelas lagi telah hidup istilah "sisya" (siswa, murid) dan guru. Bahkan menurut naskah ini, pada waktu itu telah ada pembagian kealihan dalam masyarakat Sunda, seperti ahli telaga (hangsa), ahli laut (matsya), ahli hutan (gajah), ahli bunga (bangbara), ahli cerita (memen), ahli lagu (paraguna), ahli permainan rakyat (hempul), ahli "pantun^{2}" (prepantun), ahli lukis (lukis), ahli membuat senjata dan perkakas besi (panday), ahli kain (pangeuyeuk), ahli agama drigama (paratanda), ahli ilmu

perang (sang hulu jurit), ahli mantera (sang brahmana), ahli tentang memuja (janggan), ahli "uga" (bujangga), ahli negara (ratu), ahli pertanahan (mangkubumi), ahli pelabuhan dan pelayaran (puhawang), ahli keuangan (citrik byapari), ahli urusan ibadah (sang wiku paraloka), ahli bahasa-bahasa asing (sang jurubasa darmamurcaya). Dalam pada itu sangat dianjurkan agar murid menghormati guru (sisya bakti di guru).[3] Namun demikian mengenai bagaimana bentuk dan sistem pendidikan yang sesungguhnya serta cara pelaksanaan dan materi pelajarannya tidak diketahui secara rinci. Hanya dalam khazanah bahasa dan kebudayaan Sunda dikenal ialah padepokan, paguron, dan patapan, yang berarti pusat pendidikan dengan sistem pendidikannya semacam "gurukula" Nama-nama tempat Rajamandala, Mandalawangi yang mengandung kata "mandala", kemungkinan menunjukkan bahwa dalam masyarakat Sunda dahulu pernah ada wilayah kekuasaan lembaga agama (mandala)[4], yang tidak lain adalah pusat pendidikan dengan sistem gurukula.

Menurut naskah Carita Parahiyangan yang disusun pada abad ke- 16 Masehi, di lingkungan kerajaan Sunda terdapat daerah-daerah kekuasaan agama (mandala) yang dihormati oleh raja. Daerah kekuasaan agama itu dipimpin oleh Batara (Guru). Misalnya daerah kekuasaan agama di Galunggung (Tasikmalaya barat) dipimpin oleh Rahiang Sempakwaja yang dijuluki Batara Dangiang Guru dan di Denuh (Tasikmalaya selatan) dipimpin oleh Rahiangtang Kidul yang bergelar Batara Hiang Buyut.[5] Dalam pada itu pertapaan-pertapaan yang dikenal di tanah Sunda, antara lain di Galuh (Ciamis sekarang) terkenal dengan nama pertapaan Ajar Sukaresi[6], di Garut dengan nama pertapaan Gununglarang Srimanganti.[7] Pendeta-pendeta yang dikenal dalam masyarakat Sunda lama, antara lain Begawat Sajalajala di Galuh[8], Batara Guru di Jampang, Sukabumi Selatan[9], Munding Rahiang atau Hiang Kalingan di daerah pantai.[10] Selain itu, diketahui pula adanya pendeta-pendeta di Sumedang, Ciranjang (Cianjur) dan Jayagiri (daerah pantai).[11]

Sudah barang tentu karya-karya tulis yang berasal dari zaman kerajaan Sunda, baik yang sekarang masih ada ataupun yang sekarang hanya diketahui judul-judulnya merupakan karya para cendekiawan masa itu yang telah mengalami pendidikan dan latihan yang melebihi

dari orang-orang umumnya waktu itu. Karya-karya itu antara lain Siksa Kandang Karesian yang merupakan *Ensiklopedi* Kebudayaan Sunda[12], Carita Parahiyangan dan Carita Ratu Pakuan yang merupakan karya sejarah Sunda, Pantun Ramayana merupakan karya sastra yang bernilai tinggi[13], aneka macam cerita "pantun" (Siliwangi, Haturwangi Banyakcatra Langgarang[14], Lutung Kasarung, Ciung Wanara, Mundinglaya Dikusumah, Nyi Sumur Bandung[15]), aneka macam cerita (Damarjati, Sanghyang Hayu, Jayasena, Sedamana, Pujayakarna, Ramayana, Adiparwa, Korawasarma, Bimasorga, Ranggalawe, Boma, Sumana, Kalapurbaka, Jarini, Tantri[16] dan prasasti (Batutulis, Kebantenan[17]).

2.2 Pengaruh Agama Islam

2.2.1 Masa Permulaan Islam

Agama Islam yang masuk di daerah Jawa Barat lewat pesisir utara mempengaruhi pula alam pendidikan di daerah ini, baik materi pelajaran, tujuan pendidikan, dan lain-lain.

Menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari[18] yang disusun oleh Pangeran Arya Carbon pada tahun 1720, lokasi pendidikan Islam yang pertama di daerah Jawa Barat ialah di bukit Sembung, Cirebon. Bukit Sembung merupakan kompleks makam Gunung Jati kira-kira 5 km sebelah barat laut kota Cirebon. Pada tahun 1470 datanglah ke bukit Sembung seorang ulama dari tanah Arab bernama Syarif Hidayat. Ia pergi dari tanah kelahirannya dengan maksud untuk menyebarkan agama Islam di tanah leluhurnya dari pihak ibu (tanah Sunda). Sebelum tiba di Cirebon, ia menemui dahulu Sayid Rakhmat (Sunan Ngampel) yang waktu itu telah menjadi guru agama terkenal di Pulau Jawa. Dalam pertemuan itu Syarif Hidayat mendapat tugas untuk menyebarkan agama Islam dan menjadi guru agama di bukit Sembung. Sebagai guru agama, ia bergelar Maulana Jati atau Syekh Jati. Pada waktu itu di Cirebon telah mulai banyak penduduk yang masuk agama Islam berkat usaha saudagar Islam pendatang dan Walangsungsang.

Mengenai identitas Syarif Hidayat, menurut sumber naskah tersebut[19] dapat dijelaskan sebagai berikut. Ia adalah putera Sultan

Makhmud penguasa di daerah Mesir. Ibunya bernama Nyai Lara Santang, seorang keturunan penguasa tanah Sunda. Syarif Hidayat lahir di tanah Arab pada tahun 1448 Masehi.

Ternyata Syarif Hidayat tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan saja, melainkan juga menghimpun kekuasaan sehingga pada tahun 1479 diangkat menjadi Tumenggung membawahi Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati. Pada waktu itu Cirebon merupakan daerah bawahan Kerajaan Sunda, tetapi tak lama kemudian Cirebon memisahkan diri dari Kerajaan Sunda (Pajajaran). Bahkan selanjutnya, Susuhunan Jati diberi kekuasaan oleh para wali (ulama terkemuka di Pulau Jawa) untuk menjadi Kepala Agama dan Kepala Kekuasaan Islam (Penetap Panatagama) di seluruh wilayah Tanah Sunda dengan berkedudukan di Cirebon. Cirebon dijadikan pusat penyebaran agama Islam di Tanah Sunda.

Lembaga pendidikan di Bukit Sembung mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam kepada kaum muslimin yang baru masuk Islam dan juga menggodog kader-kader mubalig. Para kader mubalig itu kemudian dikirimkan ke daerah pedalaman dengan tugas menyebarkan agama Islam kepada penduduk Kerajaan Sunda. Usaha tersebut sangat berhasil sehingga hampir seluruh penduduk Jawa Barat kemudian menganut agama Islam. Dalam hal ini Susuhunan Jati sendiri (sesudah wafat disebut Sunan Gunung Jati) mencurahkan sepenuhnya ke dalam kegiatan da'wah Islam sejak tahun 1528 terutama dalam menghadapi pengislaman daerah pedalaman.

Pembinaan kaum muslimin berjalan dengan baik, berkat usaha-usaha tetsebut ditunjang oleh pemegang kekuasaan, yaitu Sultan Banten, Sultan Cirebon, bupati-bupati, dan lain-lain. Selain itu, para ulama menempati kedudukan sangat penting di dalam keraton di Cirebon dan Banten serta pendopo-pendopo kabupaten di wilayah Priangan. Di Sumedang, misalnya, Kiai Rangga Haji, putera Pangeran Geusan Ulun (bupati Sumedang), beserta keturunannya khusus bergerak dalam bidang keagamaan. Bupati Sumedang Pangeran Adipati Kusumahyuda (1828--1833), Pangeran Kornel (1795-- 1828), Pangeran Suria Atmaja memberi hadiah tanah wakaf kepada para ulama yang mengadakan pengajaran agama Islam di daerahnya.[20]

Sementara itu, Syekh Abdulmuhyi, seorang ulama dari Gresik, Jawa Timur, mendirikan pusat pendidikan Islam di Pamijahan, Tasikmalaya selatan pada awal abad ke-17, setelah terlebih dahulu penduduk sekitarnya diislamkan. Ia mendapat dukungan dari Sultan Agung Mataram.[21] Selain itu, Syekh Yusuf seorang ulama terkemuka di Banten yang berasal dari Sulawesi selatan, mendapat kedudukan penting dalam lingkungan keraton Banten. Di samping melakukan kegiatan da'wah Islam, ia juga bertindak sebagai penasehat Sultan Ageng Tirtayasa. Ia mempunyai andil besar dalam penyebaran agama Islam dan peningkatan pengetahuan Islam terhadap penduduk di daerah-daerah selatan Banten dan Priangan.[22]

2.2.2 Pesantren-pesantren di Jawa Barat

Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, umumnya dilakukan dengan cara nonklasikal, di mana seorang kyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama Arab Abad Pertengahan. Sedangkan kyai ialah seorang ahli dan pemeluk agama Islam yang mengajarkan ilmunya kepada santri, dan biasanya sekaligus merupakan pemimpin dan pemilik pesantren tersebut. Dan santri adalah murid dalam pesantren, biasanya tinggal dalam pondok (asrama), meskipun ada kalanya tinggal di rumah mereka sendiri atau rumah-rumah di sekitar pesantren.[23]

Di samping mempelajari ilmu agama Islam, santri-santri itu belajar hidup sendiri, memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri mengatur pembelajaan sehari-hari, dan mengurus hal-ikhwal sendiri. Mereka membawa sendiri keperluan hidup sehari-hari, seperti beras, lauk pauk, dari kampung mereka.[24]

Timbulnya pesantren-pesantren di Jawa Barat, sebenarnya merupakan perkembangan dari lembaga pendidikan yang didirikan oleh Syarif Hidayat di Cirebon. Pada umumnya mereka terdiri atas murid atau keturunan murid Syarif Hidayat atau para wali lainnya.

Sayang sekali hingga sekarang belum dilakukan penelitian mengenai pesantren-pesantren di Jawa Barat pada masa mula pertama. Memang penelitian tentang masalah itu tampaknya sulit dilakukan,

berhubung dengan pesantren-pesantren tersebut sudah tidak ada lagi, bahkan tidak meninggalkan bekas-bekasnya, apalagi dokumen-dokumen tertulis. Mungkin pula namanyapun tidak dikenal lagi.

Pada umumnya lokasi pesantren-pesantren di Jawa Barat terletak di daerah pedalaman atau di luar kota yang kadang-kadang sulit dijangkau oleh lalu-lintas umum. Timbulnya hal demikian cenderung disebabkan oleh keadaan politik pada masa itu, terutama yang bertahan dengan masuknya kekuasaan Belanda ke dalam pusat pemerintahan bangsa pribumi.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1610 orang Belanda melalui VOC (Kumpeni) memperoleh tempat kedudukan di Jayakarta. Sejak itu secara berangsur-angsur dan menggunakan taktik adu-domba, mereka menanamkan kekuasaan di daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. Kemudian Pada tahun 1683 memasuki Banten. Dengan perjanjian 1677 dan 1705 Kumpeni memperoleh daerah Priangan dari Mataram. Pada perempatan pertama abad ke-19 Masehi seluruh Jawa Barat telah jatuh ke dalam kekuasaan Kumpeni secara nyata.

Masuknya kekuasaan orang Belanda ke dalam pusat pemerintahan bangsa pribumi, yaitu keraton Cirebon, keraton Banten, dan pendopo-pendopo kabupaten di Priangan, kurang disenangi para ulama, karena di samping mereka bukan muslim, juga suka membawa cara hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti minum-minuman keras. Karena untuk menolak kehadiran dan kebiasaan mereka tidak kuasa, sebagian para ulama itu bersikap menjauhi kehidupan kota dan pindah ke luar kota dan daerah pedalaman untuk hidup di tengah-tengah rakyat dan melakukan kegiatan keagamaan dengan memberi pelajaran ilmu agama Islam. Lama kelamaan didirikanlah pesantren.

Pesantren-pesantren yang berdiri dengan latar belakang demikian antara lain pesantren Buntet di kecamatan Astanajapura, kira-kira 11 kilometer sebelah timur kota Cirebon, pesantren Asyrofuddin, di Conggeang, Sumedang; dan mungkin pula pesantren Lengkong di Kuningan.

2.2.2.1 Pesantren Buntet Cirebon

Pesantren Buntet[25] didirikan oleh Kyai Muqayyim sekitar tahun 1750. Pada mulanya Kyai Muqayyim adalah seorang guru agama Islam di keraton Kanoman Cirebon dan penasehat Sultan Kanoman Khaeruddin I. Di lingkungan keraton ia mengajarkan fiqh, tauhid, tassawuf, dan lain-lain. Ia putra Kyai Abdulhadi, cucu salah seorang pangeran Cirebon dari puteri Anjasmoro yang berasal dari daerah Indramayu.

Kyai Muqayyim termasuk tokoh yang tidak menyukai masuknya pengaruh Belanda ke dalam keraton Kanoman. Karena untuk menolak pengaruh itu tidak mungkin, maka ia mengambil sikap dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari lingkungan keraton dan kemudian bermaksud akan mengembangkan ajaran Islam di luar kota. Akhirnya, ia berkelana dan menemui tempat yang cocok untuk merealisasikan niatnya, yaitu di kampung Kedunghalang. Di tempat tersebut ia mendirikan rumah tempat tinggal, langgar (mesjid dalam ukuran kecil), dan pondok buat menginap murid-muridnya. Maka berdirilah pesantren Buntet.

Pada mulanya pesantren Buntet dapat dikatakan hanya sebagai tempat pengajian saja, di mana langgar yang didirikannya sebagai tempatnya. Tetapi dalam jangka waktu yang tidak begitu lama didirikanlah pondok-pondok untuk menampung santri-santri yang datang kepadanya.

Berita tentang berdirinya pesantren Buntet telah sampai ke telinga Belanda di Cirebon. Begitu pula pemerintah kolonial Belanda di Cirebon telah mengetahui bahwa pengaruh pesantren Buntet terhadap masyarakat besar sekali. Menurut penilaian Belanda keadaan itu berbahaya bagi kedudukannya di Cirebon. Untuk melenyapkan kekhawatiran itu, Belanda mengadakan penggrebegan ke Buntet. Tetapi usaha Belanda itu sia-sia belaka, karena Kyai Muqayyim beserta santri-santrinya telah mengungsi ke tempat adiknya, Kyai Ismail di kampung Pesawahan. Tentara Belanda marah lalu membakar gubug-gubug pesantren itu.

Di Pesawahan Kyai Muqayyim mendirikan mesjid dan membuka pesantren baru dengan bantuan adiknya. Pesantren baru di Pesawahan

lekas dikenal oleh masyaraakat Islam di sekitarnya dan banyak dikunjungi orang dan santrinya. Bahkan putra Sultan Kanoman sendiri yaitu Pangeran Muhammad Khaeruddin II yang lahir tahun 1777 yang merasa sakit hati oleh tindakan sewenang-wenang Belanda dalam pergantian Sultan tahun 1798 datang di pesantren Pesawahan untuk memperdalam ilmu agama Islam.[26]

Kepergian Pangeran Muhammad Khaeruddin II (Raja Kanoman) dari keraton ke pesantren Pesawahan dan ke desa-desa lain dikatakan oleh Belanda sebagai diusir.[27] Tetapi kalangan pesantren Buntet mengatakan karena akan menuntut ilmu agama Islam, seperti dituturkan :

> Kedatangan Pangeran Muhammad Khaeruddin II (ke Pesantren Pesawahan) yang masih teruna itu disambut dengan mesra oleh Kyai Muqayyim, apalagi setelah Kyai mendengar tentang tujuan Pangeran, di samping silaturrakhmi terutama Pangeran ingin berguru pada kyai..... Karena Pangeran Muhammad Khaeruddin II adalah seorang yang termasuk alim dan karena beliau adalah seorang putra Sultan, maka pengaruh Pangeran Muhammad adalah besar sekali.[28]

Besarnya pengaruh Pangeran Muhammad Khaeruddin II di kalangan rakyat Cirebon, terutama kaum agamanya, diakui oleh Belanda. Demikian besar pengaruhnya, sehingga pemerintah kolonial Belanda menganggap Pangeran Muhammad Khaeruddin II (Raja Kanoman) berbahaya, bila dibiarkan terus berada di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu untuk mempertahankan kedudukannya di Cirebon, Belanda segera mengadakan tindakan, yaitu menangkap Pangeran Muhammad Khaeruddin II. Kemudian Pangeran Muhammad Khaeruddin II dibawa ke Batavia untuk ditahan dan kemudian dibuang ke Ambon.[29]

Menurut berita dari pesantren Buntet, Pangeran Muhammad Kharuddin II ditangkap oleh Belanda ketika berada di pesantren itu. Pada waktu sedang diadakan upacara pernikahan salah seorang putra Kyai Muqayyim dengan putra adiknya. Terjadilah pertempuran yang cukup sengit antara pasukan Belanda dengan santri-santri Kyai Muqayyim. Akhirnya pasukan Belanda mengundurkan diri ke Cirebon.[30]

Dengan adanya serangan Belanda itu keamanan di sekitar pesantren tidak terjamin lagi. Untuk menghindari pertumpahan darah yang besar maka Kyai Muqayyim memutuskan untuk pindah ke Beji di Pemalang Jawa Tengah. Atas petunjuk sahabatnya, yaitu Ardisela, beliau menetap dulu di Sindanglaut. Di sini beliau mendirikan langgar dan mengadakan pengajian. Tatkala Kyai Muqayyim berada di Sindanglaut, pasukan Belanda pernah menyergap lagi. Tetapi serangan itu tidak berhasil menangkap Kyai Muqayyim.

Di Pemalang Kyai Muqayyim diterima oleh lebenya (Kepala Agama) yang bernama Kyai Abdussalam. Di sana juga Kyai Muqayyim membuka pesantren.

Sementara itu Pangeran Muhammad Khaeruddin II atas kebijaksanaan Gubernur Jendral Daendels (1808--1811) didatangkan kembali ke Cirebon dari pembuangannya di Ambon pada tanggal 25 Maret 1808. Dan pada tanggal 2 Pebruari 1809 diangkat oleh Daendels menjadi Sultan Cirebon.[31] Pangeran Muhammad Khaeruddin II ketika baru tiba dari Ambon ditempatkan di Sunyaragi, Cirebon.[32] Di sana ia dikunjungi oleh gurunya Kyai Muqayyim. Dari Cirebon Kyai Muqayyim pulang ke Buntet dan di sana mendirikan mesjid serta pondok-pondok lagi untuk membuka pesantren kembali. Sejak itu pesantren Buntet berkembang lagi di bawah pimpinan Kyai Muqayyim. Sistem pengajaran yang digunakannya ialah sistem pengajian surau. Dan sistem itu dipakai terus sampai Kyai Muqayyim meninggal dunia. Sayang sekali waktu meninggalnya tak diketahui dengan pasti, hanya yang pasti sesudah tahun 1809.

Setelah Kyai Muqayyim meninggal dunia, pesantren Buntet mengalami masa kekosongan untuk beberapa waktu lamanya. Baru dapat dilanjutkan kembali oleh cucu menantunya yang bernama Kyai Mutaad (lahir sekitar tahun 1785).

Dengan susah payah selama 3 tahun Kyai Mutaad membangun pesantren Buntet peninggalan kakeknya. Dalam pembangunannya itu beliau dibantu oleh menantunya yang bernama Kyai Anwaruddin (kyai Krian). Sejak itu keluarga Kyai Mutaad melahirkan kyai-kyai yang tersohor ilmunya. Di antaranya Kyai Krian, K. Tohir, dan K. Solekh yang membuka pesantren baru di Benda. Cirebon selatan. Dan Kyai Said membuka pesantren di Gedongan.

Santri-santri di pesantren Buntet pada masa pimpinan Kyai Mutaad kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada masa itu kitab-kitab pelajaran sudah mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Kitab-kitab yang ditulis oleh tangan sampai sekarang masih ada disimpan di pesantren Buntet.

Setelah Kyai Mutaad meninggal dunia, pimpinan pesantren diserahkan kepada putranya yang bernama Kyai Abdul Jamil. Kyai Abdul Jamil dilahirkan tahun 1842 dan dibesarkan di keraton Cirebon, karena mengikuti kakaknya Kyai Krian yang menjadi penghulu di keraton Kasepuhan Cirebon.

Kyai Abdul Jamil memegang tampuk pimpinan pesantren sepulangnya belajar di Mekah. Maka diperbaharuilah pesantren Buntet itu, baik tentang sistem pengajarannya, ataupun bangunan mesjid dan pondok-pondoknya. Pada masa itu jumlah santri-santrinya tidak kurang dari 700 orang yang barasal dari pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Singapur.

Sementara itu rintangan-rintangan dari pemerintah kolonial Belanda tidak sedikit, tetapi pesantren Buntet tetap bertahan dan berjalan. Umpamanya santri-santri pesantren Buntet telah pernah disuruh kerja paksa oleh Belanda membuat "gili-gili" dan para kyainya, termasuk Kyai Abdul Jamil, yang harus ikut mencangkul dan membabad untuk gili-gili itu. Perintah kerja paksa itu disebabkan karena adanya sebuah keputusan dari pesantren itu yang melarang santri-santri dan guru-gurunya menjadi pegawai Belanda, masuk sekolah Belanda, meniru pakaian Belanda, dan yang lainnya yang sejenis dengan itu.

Pengaruh Kyai Abdul Jamil terasa sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1900 Kyai Abdul Jamil diminta pertolongan oleh K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri dan pemimpin pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pesantren itu. Haji Samanhudi, pendiri Syarekat Dagang Islam (SDI), adalah salah Seorang santri dari pesantren Buntet tatkala dipimpin oleh Kyai Abdul Jamil. Dan Kyai Abdul Jamil sendiri memangku jabatan di bagian hukum (Syuriyah), sedangkan bagian Tanfidiyah dipegang oleh K.H. Anwar (K.H. Khawi), yang termasuk juga Sesepuh Pesantren Buntet, di dalam SDI itu.

K.H. Abdul Jamil meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 23 Rabyutsani 1339 Hijrah atau 1919 Masehi.

Pengganti K.H. Abdul Jamil adalah putra sulungnya, bernama Kyai Abbas. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 24 Zulhijjah 1300 Hijrah atau 1879 Masehi. Kyai Abbas belajar ilmu agama dari ayahnya dan dari beberapa pesantren di Pulau Jawa. Diantaranya pesantren Sukun Sari, Plered pada Kyai Hassan, pesantren Jati Sari pada Kyai Nasukha, pesantren Giren, Tegal pada Kyai Ubaedah, dan pesantren Tebuireng di Jombang pada Kyai H. Hasyim Asy'ari. Di Jombang Kyai Abbas bersama kawan-kawannya membantu mendirikan pondok-pondok baru, dan membantu Kyai Manaf dalam membuka pesantren Lirbaya di Jawa Timur. Kyai Abbas pergi ke Mekah sampai dua kali, di samping untuk menunaikan ibadah haji, juga untuk belajar ilmu agama, terutama ilmu Qiro'at, Tafsir, dan Hadist.

Pesantren Buntet di bawah pimpinan Kyai Abbas diperbaharui lagi, kini di samping tempat menuntut ilmu agama, juga dijadikan tempat menggodog pemuda-pemuda dalam rangka perjuangan Kemerdekaan Nasional menghadapi pemerintah kolonial Belanda.

Pesantren Buntet disebutnya "Bakhrul Ulum" artinya lautan ilmu. Pada masa ini santri-santri membanjir berdatangan ke pesantren Buntet dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk menampung santri-santri itu dan melayaninya dengan sebaik-baiknya, maka harus diadakan perluasan tempat dan pembaharuan dalam penyelenggaraan pendidikannya.

Untuk itu semuanya, didirikanlah pondok-pondok baru, disusun staf penata-laksana dan gurunya disesuaikan dengan keahliannya masing-masing. Struktur organisasi baru dari pesantren itu, ialah :

A. Pimpinan Umum	:	K.H. Abbas
B. Dewan Sesepuh/Pengasuh	:	1. K.H. Abbas
		2. K.H. Anas
		3. K.H. Ilyas
		4. K.H. Akyas

C. Dewan Guru :
   a. K.H. Murtadlo. K.H. Yusuf, K.H. Zen, dan K.H. Hasyim: memberi pelajaran al-Qur'an/Qiro'at.
   b. K.H. Imam: Ilmu Falak, ilmu Faro'id, dan ilmu Mantiq.
   c. K.H. A. Zahid, K. Nuruddin, K. Abd. Karim: ilmu Fiqhi, ilmu Tauchid dan ilmu Pendidikan.
   d. K. Arsyad, K. Asnawi, dan K. Hafid: ilmu Nahu, dan Sorof.
   e. K.H. Abbas, K.H. Anas, K.H. Akyas, dan K.H. Mustahdi Abbas: Tafsir, Hadist, dan lain-lain.

D. Seksi-seksi :
   a. Seksi Pendidikan Pesantren : K.H. Anas (adik K.H. Abbas).
   b. Seksi Pendidikan Pra Madrasah : K.H. Imam (menantu K.H. Abbas).
   c. Seksi organisasi dan administrasi : K.H. Mujahid.
   d. Seksi Kepemudaan : K.H. Mustahdi Abbas (putra K.H. Abbas).
   e. Seksi Peribadatan dan Kerokhanian : K.H. Amim, dan K.H. Sholeh.

E. Pembantu Umum :
   Para santri yang cakap dan cukup ilmu pengetahuannya diangkat menjadi pembantu umum.

Dalam pada itu dengan berdasar kepada pandangan bahwa pada umumnya orang tidak berkehendak untuk mengikuti pendidikan pesantren, maka di pesantren Buntet dibukalah pendidikan sekolah/ madrasah pada tahun 1928. Sistem pengajaran diganti dengan sistem klasikal. Dan santrinya telah mencapai jumlah tidak kurang dari 1000 orang.

Selain itu di pesantren Buntet diutamakan pula bidang pendidikan kepemimpinan untuk da'wah. K.H. Abbas pada waktu-waktu tertentu mengirimkan santri-santrinya dan kyainya sebagai mubalig ke daerah-daerah yang ilmu pengetahuan agamanya masih kurang. Di tempat itu diadakan pengajian atau ceramah agama, di mana pemberi ceramahnya itu adalah para santri yang dibimbing oleh kyainya.

Dalam pada itu untuk menampung santri-santrinya yang kian banyak jumlahnya, pada tahun 1936 K.H. Anas mendirikan pondok-

pondok baru di kampung Kilapat (Sida Mulya) sebelah selatan Buntet. Santri-santrinya berjumlah 300 orang, yang berasal dari berbagai daerah, antara lain : Indramayu, Majalengka, Demak, Surabaya, Palembang, dan Singapur.

Dalam perjuangan kemerdekaan pesantren Buntet tidak tinggal diam. Para santrinya dididik belajar silat untuk persiapan segala kemungkinan dalam menghadapi Belanda. Di jaman Jepang para santrinya dilatih baris-berbaris dan latihan perang. Persiapan tersebut digunakan pada waktu revolusi fisik berkecamuk di tanah air kita, sehingga pesantren Buntet mengirimkan beberapa pasukan yang telah terlatih dan tergabung dalam pasukan Hizbullah ke beberapa medan pertempuran. Di antaranya ke medan tempur di Surabaya pada peristiwa 10 Nopember 1945, pemberontakan Kaplongan di Indramayu melawan Jepang dan peristiwa-peristiwa lainnya yang terjadi di daerah Cirebon sendiri.

Sementara itu para alumni santri pesantren Buntet yang telah membuka pesantren sendiri di kampung halamannya masing-masing, di antaranya :

1. K.H. Thohir di Pelamunan, 2. K.H. Sholeh Ma'mun di Lontar - Serrang - Banten, 3. K. Sahuthi di Siluman - Karawang, 4. K. Mahfudz di Bugis - Indramayu, 5. K.M. Shobirin di Padaherang - Ciamis, 6. K.H A Syatori di Martapada - Cirebon, 7. K. Junaedi Anas di Sidamulya Cirebon, 8. K. Munawar Idris di Larangan Brebes, 9. K. Junaedi di Kemakmuran - Jatibarang, 10. K.H. Thoifur di Sumolangu - Kebumen, 11. K. Nasukha di Wanayasa - Kebumen, 12. K.H. Jazuli di Bumiayu, 13. K.H. Suhaemi di Bumiayu, 14. K. Ahmad Syakir di Lasem Rembang, 15. K.A. Abdul Hamid di Kendal, 16. K.H. Maksudi di Bawang Pekalongan, 17. K.H. Moh. Juri di Jepara, 18. K.H. Moh. Ikhsan di Lampung - Sumatra Selatan, 19. K.H. Abd. Jabar di Singaparna - Tasikmalaya, 20. K.H. Hasbiyalah di Klender - Jakarta, 21. K.H. Nakhrawi di Jatinegara, 22. K. Abdurrakhman, di Martapada Kulon - Cirebon, 23. K.H. Maksum di Karanganyar - Jatibarang, dan 24. K. Akhmad di Lampung - Sumatra Selatan.[33]

2.2.2.2 Pesantren Lengkong - Kuningan

Pendiri pesantren Lengkong ialah Syekh Haji Muhammad Dako atau lebih terkenal dengan sebutan Eyang Dako. Beliau bukan orang asli desa Lengkong, tetapi berada di sana sebagai pendatang. Negeri asalnya ialah Mekah (tanah Arab) dan datang ke Lengkong sebagai utusan dari Cirebon untuk mengembangkan agama Islam di daerah Kuningan.[34]

Semula Syekh Haji Muhammad Dako hanya mengadakan pengajian kecil-kecilan saja. Yang mengikutinya hanya penduduk desa itu. Tetapi setelah muncul dua orang muridnya yang cerdas yang berasal dari penduduk desa itu, yaitu Kyai Abdulkarim dan Kyai Fakih- Tolab, makin besarlah pengajian tersebut.

Sementara pengajian di Lengkong terus berjalan, Kyai Abdulkarim pergi dulu ke Surabaya untuk memperdalam ilmunya. Dan tatkala beliau kembali dari Surabaya, maka didirikanlah pondok-pondok buat membuka pesantren. Bangunan pondoknya sampai mencapai 50 buah. Santri-santrinya mulai berdatangan,mereka kebanyakan berasal dari sekitar daerah Kuningan, tetapi ada pula yang berasal dari Ciamis, Tasikmalaya, dan Jawa Tengah.

Salah seorang santrinya yang berasal dari Citangtu - kira-kira lima kilometer sebelah baratdaya Lengkong bernama Lukmanul Hakim[35] atau Kyai Hasan Maolani[36] melanjutkan memimpin pesantren itu, setelah ketiga gurunya meninggal dunia. Soalnya Eyang Dako sendiri tidak mempunyai putra, sedangkan Lukmanul Hakim adalah seorang santri yang cerdas dan dapat dipercaya untuk memimpin pesantren itu.

Pesantren Lengkong pada masa pimpinan Kyai Lukmanul Hakim berkembang dengan pesat dan pengaruh Kyai Lukmanul Hakim sangat besar dalam masyarakat setempat. Beliau sangat dihormati dan disegani oleh penduduk daerah itu dan oleh murid-muridnya.

Pada waktu itu di Jawa Tengah sedang berkecamuk perang Diponegoro (1825--1830). Pengaruh perang tersebut merambat pula ke daerah Kuningan, terutama di kalangan kyai-kyai (tokoh agama), Pemerintah kolonial Belanda setempat merasa khawatir melihat adanya pengaruh perang Diponegoro sudah sampai ke sana. Lebih-

lebih lagi tatkala ke pesantren Lengkong itu banyak berkunjung orang untuk bersilaturrakhmi dan mendengarkan fatwa-fatwa Kyai Lukmanul Hakim.[37]

Situasi tersebut dianggap berbahaya oleh Belanda, karena Belanda mengira bahwa berkumpulnya orang-orang di tempat itu adalah untuk mengumpulkan kekuatan yang sewaktu-waktu akan dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu pemerintah kolonial Belanda menilai bahwa hal tersebut akan mengancam kedudukannya di daerah tersebut. Belanda mencari-cari alasan untuk menangkap pemimpin pesantren itu.

Kebetulan pada suatu waktu ada seorang bekas santri Kyai Lukmanul Hakim yang berasal dari Cikoneng, Ciamis memberikan kerbau untuk korban pada Kyai Lukmanul Hakim. Dan ilmu yang diajarkan oleh Kyai Lukmanul Hakim di antaranya ialah ilmu Tarekat.

Peristiwa pemberian korban itu dan ilmu Tarekat yang diajarkan oleh Kyai Lukmanul Hakim oleh Belanda dijadikan alasan untuk menangkap Kyai Lukmanul Hakim dengan tuduhan beliau memeras rakyat dan mengajarkan ilmu giringsing atau ilmu sihir yang menyesatkan. Maka ditangkaplah Kyai Lukmanul Hakim oleh Belanda dan ditahan di Cirebon selama sebulan. Dari Cirebon Kyai Lukmanul Hakim terus dibawa ke Batavia, akhirnya diasingkan ke Menado untuk waktu selama 20 tahun.

Tatkala ditahan di Cirebon Kyai Lukmanul Hakim ditawari oleh penghulu Cirebon untuk dibebaskan dari tahanan asalkan beliau mau kerjasama atau tidak menganggap Belanda sebagai musuh. Tetapi Lukmanul Hakim menolaknya.

Setelah beberapa lamanya berada di Menado, Kyai Lukmanul Hakim yang kemudian terkenal dengan sebutan Eyang Menado mengirim surat kepada keluarganya di Lengkong. Dalam suratnya itu diterangkan bahwa sesungguhnya dibuang ke Menado itu hanya dhohirnya (lahiriahnya) saja, tetapi hakekatnya adalah mengemban tugas untuk menyebarkan Islam di daerah itu. Diumpamakannya seperti Nabi Muhamad saw hijrah dari Mekah ke Medinah. Seluruh penduduk daerah yang dijadikan tempat pembuangan beliau masuk agama Islam.[38]

Dalam pada itu pesantren Lengkong sendiri diteruskan pimpinannya oleh putra-putranya. Di antaranya Kyai Haji Absori dan Kyai Simurubul serta menantunya Kyai Arif. Putra-putranya yang lain menurunkan penghulu-penghulu di Kuningan dan membuka pesantren sendiri di tempat-tempat lain di daerah Kuningan. Mereka itu ialah Eyang Absori yang menurunkan penghulu-penghulu Kuningan, Eyang Dukuh yang membuka pesantren di Tanjungsari - Kuningan, Nyi Mu'minah yang dibawa oleh suaminya Kyai Arif membuka pesantren di Cikaso atas permohonan kepala desa itu. Putra Eyang Dukuh membuka pesantren di Kadugede - Kuningan. Dan para putra Kyai Arif membuka pesantren di Karangmangu, Cilaja, Kalapagunung dan meneruskan pesantren Cikaso. Putra-putra dari putra Kyai Arif yang meneruskan pesantren Cikaso membuka pesantren di Cigadung dan Karangtawang.

Dari pesantren-pesantren tersebut di atas yang terkenal besar pengaruhnya ialah pesantren Lengkong dan Karangtawang. Umpamanya pesantren Karangtawang tatkala dipimpin oleh Eyang Majani menjadi tempat menggodog santri-santri sebelum mereka belajar ke pesantren di Surabaya.

2.2.2.3 Pesantren Asyrofuddin di Conggeang, Sumedang

Pada awalnya pesantren Asyrofuddin tidak direncanakan untuk penyebaran agama Islam. Pesantren tersebut cenderung merupakan reaksi seseorang terhadap politik kolonial Belanda di Cirebon waktu itu (abad ke XVIII). Pendirinya ialah Kyai Asyrofuddin.

Kyai Asyrofuddin adalah Sultan Sepuh dari keraton Kesepuhan. Beliau berada di daerah Sumedang atau tepatnya Conggeang, karena diusir oleh ayahnya, karena tidak sependapat dengan ayahnya dalam hal politik pemerintahan di Cirebon.[39]

Pada suatu waktu[40] Embah Asyrofuddin dipanggil ayahnya, Sultan Sepuh (Raja Jaenuddin, menurut silsilah dari Bapak P.S. Sulendraningrat) untuk diserahi jabatan kesultanan, karena Sultan Sepuh sudah merasa tua. Ketika dicalonkan, Asyrofuddin bersedia diangkat asalkan syarat-syarat yang diajukan kepada ayahnya dikabulkan. Syarat-syarat yang diajukan itu yang terutama ialah bahwa

orang luar (maksudnya Belanda) tidak boleh turut campur dalam urusan pemerintahan di daerah Cirebon. Bagi ayahnya syarat itu terlalu berat, sukar untuk diterima, sebab Sultan Sepuh telah terikat oleh perjanjian kerjasama dengan Belanda tahun 1681. Pada waktu itu di Cirebon pengaruh kekuasaan sangat kuat di Cirebon. Oleh karena itu syarat yang diajukan oleh Asyrofuddin sebagai calon Sultan ditolak oleh Sultan Sepuh. Maka terjadilah konflik antara anak dengan ayah di keraton Cirebon.

Asyrofuddin adalah seorang yang berwatak keras, pemberani dan teguh memegang pendiriannya. Karenanya perselisihan dengan ayahnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai, masing-masing mempertahankan pendiriannya. Akhirnya Asyrofuddin diusir oleh ayahnya dari keraton bahkan dia tidak diperkenankan berada di wilayah Cirebon.

Asyrofuddin pergi dari keraton Cirebon. Mula-mula ia tinggal di kampung Pongpongan, lalu pindah ke Lojikombong. Tetapi karena kedua tempat itu masih termasuk wilayah kesultanan Cirebon, Asyrofuddin pindah lagi ke Cikuleu di Ujungjaya, daerah perbatasan antara wilayah kabupaten Majalengka dengan Sumedang.

Pada waktu itu di Jawa Tengah tengah berkecamuk perang Diponegoro (1825--1830).[41] Besar kemungkinan sikap Asyrofuddin disebabkan karena pengaruh perlawanan yang dilancarkan oleh Pangeran Diponegoro terhadap Belanda itu. Mungkin pula disebabkan terpengaruh atau terbakar hatinya oleh perjuangan Bagus Ranin (1806--1812) yang melawan Belanda dan Sultan di Cirebon yang pro Belanda dengan pusat gerakannya di Jatitujuh, sepuluh kilometer sebelah Timur laut Ujungjaya.

Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah logis. Soalnya Asyrofuddin yang dibesarkan di dalam keraton tentunya mengikuti dan mengetahui perkembangan dan kejadian-kejadian di dalam keraton Kesultanan Cirebon. Dia melihat, memperhatikan, dan merasakan sendiri sikap dan tindakan orang-orang Belanda terhadap sultan-sultan dan rakyat Cirebon. Siapa yang tidak akan sakit hati melihat orang-orang Belanda yang congkak sifatnya, tindakannya keras dan kejam serta politiknya yang memeras rakyat. Sultan-sultan di Cirebon

diadu-dombakan, rakyat ditindak, dan diperas, sedangkan Belanda dengan seenaknya menarik keuntungan materi dari kekuasaan di Cirebon.

Di Cikuleu[42] Asyrofuddin membuka pengajian teruntuk penduduk di sekitarnya. Pengikut pengajian itu makin lama makin banyak. Untuk menampung orang asing, terutama pemuda-pemuda yang akan belajar di sana, maka didirikanlah semacam pondok-pondok untuk tempat tinggal mereka. Sedangkan pengajiannya dilakukan di mesjid. Banyak santri-santri yang datang untuk belajar di situ, terutama mereka yang berasal dari sekitarnya dan dari Sumedang serta Tegalkalong. Dalam pesantren itu selain diajarkan ilmu agama Islam, juga diberikan soal-soal politik dalam rangka menghadapi Belanda.

Sementara itu adanya pesantren di Cikuleu diketahui oleh Bupati Sumedang Pangeran Suria Kusuma Adinata atau Pangeran Sugih (1834--1882), tatkala beliau sedang berkeliling (meronda) daerah tersebut. Selanjutnya Pangeran Sugih mendekati Kyai Asyrofuddin, bahkan putranya Pangeran Suriaatmaja (Pangeran Mekah) dipesantrenkan di sana. Akhirnya atas permintaan Pangeran Sugih dengan alasan untuk mempermudah dan memperdekat tempat belajar putranya, Kyai Asyrofuddin pindah lagi ke Cipicung, Conggeang. Di sini Kyai Asyrofuddin diberi tanah wakaf[43] untuk mendirikan pesantren baru.

Tentang latar belakang terjadinya hubungan rapat antara Pangeran Sugih dengan Kyai Asyrofuddin serta kepindahan Kyai Asyrofuddin ke Cipicung ada beberapa kemungkinan. Di antaranya :

1. Dilihat dari segi jihad penyebaran Islam sangat menguntungkan dan besar pengaruhnya bagi perkembangan agama Islam di daerah Sumedang.
2. Dilihat dari politik Kyai Asyrofuddin, ia ingin memenangkan perjuangannya menghadapi Belanda dengan cara menyusun kekuatan di pedalaman dengan mendapat dukungan dari Bupati Sumedang.
3. Dilihat dari segi politik Pangeran Sugih mungkin untuk membendung perkembangan politik Kyai Asyrofuddin,

mengendalikan mengumpulkan data-data dari kegiatan politik Kyai Asyrofuddin di daerah tersebut, serta untuk menyebarkan agama Islam kepada rakyat Sumedang, Kecuali yang tersebut terakhir, mungkin Pangeran Sugih ingin menjaga agar daerahnya tidak dijadikan arena keributan oleh Kyai Asyrofuddin atau bertindak sebagai pengumpul keterangan untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda.

4. Mungkin pula dalam hal ini Belanda menggunakan taktik tidak langsung dalam menghadapi Kyai Asyrofuddin. Taktik Belanda itu ialah dengan menggunakan Pangeran Sugih sebagai isolator politik kolonialnya dan membendung maksud-maksud Kyai Asyrofuddin.

5. Dan karena Pangeran Sugih[44] tertarik sekali oleh fatwa-fatwa tentang Islam yang diberikan oleh Kyai Asyrofuddin.

Tetapi bagaimanapun juga dari kemungkinan-kemungkinan di atas, kenyataannya ajaran Islam dapat tersebar luas di daerah Sumedang. Mungkin saja semua pihak berusaha untuk mencapai tujuannya masing-masing, tetapi kecuali pihak Belanda, pihak Kyai Asyrofuddin dan Pangeran Sugih kebetulan mempunyai kepentingan yang sama, yaitu sama-sama menghendaki Islam berkembang dan maju di daerah itu. Hal tersebut diperkuat lagi oleh kenyataan[45] bahwa Kyai Asyrofuddin di Cipicung, Conggeang dengan giatnya terus memimpin pesantrennya dan juga mengadakan kegiatan politik menentang peraturan pemerintah Belanda. Yaitu Kyai Asyrofuddin di Cipicung membuka kebun karet, padahal pada masa itu pihak swasta atau perorangan dilarang membuka kebun karet. Pada waktu itu adalah masa tanam paksa yang berlangsung antara tahun 1830--1870.

Sementara itu pesantren di Cikuleu diteruskan oleh putranya yang bernama Abdul Hamid. Ia menikah dengan seorang wanita dari Cikalong, saudara murid ayahnya Embah Kalifah Ambon.[46] Dalam perjalanannya pada tahun dua puluhan ke Mekah, Kyai Abdul Hamid pernah menikah dengan seorang wanita dari Aceh dan memperoleh putra wanita. Buktinya pada tahun dua puluhan datang sepucuk surat dari istrinya yang isinya meminta surat kuasa sebagai wali untuk

menikahkan anaknya. Namun pada waktu itu Kyai Haji Abdul Hamid telah tiada, karena beliau meninggal dunia tatkala ayahnya masih hidup. Dan sekarang makamnya terdapat di kampung Gebang, Ujungjaya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pesantren di Cipicung, Conggeang didirikan oleh Kyai Asyrofuddin. Saat pendiriannya ialah tahun 1847.[47] Adapun tempatnya adalah di atas sebidang tanah yang luasnya 2400 meter persegi, terletak di kampung Cipicung, desa dan kecamatan Conggeang, kabupaten Sumedang. Tanah itu adalah tanah wakaf dari Pangeran Sugih, Bupati Sumedang (1834--1882). Dan sebagaimana telah dikemukakan di atas, pemberian-tanah dan sawah wakaf itu telah dimulai sejak Bupati Sumedang Pangeran Kusumayuda (1828--1833) dengan maksud untuk memajukan agama Islam di daerah tersebut.

Dengan berdirinya pesantren di Cipicung itu, maka daerah tersebut menjadi terkenal dan agak ramai. Santri-santri berdatangan ke sana untuk menuntut ilmu agama. Salah seorang di antaranya ialah Pangeran Suriaatmaja yang kemudian menjadi Bupati Sumedang menggantikan ayahnya pada tahun 1883--1919.

Pada tahun 1876 Kyai Asyrofuddin wafat dan dimakamkan di sebelah utara bangunan pondoknya. Pimpinan pesantren diserahkan kepada cucunya yang bernama Kyai Mas'un.

Kyai Mas'un pada waktu ayahnya (K.H. Abdul Hamid) meninggal dunia masih kecil, lalu dibawa dan dididik oleh kakeknya di Cipicung.

Pesantren ini di bawah pimpinan Kyai Mas'un makin maju dan dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Santri-santrinya tak putus-putusnya berdatangan dari berbagai daerah antara lain dari Sumedang, Cikalong, Darmaraja, dan Indramayu.

Kyai Mas'un disegani dan pengaruhnya cukup besar di kalangan rakyat dan juga terhadap Bupati Sumedang. Buktinya antara lain : tatkala pemilihan Kepala Desa Conggeang, Bupati Sumedang (Pangeran Suriaatmaja) dan semua rakyat Desa Conggeang menyetujui pilihan Kyai Mas'un, sekalipun pada waktu pemungutan suara tidak terjadi demikian.

Pada tahun 1947 Kyai Mas'un meninggal dunia dan dimakamkan di dekat kuburan kakeknya. Kemudian pimpinan pesantren diserahkan kepada putranya, yaitu Kyai R. Ukun Moh. Sholeh.

Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penuturan pesantren Asyrofuddin di atas ialah bahwa pendirian pesantren itu oleh Kyai Asyrofuddin tidak terlepas dari kegiatan politik menentang pemerintah kolonial Belanda. Pesantren itu telah dapat menarik perhatian dan pengaruh Bupati Sumedang, sehingga kondisi dan situasi untuk memajukan Islam di daerah itu baik. Dan yang penting ialah cita-cita Kyai Asyrofuddin untuk memajukan rakyat dengan melalui menyebarluaskan ajaran Islam terus hidup dan diperjuangkan oleh keturunannya. Hal itu terbukti dari cita-cita dan semangat Ketua Pesantren tersebut sekarang. Dan lagi sekarang pesantren tersebut menggunakan nama "Asyrofuddin", dengan maksud mengenangkan jasa pendiri pesantren tersebut dan meneruskan cita-citanya.

Di samping ketiga pesantren tersebut di atas, sebenarnya masih banyak lagi pesantren yang pernah tumbuh dan berkembang di Jawa Barat. tersebar di berbagai daerah. Misalnya pesantren Mulabarak (Sumedang), pesantren Cipasung (Tasikmalaya), pesantren Al-Falak Pagentongan (Bogor), Santri Asromo (Majalengka), Pesantren Gunung Puyuh (Sukabumi). Pesantren Mulabarak didirikan oleh K.H. Muhammad Ali yang terkenal dengan sebutan Embah Ali. Ia pernah belajar di pesantren Demak pada kurun terakhir periode Walisongo. Pada saat didirikan pesantren ini mendapat bantuan penuh dari Bupati Sumedang dan Bupati Limbangan. Santri yang belajar di pesantren ini bukan saja anak-anak rakyat biasa, tetapi juga para putra bangsawan dan ulama di seluruh Pulau Jawa. K.H. Muhammad Ali mengeluarkan "ijazah tahasus" bagi muridnya yang telah selesai mengikuti program pendidikannya.[48]

Catatan

1. M. Said & D. Mansoer. *Mendidik dari Zaman ke Zaman*. Tjetakan ketiga, Djakarta, Dian Rakjat, 1965, hal. 26--27.

2. Jenis Kesenian Sunda, berupa cerita dengan lagu tertentu sambil diiringi petikan kecapi.

3. Atja, *Siksa Kandang Karesian*.- alih aksara, Bandung, Lembaga Kebudayaan Universitas Padjadjaran, 1973. hat. 2, 41--21

4. Sartono Kartodirdjo, "Struktur Sosial dari masjarakat tradisionil dan kolonial", *Lembaran Sejarah*, 4, Desember 1969, hal. 9

5. Atja. *Tjarita Parahijangan*, Bandung, Jajasan Kebudayaan Nusalarang, 1968, hat. 17--18, 20--21, 43, 46.

6. C.M. Pleyte, "De Patapaan Adjar Socka Resi. ouders gezcgd de Kluizenarij op den Goenoeng Padang", *TBG*, LV, 1913. hal. 231--428.

7. Atja, *Tjarita Ratu Pakuan*, Bandung, Lembaga Bahasa dan Sejarah, 1970, hal. 20--22. J. Noorduyn, "Traces of and old Sundanese Pamajana Tradition", *Indonesia*, 12. Cornell Modern Indonesia Project, hal. 151--157.

8. Atja, 1968. *op. cit.*, hat. 28--53

9. *Ibid*., hal 31,55

10. *Ibid*., hal 33, 57

11. *Loc. cit*

12. Penilaian atas naskah ini sebagai Ensiklopedi Sunda diberikan oleh Suhamir.

13. J.Noorduyn, *op.cit.*, hal. 151--157.

14. Keempat cerita pantun tersebut sudah tidak hidup lagi dewasa ini dan isi ceritanya tidak diketahui.

15. Keempat cerita pantun tersebut sampai kini masih hidup dan telah dicatat serta diterbitkan oleh Proyek Pantun dan Folklor Sunda di Bandung dipimpin oleh Ajip Rosidi.

16. Atja, 1973, *op.cit*, hal. 16.

17. Moh. Anijr Sutaarga, *op. cit.*, hal.

18. H.A. Dasuki, *Purwaka Ciruban Nagari*, Indramayu, Sudiwo, 1978, hal.18, 28.

19. *Ibid.*, hal. 20--22.

20. Teguh Asmar dkk., *op. cit.*, hal 102.

21. E Kosim dkk, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Jawa Barat Khususnya di Cirebon dan Pamijahan*, Laporan Penelitian, Bandung, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 1974, hal. 90--142.

22. Tudjimah; Seh Yusuf Makasar 1626--1699, Prasaran pada Seminar Sejarah Nasional-II, Yogjakarta, 1970. Edi S. Ekadjati, Babad Cirebon, Edisi grandes, Tinjauan Sastra dan Sejarah, Bandung, Fakultas Sastra UNPAD, 1978, hal. 49. Uka Tjandrasasmita, *op.cit.*, hal. 46--50.

23. Sudjoko Prasodjo dkk, Profil Pesantren, Jakarta, LP3ES, 1974, hal. 7.

24. A. Zacni Hasan, Sekilas Lintas Sejarah Pesantren Buntet Tjirebon, Tjirebon, LPI Buntet, 1970, hal. 16.

25. *Ibid.*, hal. 20--21.

26. *Ibid.*, hal. 24. Pangeran Muhammad Khaeruddin II identik dengan Raja Kanoman.

27. F.W. Stapel, *Geschiedenis van Nederlandsch - Indie*, V, Amsterdam, Joost van den Vondel, 1940, hal. 24.

28. Zaeni Hassan, *op. cit.*, hal. 24.

29. F.W. Stapel, *op.cit.*, hal. 25.

30. A. Zaeni Hassan, *op. cit.*, hal. 25.

31. F,W. Stapel, *op. cit.*, hal. 42.

32. Suatu bangunan bergaya Cina. Bangunan tersebut kini sedang dipugar, terletak di kota Cirebon sebelah selatan.

33. A. Zaeni Hasan, *op.cit.*, hal. 59.

34. Wawancara dengan Bapak Kiai Moh. Abdullah. di Kuningan, tanggal 17 September 1980. Beliau adalah cicit dari Kiai Asyrofuddin.

35. *Ibid.*

36. *Ibid*

37. *Ibid*

38. *Ibid*

39. Wawancara dengan Bapak Kiai Ukasah, di Sumedang, 17 September 1980. Beliau adalah cicit dari Kiai Asyrofuddin.

40. Wawancara dengan Bapak Dudu Surawinata, di Sumedang, 18 September 1980.

41. *Ibid.*

42. Wawancara dengan Bapak Kiai Ukasah, di Sumedang, 27 September 1980.

43. Menurut Bapak Dudu Surawinata, status tanah itu adalah milik gubernemen yang diberikan kepada Kiai Asyrofuddin. Sekarang tanah tersebut telah menjadi milik E. Endang Bukhari, pimpinan pesantren Asyrofuddin.

44. Keterangan Bapak Haji Said Raksakustimah (alm.) pada tanggal 4 Januari 1970.

45. Wawancara dengan Bapak Dudu Surawinata, di Sumedang, 18 September 1980.

46. *Ibid.* Penanaman Kalifah Ambon, karena beliau pernah dibuang ke Ambon oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda atas desakan Penghulu Sumedang.

47. R.E. Buchori, "*Risalah Riwayat Singkat Berdirinya Pesantren Asyrofuddin* ", (ketikan), 14 Januari 1970.

48. Marwan Saridjo dkk., *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia, Jakarta,* Dharma Bhakti, 1979, hal. 37--38.

BAB III

PENDIDIKAN BARAT ABAD KE-19 DI JAWA BARAT

3.1 Pendidikan Pada Masa Peralihan (1800--1816)

Dalam abad ke-18 daerah kekuasaan Kompeni di Indonesia, terutama di Pulau Jawa makin luas, perdagangan makin besar jumlahnya dan kewajibanpun makin berat pula. Untuk keperluan usahanya itu. Kompeni sangat membutuhkan bantuan tenaga rakyat Indonesia yang terdidik. Faktor inilah yang mendorong Kompeni untuk merencanakan pembukaan sekolah-sekolah.[1] Rencana tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan oleh Kompeni, karena VOC terpaksa bubar dan kekuasaan di Indonesia diambilalih oleh Pemerintah Belanda dengan pemerintahan Hindia Belandanya.

Pemerintah Hindia Belanda juga merasakan akan kebutuhan tenaga kerja yang terdidik, sehingga timbul pikiran untuk mengadakan pengajaran bagi rakyat umum di Indonesia. Timbulnya gagasan tersebut disebabkan pula oleh dorongan faham Aufklarung yang menghendaki rakyat umum harus dimajukan.[2] Akan tetapi gagasan itu tidak dapat segera dilaksanakan, terutama karena pecahnya Revolusi Prancis.

Revolusi Prancis yang meletus pada tahun 1789, kemudian menjalar hampir ke seluruh benua Eropa. Akibatnya beberapa negara

Eropa, termasuk Negeri Belanda jatuh ke dalam kekuasaan Prancis (Napoleon Bonaparte). Di Negeri Belanda, Napoleon Bonaparte menempatkan saudaranya, Louis (Lodewijk) Napoleon sebagai raja.

Salah satu akibat daripada Revolusi Prancis adalah terjadinya perubahan dalam bidang sosial, diantaranya bidang pendidikan dan pengajaran. Hal ini disebabkan Napoleon sangat memperhatikan bidang tersebut. Pendidikan dan pengajaran yang dalam pemerintahan lama *(ancien regime)* dapat dikatakan hanya terdapat di kalangan atas, oleh Napoleon diubah dan pendidikan dijadikan tanggungan pemerintah. Pendidikan dan pengajaran rendah, menengah, dan tinggi, disusun dan disentralisir. Dengan demikian, pendidikan dan pengajaran tidak lagi merupakan monopoli golongan atas saja.[3]

Pengaruh Revolusi Prancis dalam bidang pendidikan sampai pula ke Indonesia. Hal ini terjadi mulai tahun 1808. Pada tahun 1807 Raja Belanda, Louis Napoleon mengangkat Daendels menjadi Gubernur Jenderal untuk berkuasa di Indonesia. Tahun berikutnya Daendels berangkat ke Indonesia dengan perintah antara lain melenyapkan perbudakan.[4]

Sejarah telah membuktikan bahwa usaha Daendels dalam melaksanakan perintah tersebut tidak berhasil, bahkan ia telah mengadakan peraturan baru, yaitu rodi (kerja paksa) yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Pulau Jawa pada khususnya.

Namun demikian, dalam bidang pendidikan Daendels berusaha untuk melaksanakan konsepsi Napoleon Bonaparte. Selaku pengikut aliran Aufklarlung. Dandels menyatakan bahwa pengajaran harus diselenggarakan kepada anak-anak Barat, agar mereka mengenal kesusilaan, adat-istiadat, hukum, dan pengertian keagamaan orang Jawa[5](Indonesia).

Atas dasar itu, Daendels berusaha untu mengadakan pembaharuan di bidang pendidikan sebagai berikut :

1. Pendidikan berdasarkan agama Kristen (terikat dengan gereja) ditinggalkan.[6]
2. Sesuai dengan orientasi Daendels yang berkisar pada masalah pertahanan dan strategi militer, maka pada tahun 1806 (sic.)

dibuka sekolah pertama, yaitu Sekolah Artileri di Meester Cornelis (Jatinegara).[7]

3. Pada tahun 1808 Daendels memerintahkan kepada para bupati di Jawa untuk mendirikan sekolah-sekolah di tiap-tiap distrik, yang memberikan pendidikan berdasarkan adat-istidat, undang-undang, dan pokok-pokok pengertian keagamaan (Islam).[8] Perintah tersebut ternyata tidak sempat dilaksanakan, sebab tiga tahun kemudian (1811), masa pemerintahan Daendels berakhir karena kekuasaan di Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris (Raffles). Namun demikian, perintah Daendels itu mengandung arti penting, yaitu pemerintah untuk pertamakalinya mengakui bahwa pemberian pengajaran kepada rakyat adalah tugas dan kewajiban pemerintah, dan pengajaran itu tidak terbatas kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja melainkan merata di semua lapisan masyarakat.[9] Pada tahun 1808 itu juga, Daendels mendirikan sebuah Sekolah Angkatan Laut di Semarang.[10]

4. Pada tahun 1809, untuk pertamakalinya diselenggarakan pendidikan bidan sebagai bagian dari usaha pemeliharaan kesehatan rakyat. Pengajarnya adalah para dokter yang berada di Batavia (Jakarta), dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu.[11]

5. Dengan dalih untuk "memajukan seni tari rakyat", pada tahun yang sama (1809) Daendels memerintahkan kepada bekas Sultan Cirebon agar di Cirebon didirikan tiga buah sekolah dari gadis (ronggeng), yang berada di bawah tanggungan sultan. Pendidikan di sekolah ini terutama diberikan kepada anak-anak perempuan dari keluarga tidak mampu. Oleh karena itu uang sekolah tidak dipungut kecuali dari anak-anak orang kaya. Lama berlajar 4 tahun. Pelajaran yang diberikan adalah menari, menyanyi, membaca, dan menulis. Pada hakekatnya sekolah ini lebih merupakan usaha untuk mendemoralisasikan pemuda/pemudi Indonesia, karena memang tujuan utamanya adalah untuk menjauhkan semangat heroisme dan patriotisme rakyat Indonesia, sehingga mereka tidak menaruh perhatian terhadap agitasi politik.[12]

Pembaharuan dalam bidang pendidikan tersebut di atas, dalam pelaksanaannya ternyata banyak mengalami kegagalan. Hal ini terutama disebabkan tidak adanya biaya khusus untuk pembinaan pendidikan dan pengajaran dan terjadinya peralihan pemerintahan ke tangan Inggris (1811--1816) yang diwakili oleh Letnan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles.[13]

Demikianlah, mulai tahun 1811 Raffles memegang kekuasaan di Pulau Jawa. Sikap dan tindakan Raffles dalam menjalankan pemerintahannya adalah kebalikan Daendels. Dalam bidang "ekononi" Raffles berusaha memperingan nasib rakyat. Hal-hal yang memberatkan rakyat, seperti pekerjaan rodi ciptaan Daendels dihapuskan dan diganti dengan kewajiban membayar pajak. Demikian pula perbudakan diusahakan untuk dihilangkan.[14] Sebaliknya masalah pendidikan dan pengajaran rakyat diabaikan. Tetapi perkembangan ilmu pengetahuan mendapat perhatian besar dari Raffles, terbukti disusunnya buku *History of Java.*[15]

Karena Raflles tidak memperhatikan bidang pendidikan, maka sekolah-sekolah yang didirikan pada masa pemerintahan Daendels keadaannya sangat menyedihkan, bahkan pada masa akhir pemerintahannya (1816), sekolah-sekolah itu hampir tidak ada lagi.[16]

Setelah Indonesia diambilalih kembali oleh pihak Belanda, barulah ada usaha untuk melanjutkan usaha yang telah dirintis sebelumnya.

Sampai sejauhmana pendidikan, baik untuk penduduk golongan Eropa maupun penduduk golongan Bumiputra dapat dilaksanakan dan dikembangkan di Jawa Barat pada abad ke 19, akan terlihat dari jenis sekolah, sistem, dan tingkatan pendidikan pada waktu itu, dalam uraian di bawah ini.

3.2 Pendidikan Untuk Penduduk Golongan Eropa

3.2.1 Pendidikan Dasar (ELS)

Sejak tahun 1816 kekuasaan atas Pulau Jawa kembali ke tangan Belanda. Kali ini pemerintahan diwakili oleh Komisaris Jenderal

Elout, Suykes, dan Van der Cappellen (1816--1819), kemudian Gubernur Jender Van der Cappellen (1819--1826), Komisaris Jenderal Du Bus de Gisiginies (1826--1830)[17], dan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Para penguasa tersebut pada dasarnya berkeinginan untuk melanjutkan usaha Daendels dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini penyelenggaraan sekolah-sekolah mereka serahkan kepada C.G.C. Reinwardt (terkenal sebagai pendiri Kebun Raya Bogor).[18]

Usaha pertama dari Reinwardt ialah menyusun undang-undang pendidikan dan pengajaran yang memuat peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan umum mengenai persekolahan, pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah Peraturan ini kemudian dikuatkan menjadi Peraturan Pemeritah yang dikeluarkan tahun 1818. Peraturan itu sama sekali tidak menyinggung tentang pendidikan untuk anak-anak bumi putra.[19]

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka pada tanggal 24 Pebruari 1817 di Jakarta dibuka sekolah pertama untuk anak-anak Eropa, yaitu *Europeesche Lagere School (ELS)*. Sekolah ini mencontoh sekolah dasar yang ada di Negeri Belanda.[20]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1818 yang menitikberatkan penyelenggaraan sekolah-sekolah rendah bagi anak-anak Belanda, maka pada tahun 1820 sekolah jenis ELS dikembangkan menjadi 7 buah, yaitu 2 buah di Jakarta (di Weltevreden dan Molenvliet) dan masing-masing 1 buah di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Gersik[21]. Di sekolah dasar itu diberikan pelajaran menulis, membaca, berhitung, bahasa Belanda, sejarah, dan ilmu bumi.[22] Setelah pendidikan dasar tersebut berlangsung selama kurang-lebih 9 tahun, pada tahun 1826 kegiatan pendidikan dan pengajaran terganggu oleh usaha-usaha penghematan yang dilakukan oleh pemerintah (Komisaris Jenderal Du Bus de Gisignes), sehingga urusan pendidikan dan pengajaran sangat disederhanakan.[23]

Sementara itu pada tahun 1830 kekuasaan di Indonesia beralih ke tangan Gubernur Jenderal Van den Bosch, "bapak" Cultuurstelsel atau Tanam Paksa. Untuk kelancaran pelaksanaan Cultuurstelsel, Van den Bosch sangat membutuhkan tenaga pekerja yang terdidik. Oleh karena itu bidang pendidikan, baik untuk golongan Eropa maupun

untuk golongan Bumiputra ditingkatkan. Demikianlah pada tahun 1833 jumlah sekolah dasar dikembangkan menjadi 19 buah, tahun 1845 menjadi 25 buah, tahun 1858 menjadi 57 buah, tahun 1895 menjadi 159 buah, kemudian tahun 1902 meningkat lagi menjadi 173 buah.[24]

3.2.2 Pendidikan Menengah dan Lanjutan

Sekitar pertengahan abad ke-19 jumlah sekolah dasar semakin meningkat, sehingga sebagian besar anak-anak Eropa sudah memperoleh pendidikan dasar. Pemerintah Hindia Belanda berkali-kali mengajukan usul kepada Kerajaan Belanda untuk mendirikan sekolah lanjutan bagi anak-anak golongan Eropa, khususnya Belanda. Akan tetapi sampai pertengahan abad ke-19 usaha tersebut selalu mengalami kegagalan.

Setelah mengalami proses yang berlarut-larut, akhirnya Raja Belanda, Willem III memberikan kuasa kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan suatu *Gymnasium* (Sekolah Menengah.), dengan catatan agar nama raja dipakai sebagai nama sekolah tersebut.[25]

Dengan wewenang dari Raja Belanda itu, maka pada tahun 1860 di Jakarta dibuka *Gymnasium* Willem III yang merupakan sekolah lanjutan (menengah) pertama untuk anak-anak golongan Eropa, dengan lama belajar 3 tahun.[26]

Pada tahun 1867 sekolah tersebut dibagi menjadi dua bagian (afdeeling). Bagian A dengan lama belajar 5 tahun dan selanjutnya dapat meneruskan ke perguruan tinggi. Bagian B dengan lama belajar 3 tahun, kemudian dapat melanjutkan ke pendidikan perwira, pendidikan pegawai negeri atau akademi perdagangan dan kerajinan di Delf, Negeri Belanda.

Selanjutnya bidang pendidikan dan pengajaran semakin dikembangkan sehingga *gymnasium* tersebut akhirnya diubah menjadi *Hogere Burgerschool (HBS)*, dengan lama belajar 5 tahun.[27]

3.3. Pendidikan Untuk Golongan Bumiputra

Tujuan utama Pemerintah Hindia Belanda memberikan pendidikan kepada golongan Bumiputra adalah untuk mendapatkan tenaga terdidik dengan biaya murah. Sebab bila pegawai untuk administrasi pemerintahan ataupun pekerja bawahan harus didatangkan dari Negeri Belanda, sudah tentu memerlukan biaya yang besar.

Van den Bosch selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu (1829/30-1834) merasakan bahwa tanpa bantuan penduduk Bumiputra yang terdidik, maka pembangunan ekonomi di Hindia Belanda (Indonesia) yang menjadi tugas utama Van den Bosch tidak akan berhasil.[28] Untuk maksud tersebut, maka dibukalah pendidikan untuk golongan Bumiputra, agar pelaksanaan Cultuurstelsel (Tanam Paksa) mendatangkan keuntungan besar sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi Negeri Belanda.

Pendidikan untuk golongan Bumiputra dilaksanakan melalui sekolah, mulai sekolah dasar sampai dengan sekolah/perguruan tinggi.

3.3.1 Sekolah Dasar Negeri

Sebagai langkah pertama dalam melaksanakan tujuan tersebut di atas, pada tahun 1831 Van den Bosch mengedarkan angket tentang pendirian sekolah dasar negeri di tiap-tiap keresidenan atas biaya "Persekutuan Injil" (Bijbelgenootschap). Akan tetapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena tanggapan terhadap angket itu bertentangan dengan pokok kebijaksanaan pemerintah Belanda yang ingin bersikap netral dalam bidang yang menyangkut agama.[29]

Setelah melalui prosedur dan pembicaraan yang berlarut-larut, akhirnya keluarlah Keputusan Raja Belanda no. 95 tanggal 30 September 1848 yang memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk menyediakan dana sebesar 25.000 gulden per tahun guna pendirian sekolah Bumiputra di Pulau Jawa, dengan tujuan utama mendidik calon-calon pegawai negeri.[30]

Atas dasar wewenang tersebut, maka sebagai langkah pertama didirikanlah 20 buah sekolah dasar negeri, masing-masing satu buah sekolah di tiap ibukota keresidenan.[31] Berhubung Tanam Paksa terutama dilaksanakan di Pulau Jawa, dalam hal ini, Jawa Barat sebagai pusat pemerintahan mendapat prioritas pertama.[32] Pada waktu itu Jawa Barat terdiri atas 5 keresidenan, yaitu Banten, Batavia (Jakarta). Karawang, Priangan, dan Cirebon.[33] Dengan demikian, pada waktu itu di Jawa Barat terdapat 5 buah sekolah dasar negeri, yaitu di Serang, Jakarta, Karawang, Bandung, dan Cirebon.

Pendirian sekolah tersebut dalam prakteknya ternyata yang diutamakan adalah mendirikan sekolah untuk anak-anak Belanda, sedangkan sekolah untuk anak-anak Bumiputra dinomorduakan. Hal ini berlangsung sampai petengahan abad ke-19 (tahun 1860-an). Selanjutnya pemerintah mulai menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah pendidikan, dan menyadari ketinggalan yang perlu dikejar. Pengajaran direncanakan tidak hanya mencakup golongan pegawai Bumiputra, tetapi juga rakyat umum. Dalam hal ini, metode pengajarannya dipikirkan pula, dengan mengingat, pertama, golongan Bumiputra di Jawa yang telah mendapat pengajaran pertama masih sangat kecil jumlahnya, perimbangan kasarnya adalah satu dalam 500 penduduk. Kedua, pendidikan Bumiputra pada pelaksanaannya terhambat oleh dana yang kecil, bahkan dana tersebut dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa pos pendidikan. Ketiga, gerakan pendidikan untuk masyarakat Indonesia usianya masih muda.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, pemerintah kemudian mendirikan sebuah departemen khusus untuk menangani masalah pendidikan, agama, dan industri. Dengan adanya departemen tersebut, maka sekolah dasar untuk Bumiputra menjadi berimbang. Pada tahun 1864 sekolah tersebut meningkat jumlahnya menjadi 186 buah, dan pada tahun 1882 menjadi 512 buah, tersebar di seluruh Hindia Belanda. Dana sekolah pun meningkat dari 25.000 gulden (tahun 1848) menjadi 400.000 gulden (tahun 1883) untuk Pulau jawa saja. Pada tahun 1893 terjadi reorganisasi pada pendidikan dasar yang berlandaskan pada Keputusan Raja tanggal 28 September 1892 (dimuat dalam Lembaran Negara nomor 125 tahun 1893).

Sekolah Dasar Bumiputra dibagi menjadi dua kategori yaitu :

3.3.1.1 Sekolah Dasar Kelas Satu (De Scholen der Eerste Klasse)

Sekolah ini didirikan di ibukota keresidenan, kabupaten, kewedanaan atau yang sederajat, dan di kota-kota yang menjadi pusat perdagangan dan kerajinan, atau di tempat-tempat yang dipandang perlu untuk memiliki sekolah ini. Murid-murid yang dapat diterima di sekolah ini adalah anak-anak golongan masyarakat atas, seperti anak-anak bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka, dan orang-orang Bumiputra yang terhormat. Hal ini disebabkan anak sekolah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, perdagangan, dan perusahaan. Lama belajar pada Sekolah Kelas Satu adalah 3 tahun, dengan bahasa pengantar mula-mula bahasa Melayu dan daerah, tetapi kemudian secara berangsur-angsur diubah menjadi bahasa Belanda (tahun 1914).

3.3.1.2 Sekolah Dasar Kelas Dua (De Scholen der Tweede Klasse)

Sekolah ini dibuka dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat umum. Dengan kata lain, sekolah tersebut disediakan bagi anak-anak Bumiputra, dengan tujuan untuk mendidik calon-calon pegawai rendah.

Perbedaan antara Sekolah Kelas Satu dengan Sekolah Kelas Dua terletak pada lama belajar, kurikulum, tenaga pengajar, dan uang sekolah.[39] Lama belajar pada Sekolah Kelas Dua adalah 5 tahun. Sekolah ini didirikan di distrik-distrik atau kewedanaan-kewedanaan sehingga disebut juga Sekolah Distrik.

Sekolah Kelas Satu kemudian berkembang menjadi HIS (Hollandsch Inlandsche School). Di daerah Jawa Barat, sekolah ini disebut juga "Sakola Walanda". HIS dibuka bukan karena direncanakan oleh pemerintah, melainkan atas desakan masyarakat Indonesia, khususnya golongan masyarakat atas. Hal ini disebabkan Sekolah Kelas Satu terbukti tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pelajaran. Meningat hal itu, maka Budi Utomo mendesak agar pemerintah mengdirikan sekolah corak baru seperti yang telah diadakan untuk anak Cina, yaitu HCS (Hollandsch Chincesche School). Selain itu masyarakat meminta agar kesempatan masuk

sekolah Belanda diperluas, sebab ujian Klein Ambtenaar terbukti terlalu sukar untuk anak-anak Sekolah Kelas Satu. Keinginan masyarakat seperti tersebut di atas akhirnya dipenuhi oleh pemerintah dengan mengubah peraturan masuk sekolah Belanda (1911) dan dibukanya HIS pada tahun 1914, sebagai penjelmaan dari Sekolah Kelas satu.

3.3.2 Sekolah Raja (Hoofdenschool)

Hoofdenschool atau dalam bahasa sehari-hari biasa disebut "Sekolah Raja" mula-mula didirikan di Tondano pada tahun 1865 dan tahun 1872. Sekolah ini disediakan bagi anak-anak dari orang-orang Bumiputra yang menjadi kepala daerah dan tokoh-tokoh golongan Bumiputra lainnya. Setelah percobaan di Tondano berhasil, maka pada tahun 1878 Sekolah Raja didirikan lagi di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Sekolah ini merupakan lanjutan umum dengan tujuan mendidik calon-calon pegawai Bumiputra. Oleh karena itu, setelah percobaan pendirian sekolah di kota-kota tersebut di atas berjalan lancar, maka pada tahun 1900, Sekolah Raja berganti nama menjadi OSVIA (Opleidingschool voor Inalndsche Ambtenaren = Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputra). Selanjutnya sekolah ini ditingkatkan menjadi sekolah menengah dengan nama MOSVIA.

3.3.3 Sekolah Lanjutan

Pada abad ke-19 pemerintah belum mengadakan pendidikan menengah umum. Pendidikan menengah dan tinggi baru dimulai pada abad ke-20. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan untuk golongan Bumiputra yang diselenggarakan oleh pemerintah masih terbatas kepada sekolah-sekolah yang dapat menunjang kepentingan penjajah.

3.4 Pendidikan Kejuruan

3.4.1 Sekolah Pertukangan (Ambachtsschool)

Sekolah kejuruan pertama kali dibuka atas prakarsa pihak swasta, yaitu Sekolah Pertukangan pada tahun 1856 di Batutulis, Jakarta.

Sekolah ini merupakan sekolah Kristen dan lebih bercorak sekolah dasar dengan ciri-ciri pertukangan. Murid-muridnya berusia 6--15 tahun. Tujuan dibukanya sekolah tersebut ialah untuk membantu golongan peranakan Indo - Belanda agar dapat mencari penghidupan yang layak. Ternyata sekolah ini hanya dapat bertahan sampai tahun 1873.

Setelah pihak swasta (Zending) merintis pembukaan sekolah pertukangan, empat tahun kemudian Pemerintah membuka sekolah pertukangan di Surabaya (1860). Akan tetapi sekolah pertukangan milik pemerintah inipun mengalami nasib yang sama seperti sekolah pertukangan swasta, yaitu tidak dapat bertahan lama. Hal ini mungkin disebabkan sedikitnya biaya pengelolaan sekolah atau kurangnya animo daripada murid-murid.

Namun demikian, golongan peranakan Indo - Belanda tidak putus asa. Mereka kemudian membuka lagi sekolah pertukangan di Jakarta pada tahun 1886. Tetapi ternyata sekolah itu tidak berjalan lancar, walaupun kepada murid-murid diberikan uang harian dari subsidi pemerintah.

Demikianlah, sekolah pertukangan di Jawa Barat hanya dibuka di Jakarta, tetapi selalu mengalami kegagalan. Lain halnya dengan di luar Jawa Barat, seperti di Jawa Timur (Surabaya) dan di Sulawesi (Tawangko, Minahasa). Ketika industri gula di Jawa Timur berkembang dengan pesat, dirasakan sekali kebutuhan akan tenaga tukang yang terdidik. Mengingat hal itu, maka pada tahun 1877 dibuka kursus pertukangan malam hari yang dikaitkan dengan HBS di Surabaya. Mula-mula kursus ini lamanya 2 tahun. Pada tahun 1885 lama kursus diperpanjang menjadi 3 tahun dan dilepaskan dari HBS sehingga menjadi sekolah yang berdiri sendiri. Sesudah diadakan reorganisasi pada tahun 1894. Lama belajarnya diperpanjang lagi menjadi 4 tahun dan diarahkan untuk dapat mengikuti ujian akhir dalam jurusan pengairan, pekerjaan umum, kadaster (pengukuran tanah), dan mesin. Sekolah ini mula-mula hanya disediakan bagi anak-anak Eropa, tetapi kemudian anak-anak Bumiputra pun diperkenankan untuk memasukinya.

Sebenarnya, sebelum sekolah pertukangan tersebut dibuka, bagi anak-anak serdadu Indo - Belanda telah didirikan semacam sekolah

pertukangan yang diarahkan untuk keperluan militer. Pada tahun 1854 di Kedungkebo (Gombong) telah dibuka "Pupillenkorps" untuk mendidik anak-anak ke arah fungsi teknis militer praktis dan dilatih di bengkel-bengkel senjata agar mereka menguasai masalah persenjataan. Sekolah ini berlangsung sampai tahun 1912. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pendidikan Barat yang diselenggarakan di Hindia Belanda (Indonesia) pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu memperkuat dominasi Belanda di tanah jajahannya.

Perlu disebutkan di sini bahwa sekolah pertukangan pertama untuk golongan Bumiputra juga dibuka oleh pihak swasta (Zending) di Tanawangko (Minahasa) pada tahun 1881. Dalam pelaksanaannya sekolah tersebut dikaitkan dengan Sekolah Pendidikan Guru (Kweekschool) dan memberikan pelajaran menganyam, pertukangan kayu, seni ukir, dan lain-lain.

3.4.2 Sekolah Pendidikan Guru atau Hollandsch - Inlandsche Kweekschool (HIK).

Sekolah pendidikan guru (Kweekschool) dibuka dengan maksud sebagai persiapan untuk pendidikan sekolah-sekolah Bumiputra. Pembukaan sekolah pendidikan guru ini pertamakali diusahakan oleh pihak swasta (Zending) di Ambon pada tahun 1834. Sedangkan di Pulau Jawa, HIK pertamakali didirikan oleh pemerintah di Surakarta pada tahun 1852.

Setelah HIK Surakarta berjalan sampai dengan tahun 1866, jumlah muridnya meningkat dengan sangat pesat sehingga tidak dapat ditampung lagi. Mengingat hal itu, maka pada tahun 1866 itu juga di Bandung dibuka sebuah HIK. Murid pertamanya berjumlah 27 orang, diantaranya pindahan dari HIK Surakarta.

Semula bahasa pengantar pada HIK adalah bahasa Melayu, tetapi setelah bahasa Belanda pada tahun 1865 diajarkan, maka sejak tahun 1871 bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar.

Di daerah Priangan (Jawa Barat), HIK biasa disebut juga "Sekola Raja". Dengan adanya HIK di Jawa Barat, yaitu di Bandung, maka pendidikan Bumiputra di Jawa Barat dapat berkembang karena

adanya tenaga guru untuk mengajar, baik di sekolah pemerintah maupun di sekolah swasta; misalnya di HIS, termasuk HIS Pasundan.

Gambaran umum dan tingkat pengetahuan HIK, khususnya HIK Bandung, antara lain dapat terlihat dari kurikulum HIK Bandung, sebagai berikut :

	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Bhs. Sunda (Membaca)	2	2	3
2.	Bhs. Melayu (memban huruf Latin)	2	2	4
3.	Bhs. Melayu (membaca huruf Arab)	2	2	4
4.	Menulis (huruf Latin)	2	2	2
5.	Menulis huruf Sunda	2	2	4
6.	Menulis huruf Melayu (Arab)	1	1	2
7.	Tembang Sunda	1	1	-
8.	Bahasa Belanda	4	4	3
9.	Aljabar	2	-	-
10.	Berhitung	2	4	4
11.	Ilmu Bumi	2	2	2
12.	Sejarah	1	1	1
13.	Seni Suara	2	2	2
14.	Ilmu Alam	2	2	-
15.	Ilmu Ukur Tanah	4	4	-
16.	Menggambar (tangan)	3	3	3
		34	34	34

Dengan kurikulum tersebut, HIK Bandung berkembang cukup pesat sehingga sampai dengan tahun 1941 dapat mengeluarkan 70 angkatan guru-guru Bumiputra, khususnya guru-guru orang Sunda.

Dengan adanya guru-guru lulusan HIK Bandung itu, maka pendidikan Bumiputra di Jawa Barat sejak pertengahan abad ke-19 telah mengalami kemajuan. Dengan kata lain, HIK Bandung yang didirikan oleh tokoh-tokoh pendidikan, diantaranya K.F. Holle dan Moehammad Moesa, merupakan "persemaian" guru-guru dengan hasil yang memuaskan, karena telah menghasilkan tenaga-tenaga yang

cukup memadai sebagai pendidik bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari sambutan J. Mreyen, Direktur HCK Jatinegara dan Poeradiredja dalam rangka peringatan ulang tahun ke-75 HIK Bandung, sebagai berikut :

J. Mreyen
Directeur der H.C.K., Mr. Cornelis

Drie Kwart Eeuw

Een paar geslachten lang leerkracten geschonken aan dit land :

Als er een jubileum is, dat tot peizen noopt, dan is het wel dat der HOOLANDSCH - INDLANDSCHE KWEEKSCHOOL te Bandung.

Niemand, die de grote heilzame involedkan peilen, in zulk een lange reeks van jaren op de bevolking uitgoefend, uitgaande van een enkele inrichting van onderwijs!

Kweekschool voor onderwijs!

Daar worden de karakters van de opvoeders van het volk grontendeels gevormd. Daar wordt de kennis vergaart, die nodig is vooe een juiste vervulling van de waarlijk grootse taak, die een opvoeder wacht.

Allerlei nieuwe problemen, die zich actereenvolgens voordoen op het gabied van opveosing en onderwijs, worden aan de kweekschool oncerzocht. Nieuwe ideen worden op hun waarde getoetst; het verkeerde wordt verworpen, het goede wordt doogegeven aan het niuwe geslacht.
Dat de kweekschool hierbij bedachtaxaamheid betract, kan niet anders dan heilzaam zijn voor het gehele oncerwijs. Overhaasting zou zeker de noodlottigste gevolgen hebgen.

Moge het de HIK te Bandung gegeven zijn nog velejaren aan haar verheven taak te 'werken: haar discipelen op te voeden tot mannen, die een zegen zullen zijn voor hun folk. De H.I.K. leve, groeie en bloeie!

Pernyataan Poeradiredja adalah sebagai berikut:

Poeradiredja

GURU+)

Bisi guru tanpa puhun,
puhun nangtung di kaweruh bisi
guru tanpa seler, seler'rendekeh
ku maneh
bisi guru tanpa sangkan,
sangkan jangkar pamelaran.

"Sakola Raja" umurna 75 tahun.

"Sakola Raja" pawinian guru-guru Pribumi, babakuna baheula mah pawinian guru-guru urang Sunda, ayeuna bade dipestakeun, dumeh parantos umurna 75 tahun. Nya geus lami alam Tuan Holle, Juragan Muhammad Musa cacakar di Bandung teh.

Umur 75 tahun, tegesna parantos 75 tahun lamina "Sakola Rijia" jadi sumber papadang ati urang Sunda. jembarna urang Indonesia: hartos, na parantos kirang-langkung tujuh puluh kali ngaluarkeun guru-guru, nu kapapancenan kedah ngoboran atina Rayat Pasundan, nya eta nyebarkeun kanyaho ka urang Pribumi. Tujuh puluh abrulan guru-guru marawa obor kanyaho, keur ngoboran atina barudak Pribumi bari ngahurungkeun bakat-bakat nu sarae, disina mekar ngajembaran, dipalar engke di ahir barudak Sunda tiasa jaradi jelema nu mangpaat ka pakumbuhan, ka nusa sareng ka bangsa, jembarna ka kamanusaan.

Papancen guru: "nyaangan hate murid". Papancen mulya kabina-bina. Sanes cek jisim kuring bae, sanes pamendak jelema jaman ayeuna bae eta kitu teh, nanging pamendak Ratu Agung jaman baheula oge sami bae. Anggapan Raja Iskandar Zulkarnaen ka guruna Aristoteles, dawuhanana : bapa ngabahanan gelar, guru ngabahanan budi luhung.+)

Teks asli ditulis dalam ejaan lama (u = Oe)

Perlu dikemukakan di sini bahwa sekolah pendidikan guru untuk golongan Eropa diserahkan kepada pihak swasta, dan pemerintah tidak

banyak campur tangan dalam pelaksanaannya. Pada akhir abad ke-19 pemerintah hanya membuka kursus pendidikan guru (malam hari) di Jakarta (1871). Hal ini menunjukkan bahwa sejak itu pendidikan Bumiputra telah mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah. Keadaan seperti itu terus berlangsung, lebih-lebih setelah pemerintah melaksanakan Politik Etis yang dimulai pada awal abad ke-20.

Catatan

1. *Pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman*. Jakarta, Dep. PK, BP3K.1979, hal. 41, 42. Cf. M. Said dan D. Marisoer, *Mendidik dari zaman ke zaman*. Cet. ke-3, Bandung, Dian Rakyat, 1965, hal. 46.
2. Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam alam Indonesia merdeka*. Jakarta, Gunung Agung, 1970, hal. 22 Cf. I. Djumhur dan H. Danasuparta, Sejarah Pendidikan Cet. ke-6. Bandung, Ilmu, 1976, hal. 119.
3. Soebantardjo, *Sari Sedjarah Eropah - Amerika*. Djil. ke-2, Yogyakarta, Bopkri, 1961, hal. 42, 43.
4. I. Djumhur dan H. Danasuparta, *loc cit*.
5. Soegarda Poerbakawatja, *loc. cit*.
6. M. Said dan D. Mansoer, *loc. cit*. Ditinggalkannya pendidikan berdasarkan agama Kristen adalah sebagai akibat timbulnya aliran Aufklarung yang bersifat liberal. Menurut aliran ini, pendidikan hendaknya dapat membebaskan manusia; pengajaran harus lepas dari pengaruh gereja, karena gereja hanya memperhatikan anggota-anggotanya saja. Aliran Aufklarung ini timbul pada abad ke-17 dan mempengaruhi seluruh benua Eropa (termasuk Negeri Belanda) pada abad ke-18, terutama karena dorongan Revolusi Prancis (I. Djumhur dan H. Danasuparta, *op. cit.*, hal. 118--119).

8. M. Said dan D. Mansoer, *op. cit.*, hal. 46--47. Cf. I. Djumhur dan H. Danasuparta, *op. cit.*, hal. 120, dan P. Post, *Het Volkonderwijs in Nederlandsch Indie*, Batavia Wolters, 1932, hal 11 Lihat juga : Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara: a hisroty of Indonesia*, Bruxelle, A. Manteau, 1959, hal 276.

9. Djumhur dan H. Danasuparta, *loc. cit.*

10. M. Said dan D. Mansoer, *loc cit.* Cf. I. J. Brugmans, *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch Inide*, Batavia, Wolters, 1938, hal 64.

11. I. Djumhur dan H. Danasuparta, *loc. cit.* Lihat juga : I.J. Brugmans, op. cit., hal. 64--65

12. I. Djunihur dan H. Danasuparta, *loc. cit.* dan Bernard H.M. Vlekke *Op. cit*, hal. 277.

13. "Surat-surat Raffles kepada Lord Minto", *Varia*, 625, 8 April 1970, hal. 31.

14. I. Djumhur dan H Danasupaaa, *loc cit.* Lihat juga: Sartono Kartodirdjo; Marwati D.P.; dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Cet. ke- 1, ed. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1977, hal. 65--67, 70.

15. I. Djumhur dan H. banasuparta, *op. cit.*, hal. 120--121. lihat juga : I.J. Brugmans, *op. cit.*, hal. 66.

16. M. Said dan D. Mansoer. *loc. cit.*

17. Sartono Kartodirdjo dkk., *op. cit.*, hal. 68.

18. I. Djumhur dan H. Danasuparta, *op. cit*, hal. 121. lihat juga : Bernard H-M. Vlekke, *loc. cit.*

19. I. Djumhur dan H. Danasuparta, *loc. cit.* dan M. Said dan D. Mansoer *loc. cit.*

20. *Pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman*, *loc. cit*

21. *Ibid.*

22. I. Djumhur dan H. Danasuparta, *loc. cit*

23. *Ibid.* Pemerintah Belanda mengadakan usaha-usaha penghematan disebabkan sejak tahun 1820 anggaran belanja negara selalu defisit. Hal ini erat hubungannya dengan eksport hasil pertanian Pulau Jawa. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Belanda memanggil Pulang Gubernur Jenderal van der Cappellen dan diganti oleh Komisaris Jenderal Du Bus de Gisingnies dengan tugas mengadakan Penghematan dan penyelidikan terhadap eksport hasil Pulau Jawa (D:H. Burger, *Sejarah ekonomi sosiologis Indonesia,* Disadur oleh Prajudi Atmosudirdjo, Jakarta, Pradnyapararnita, 1962, hal. 157--162).

24. *Pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman, op. cit.,* hal 50.

25. *Ibid* Df. I.J. Brugmans, op cit., hal 279 dan J.A. Van der Chijs, *Het middelbaar School - Onderwijs te Batavia, de eerste helft van de 19e eeuw,* Batavia, Kollf, 1902, hal 10.

26. Pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman *op. cit.*, hal 50-51.

27. *Ibid.* Cf. J.A. Van der Chijs, *loc cit.*

28. Pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman, *loc.cit.*

29. *Ibid.*, hal 51

30. *Ibid.* Cf. Clive Day, *The Dutch in Java: the policy and administration,* Kuala Lumpur, Oxford Univ. Press, 1996 hal 390.

31. Pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman, *loc. cit.*,

32. *Sejarah Daerah DKI Jakarta.* Jakarta, Dep. PK. Proyek PB2SID, 1978, hal 90.

33. A. Sobana Hardjasaputra, *Pemerintahan Daerah Jawa Barat Pada Masa Revolusi Fisik (September 1945--Juni 1948),* Skripsi, Bandung, Unpad. Fakultas Sastra, 1980, hal. 12.

BAB IV

PENDIDIKAN PADA ABAD KE-20

4.1 Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda

Pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdi pada kepentingan penjajah. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kedudukan penjajah, mengabdi kepada kepentingan Belanda. Oleh karena tujuan pendidikan diarahkan kepada kepentingan kolonial, maka isi pendidikan pun hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi penjajah.[1]

Sifat pendidikan seperti itu, mulai awal abad ke-20 berangsur-angsur berubah. Hal ini antara lain sebagai akibat lahirnya Politik Etis (Ethische Politick).

4.1.1 Pengaruh Politik Etis

Politik Etis merupakan garis politik kolonial baru yang pertama-tama diucapkan secara resmi oleh van Dedem sebagai anggota Parlemen Belanda. Dalam pidatonya pada tahun 1891 dikemukakan keharusan untuk memisahkan keuangan Indonesia dari Negeri Belanda. Diperjuangkan pula kemajuan dan kesejahteraan rakyat serta ekspansi yang pada umumnya menuju ke suatu politik yang konstruktif.

Perjuangan untuk melancarkan politik kolonial yang progresif itu diteruskan oleh Van Kol, Van Deventer, dan Brooschoot. Van Kol yang menjadi juru bicara golongan sosialis dan berpengalaman di Indonesia melancarkan kritik terhadap keadaan yang serba merosot di Indonesia. Ia menyatakan bahwa selama satu abad lebih pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat, tetapi sepeserpun tidak ada yang dikembalikan. Van Deventer seorang liberal yang mendukung politik kolonial baru itu, pada tahun 1899 menulis sebuah karangan dalam majalah *De Gids* berjudul "Hutang Kehormatan". Dalam tulisan itu Van Deventer antara lain menyatakan bahwa dari hasil panen yang sangat berharga melalui Tanam Paksa, Negeri Belanda telah memperoleh keuntungan berjuta-juta gulden. Antara tahun 1867 sampai dengan 1878 keuntungan yang telah diperoleh tidak kurang dari 187 juta gulden. Hal ini merupakan hutang Belanda terhadap rakyat Indonesia yang perlu dkembalikan, sekalipun dalam bentuk lain, karena hal itu merupakan hutang kehormatan.[2] Sebagai bangsa yang bermoral, adalah menjadi kewajiban untuk mengembalikan hutang budi itu dengan jalan memajukan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan rakyat jajahan. Bahkan sebenarnya, andaikata Negeri Belanda tidak mendapat keuntungan pun dari daerah jajahan, sudah menjadi kewajiban merekalah untuk bertanggungjawab terhadap tanah jajahannya.[3]

Anjuran Van Deventer itu kemudian terkenal dengan sebutan "Trilogi Van Deventer" atau "Trias Etika", yaitu *Pendidikan, Irigasi, Emigrasi.*

Demikianlah sedikit gambaran mengenai timbulnya Politik Etis. Oleh karena para pendukung politik tersebut/kaum Etisi mempunyai pengaruh yang besar dan luas, maka Politik Etis mendapat dukungan dari semua golongan. Mereka menyatakan bahwa Negeri Belanda harus memperhatikan kepentingan pribumi dan membantu Indonesia. Akhirnya Politik Etis mulai dijalankan dengan pemberian bantuan sebesar 40 juta gulden, suatu pemberian yang telah bertahun-tahun diperjuangkan oleh kaum Etisi.

Politik Etis telah mengubah pandangan dalam politik kolonial sehingga pemerintah Belanda beranggapan bahwa Indonesia tidak lagi sebagai *Wingewest* (daerah yang menguntungkan), tetapi menjadi

daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat memenuhi keperluannya, dan budaya rakyatnya ditingkatkan.[4]

Dalam bidang pendidikan pemerintah mendasarkan kebijaksanaannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

a. Pendidikan dan pengetahun Barat diterapkan mungkin kepada golongan Bumiputra. Untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
b. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumiputra disesuaikan dengan kebutuhan mereka.[5]

Pelaksanaan Politik Etis dalam bidang pendidikan telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pendidikan untuk lapisan atas, agar orang-orang Indonesia lambat laun dapat menduduki tempat-tempat yang sampai saat itu diduduki oleh orang Belanda.
b. Kemajuan bahasa dan kebudayaan Barat, sedangkan kebudayaan Indonesia tidak menentangnya, karena sampai saat itu secara kenyataan "pendidikan nasional" belum ada. Bahasa-bahasa di Indonesia tidak cukup untuk membawa cita-cita dan pengertian Barat
c. Hoofdenschool dan Dokter Jawaschool diubah menjadi OSVIA (Opleidingschool voor Inlandsche Artsen Ambtenaren) dan STOVIA *(School tot Opleiding van Inlandsche Artsen)* dengan memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Demikian pula sekolah-sekolah guru mengalami perubahan, mulai dengan *Kweekschool Fort de Kock* (Bukittingi) tahun 1904
d. Kesempatan-kesempatan untuk belajar bahasa Belanda diperbanyak. Kesempatan untuk masuk HIS pun diperluas.
e. Anak-anak dari lapisan tengah dan rendah mendapat kesempatan untuk ikut merasakan perubahan ini.
f. Pendidikan cita-cita R.A. Kartini mulai didirikan *(Handwerken landbouwonderwijs)* untuk mengatasi masa *mindere welvaart.*
g. Jumlah sekolah kelas dua ditambah.
h. Sekolah-sekolah untuk orang-orang Indonesia mulai diperbaiki, misalnya :

1. *Inlandsche School der I ste klasse* (1893) diserahkan ke urusan pendidikan Barat (Stb. No 112) dan menjadi 7 tahun (1911).
2. Sekolah-sekolah desa 3-6 tahun didirikan (1907)
3. Dalam tahun 1914 *Inlandsche School der I ste klasse* (Sekolah Kelas Satu) dijadikan HIS dan menjadi bagian dari WLO yang memungkinkan adanya MULO untuk anak-anak Indonesia, dan kemudian AMS (1919)

i. Sekolah-sekolah kelas dua juga terbuka bagi bangsa Cina (1908) dan pada tahun itu pula dibuka HCS (Hollandsche-Chineesche School, Stb. No. 3480.

j. Didirikan *Vervolgschool* yang merupakan lanjutan sekolah desa (1914).

k. Didirikan *Schakelschool* (1920) yang memberi kesempatan kepada anak-anak dari sekolah desa dan sekolah kelas dua untuk mendapatkan pendidikan Barat.

l. *Ambonsche Burgerschool* dijadikan HIS (1922).

m. Diadakan sekolah-sekolah kejuruan : sekolah teknik, seperti KWS *(Koningin Wilhelmina School)* tahun 1906, Koningin Emma School (KES) tahun 1922, sekolah dagang (1911) dan PHS *(Prins Hendrik School)*; sekolah-sekolah kultur (perkebunan) mulai tahun 1911 di Bogor, Sukabumi Malang, dan sekolah pertanian di Bogor.

n. Didirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak perempuan (1918), seperti *Nijverheidschool* dan *Frobel-Kweekschool.*

o. Tahun 1910 dibentuk *Indische Universiteitsvereeniging.* Tetapi sementara waktu usahanya belum menunjukkan kemajuan. Baru pada tahun 1914 timbul hasrat besar untuk mulai dengan usaha-usaha nyata, sehingga dalam tahun 1928 berhasil didirikan *Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs* di Hindia Belanda, dan tahun 1920 berdiri THS *(Technische Hoogeschool)* di Bandung.

p. Pada tahun 1909, atas desakan Bupati Serang, A' Djajadiningrat, didirikan *Rechtschool* yang kemudian menjadi *Rechts Hoogeschool* (1924).

q. Pendirian STOVIA kemudian disusul oleh NIAS *(Nederlandsch Indiche Artsenschool)* di Surabaya, dan *Geneeskundige Hoogeschool* (1927).[6]

Demikianlah gambaran umum mengenai pengaruh Politik Etis terhadap bidang pendidikan di Indonesia. Sampai sejauhmana kebijaksanaan tersebut di atas dapat dilaksanakan di Jawa Barat akan terlihat dari perkembangan sistem pendidikan tingkat dan jenis sekolah yang ada di Jawa Barat pada masa itu (awal abad ke-20).

4.1.2 Pendidikan Dasar

Dalam dua dasawarsa pertama setelah tahun 1900, pendidikan dasar di Hindia Belanda (Indonesia) pada umumnya dan di Jawa Barat sebagai pusat pemerintahan pada khususnya mengalami kemajuan pesat. Pemerintah berusaha untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang umum bagi sekian banyak golongan penduduk yang beranekaragam persekolahan didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan (kelas) sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu.

Pendidikan dasar ini terbagi atas :

4.1.2.1 Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda (*Westersch Lager Onderwijs*)

1. Sekolah Rendah Eropa atau *Europesche Lagereschool* (ELS).

Seperti telah disebutkan dalam bab III (butir 3.2.1). ELS pertamakah didirikan di Jakarta pada tahun 1817. Sekolah ini disediakan bagi anak-anak keturunan Fropa, Timur Asing, dan anak-anak tokoh-tokoh terkemuka golongan Bumiputra. Lama belajar pada sekolah adalah 7 tahun.[7]

Setelah lahirnya Politik Etis, ELS mengalami perkembangan cukup pesat, baik jumlah sekolah maupun jumlah muridnya. Hal ini disebabkan sekolah itu tidak hanya didirikan oleh pemerintah, tetapi juga oleh pihak swasta.[8]

Pada masa itu di Jawa Barat, ELS terdapat antara lain di Jakarta; di Bandung 3 buah, yaitu di jalan Sumatra (sekarang SMP II), di jalan Dr. Cipto (sekarang Balai Pendidikan Guru), dan di jalan Pasteur (sekarang Jawatan Tera), di Rangkasbitung (sekarang SMP I)[9]; dan di Cirebon.

2. Sekolah Bumiputra (*Inlandscheschool*) Kelas Satu

Sekolah ini terbagi atas dua kategori :

a. Sekolah Cina-Belanda atau *Hollandsch - Chineesche school* (HCS) yang terbuka bagi anak-anak keturunan Timur Asing, khususnya bangsa Cina. Sekolah ini pertamakali didirikan pada tahun 1908. Lama belajarnya 7 tahun, dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Setelah HIS berdiri, perkembangan HCS sejalan dengan HIS.[10]

Di Jawa Barat HCS antara lain terdapat di Bandung dan Jakarta.

b. Sekolah Bumiputra - Belanda atau *Hollandsch Inlandscheschool* (HIS)

HIS yang mulai didirikan pada tahun 1914 merupakan penjelmaan dari Sekolah Kelas Satu. Dengan dibukanya HIS ini memberi kemungkinan yang lebih besar bagi murid-murid untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan diri memasuki sistem pendidikan kolonial, sebab memang HIS dibuka atas desakan masyarakat Bumiputra, khususnya masyarakat golongan atas, karena Sekolah Kelas Satu ternyata tidak memenuuhi syarat untuk menjadikan murid-muridnya dapat melanjutkan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, memang HIS terutama dimaksudkan sebagai *standenschool*, yaitu sekolah berdasarkan status. Untuk menentukan status sosial seseorang sehingga berhak memasukkan bakatnya ke HIS, pemerintah membuat ketentuan yang dituangkan dalam Stb. 1914 No. 359. Ketentuan tersebut memuat empat dasar penilaian mengenai status sosial seseorang, yaitu keturunan, jabatan. kekayaan, dan pendidikan. Di samping itu pemerintah juga berpegang kepada penghasilan seseorang per tahun. Hasil penilaian ini dibagi dalam tiga kategori. Kategori A termasuk kaum bangsawan, pejabat tinggi, dan swasta kaya yang

berpenghasilan bersih lebih dari 75 gulden per bulan. Kategori B ialah orangtua tamatan MULO dan *Kweekschool* ke atas. Kategori C ialah pegawai, pengusaha kecil, militer, petani, nelayan, dan orangtua yang pernah mendapat pendidikan HIS (ic.). Orangtua yang termasuk kategori C ini dianggap sebagai golongan/ kelas menengah bawah. Sedangkan kategori A dan B dianggap kelas atasan dan mendapat prioritas pertama dalam memasukkan anaknya ke HIS. Tetapi dalam prakteknya ternyata berlainan. Berdasarkan hasil penelitian Komisi HIS antara tahun 191 2 sampai dengan tahun 1927, ternyata murid-murid HIS lebih banyak berasal dari golongan menengah bawahan (kategori C).[11] Hal ini antara lain disebabkan HIS dibuka pula oleh pihak swasta, diantaranya Paguyuban Pasundan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka HIS tetap membuka pintu bagi terjadinya semacam mobilitas sosial. Terlepas dari ketentuan pemerintah, HIS telah membuka kesempatan bagi golongan berpenghasilan rendah dan pihak swasta untuk memperoleh pendidikan dengan sistem kolonial (Barat).[12] Hal ini berarti adanya peningkatan pendidikan golongan Bumiputra, bahkan lama belajar di HIS pun ditingkatkan dari 5 tahun (Sekolah Kelas Satu) menjadi 6 tahun, kemudian meningkat menjadi 7 tahun (HIS).[13]

Pada waktu itu di Jawa Barat, HIS negeri (pemerintah) antara lain terdapat di Jakarta, Bandung, Sumedang, Ciamis, dan Kuningan.[14] Sedangkan HIS Pasundan (swasta) terdapat di Bandung, Ciparay, Sukabumi, Cianjur, Bogor, Karawang, Purwakarta, Tasikmalaya[15], dan kota-kota lainnya.

4.1.2.2 Sekolah Rendah Dengan Bahasa Pengantar Bahasa Daerah

1. Sekolah Bumiputra *(Inlandscheschool)* Kelas Dua

Sekolah Kelas Dua ini lama belajarnya 5 tahun dan disediakan untuk anak-anak Bumiputra golongan menengah.

Dengan demikian, bagi anak-anak Bumiputra golongan menengah ini terbuka dua jenis sekolah, yaitu Sekolah Kelas Dua dan HIS.

Seperti telah dikemukakan dalam bab III (butir 3.3.1.2), sekolah ini didirikan di distrik-distrik, termasuk distrik-distrik di daerah Jawa Barat.

2. Sekolah Desa *(Volkschool)*

Pertamakali didirikan pada tahun 1907 dan disediakan untuk anak-anak rakyat biasa yang tinggal di desa-desa. Lama belajarnya 3 tahun.[16] Biaya sekolah ini biasanya diharapkan ditanggung oleh pemerintah setempat dengan tambahan berupa subsidi dari pemerintah pusat. Pengetahuan yang diajarkan hanyalah sekedar kepandaian membaca. menulis, dan berhitung.[17]

Di Jawa Barat, sekolah ini antara lain terdapat di desa-desa di lingkungan kota Bandung, Cirebon, dan Ciamis.[18]

Di Jakarta, *Volkschool* baru berdiri pada tahun 1921. Kemudian berkembang sehingga pada tahun 1929 mencapai jumlah 14 buah.[19]

3. Sekolah Lanjutan *(Vervoigschool)*

Sekolah ini dibuka pada tahun yang bersamaan dengan tahun pendirian HIS, yaitu tahun 1914, dan merupakan sekolah lanjutan dari Sekolah Desa *(Volkschool)*. Lama belajarnya 3 tahun dan disediakan untuk murid-murid Sekolah Desa yang berprestasi baik.[20]

Pada sekitar tahun 1915 di Jawa Barat, *Vervolgschool* dan Sekolah Kelas Satu/HIS telah berdiri hampir di tiap kabupaten.[21]

4.1.2.3 Sekolah Peralihan (*Schakelschool*)

Di Jawa Barat, sekolah ini pertamakali didirikan di Bandung pada tahun 1921 dan di Jakarta pada tahun 1924.[22] Disebut sekolah peralihan karena memang sekolah tersebut merupakan peralihan dari Sekolah Desa 3 tahun *(Volkschool)* yang berbahasa pengantar

bahasa daerah ke sekolah dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda, dengan lama belajar 5 tahun.[23] Hal itu berarti bahwa murid-murid terpilih dari *Volkschool* dapat melanjutkan ke dua tingkatan sekolah, yaitu ke *Vervolgschool* atau ke *Schakelschool*.

4.1.3 Pendidikan Lanjutan

Pada abad ke-19, pendidikan lanjutan di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Barat pada khususnya masih sangat langka. Pendidikan lanjutan yang ada pada waktu itu hanya *gymnasium*, yaitu *Gymnasium Willem III* yang dibuka di Jakarta (1860) dan diperuntukkan hanya bagi anak-anak golongan Eropa. Gymnasium itu kemudian berubah menjadi HBS *(Hogere Burgerschool)*.

Pada abad ke-20, pendidikan lanjutan mengalami perkembangan cukup pesat, dan tidak hanya terbuka bagi anak-anak Eropa, tetapi terbuka pula bagi anak-anak Bumiputra. Pendidikan lanjutan tersebut terdiri atas :

4.1.3.1 MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*)

Dilihat dari sistem persekolahan Belanda, MULO termasuk ke dalam kategori sekolah dasar, tetapi sekolah dasar yang diperluas. Berhubung dalam kenyataannya sekolah ini merupakan kelanjutan dari sekolah dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda, maka MULO termasuk pula ke dalam jenjang pendidikan lanjutan.

MULO pertamakali didirikan pada tahun 1914 dan merupakan sekolah umum yang berdiri sendiri (setaraf dengan SMP sekarang), yang tebuka bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing.[24]

Lama belajar di MULO adalah 3 tahun, tetapi dapat menjadi 4 tahun, apabila masuknya melalui *voorklas* (kelas persiapan).[25]

Sebenarnya MULO berasal dari kursus-kursus yang diselenggarakan sebagai lanjutan dari pelajaran rendah Belanda pada beberapa buah ELS. Oleh karena itu pada tahun pendiriannya, MULO dapat diselenggarakan di beberapa kota secara serempak.[26]

Pendirian MULO ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi pihak swasta pun giat mendirikan sekolah tersebut, dengan mengingat MULO yang didirikan oleh pemerintah tidak mencukupi kebutuhan.

Pelajaran yang diberikan di MULO Bumiputra mencakup 17 mata pelajaran. yaitu: Bahasa Jawa, Bahasa Melayu, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris. berhitung, hitung dagang/Pengetahuan dagang, aljabar, ilmu ukur, ilmu bumi, sejarah, ilmu tumbuh-tumbuhan. ilmu hewan, ilmu alam, menggambar, olah raga, tatabuku, dan mengetik.[27]

Pada waktu itu MULO pemerintah terdapat di 32 kota di Indonesia termasuk 5 kota di Jawa Barat, yaitu di Jakarta, Jatinegara, Bogor, Bandung, dan Cirebon. Sedangkan MULO swasta di Jawa Barat terdapat di Jakarta (Kristen dan Rum Katolik), Sukabumi (Kristen), Bandung (Kristen, Rum Katolik, dan Perkumpulan Indo-Eropa), dan Tasikmalaya (Pasundan).[28]

4.1.3.2 AMS (Algemeene Middelbareschool)

AMS dibuka berdasarkan keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 16 Januari 1919. Sekolah tersebut dimaksudkan sebagai sekolah lanjutan dari MULO dan sekaligus merupakan persiapan untuk memasuki perguruan tinggi, dengan lama belajar 3 tahun. Dengan demikian sekolah ini setaraf dengan SMA sekarang.

Berdasarkan keputusan pemerintah tersebut di atas, pada tanggal 5 Juli 1919 AMS untuk pertamakalinya dibuka di Yogyakarta, dengan murid pertama berjumlah 42 orang (22 orang diantaranya adalah anak-anak Bumiputra)[29]

AMS dibagi menjadi dua bagian yang terdiri atas (mencakup) tiga jurusan, yaitu :

Bagian A - "Bidang Pengetahuan Kebudayaan", terdiri atas :
- A1 : Sastra Timur *(Oostersch-Letterkunde)*
- A2 : Sastra Klasik Barat *(Westersch-klassiek)*

Bagian B - "Bidang Ilmu Pasti dan Alam",[30]

Pada tahun 1920 pemerintah membuka AM-Sastra Barat (AMSA2) di Bandung. Enam tahun kemudian dibuka lagi AMS

bagian B di Jakarta (di *Hospitalweg* 32, sekarang jalan Dr. Abdurachman Saleh 26, bekas gedung STOVIA)[31]

Sama halnya dengan MULO. AMS pun didirikan pula oleh pihak swasta. AMS swasta yang dibuka di Jawa Barat adalah :

Di Jakarta : AMS-B Kristen (1926) di jalan Diponegoro/ Salemba, AMS-B Rum Katolik (1926) di Menteng 40, AMS *Canisius College*, di Menteng Raya. Sekolah Menengah Muhammadiyah-Bagian AMS-B, di Kramat, Persiapan Untuk Perguruan Tinggi (POPTI)-AMS Perguruan Rakyat di Kramat

Di Bandung : AMS-B NIATWU *(Nederlandsch Indische Afdeeling Theo- sofische Wereld Unie).*[32]

Perbedaan antara AMS bagian A1 dan A2 terlihat dari kurikulum masing-masing bagian, sebagai berikut : (kurikulum tahun 1939/1940).[33]

1. AMS-A1 -Oosters Letterkundige afdeling)

	Mata Pelajaran	Kelas		
		I	II	III
1.	Bahasa Jawa	4 + 2	5 + 3	6 + 4
2.	Bahasa Melayu	2 + 4	3 + 5	4 + 6
3.	Sej. Kebudayaan Ind.	.2	2	2
4.	Sej. Kesenian Ind.	1	1	1
5.	Bahasa Belanda	5	4	5
6.	Bahasa Prancis	3	3	3
7.	Bahasa Inggris	2	2	2
8.	Bahasa Jerman	3	2	2
9.	Sejarah	2	3	3
10.	Ilmu Bumi	1	2	2
11.	Tatanegara	2	-	-
12.	PKK (Staathuishoudkundige)	-	1	2
13.	Matematika	2	2	2
14.	Ilmu Alam	2	1	-
15.	Kimia	1	2	-
16.	Ilmu Hayat	1	1	-
17.	Menggambar	1	2	-
18.	Pendidikan Jasmani	2	2	1

Bahasa Jawa (termasuk Jawa Kuno) yang ditetapkan sebanyak 6, 8 dan 10 jam pelajaran, dimaksudkan untuk murid-murid pada waktu di MULO tidak mendapatkan mata pelajaran itu. Demikian pula halnya dengan mata pelajaran bahasa Melayu.

Meskipun pada AMS-A1 diberikan bahasa Jawa dan Melayu, tetapi bahasa pengantarnya tetap bahasa Belanda.

II. AMS-A2 (*Westers Klassieke afdeling*)

	Mata Pelajaran	Kelas		
		I	II	III
1.	Bahasa Latin	9	9	9
2.	Kebudayaan Kuno Barat	1	2	2
3.	Bahasa Belanda	5	4	5
4.	Bahasa Ingris	2	2	2
5.	Bahasa Francis	4	3	3
6.	Bahasa Jerman	4	3	3
7.	Sejarah	2	3	3
8.	Ilmu Bumi	1	2	2
9.	Tatanegara	2	-	-
10.	PKK (Staathuishoudkunde)	-	1	2
11.	Matematika	2	2	2
12.	Ilmu Alam	2	1	-
13.	Kimia	1	2	-
14.	Ilmu Hayat	1	1	-
15.	Menggambar	1	2	1
16.	Pendidikan Jasmani	2	2	1

Maksud diberikannya mata pelajaran bahasa Latin dan Kebudayaan Kuno Barat ialah untuk memberi corak agar AMS-A2 benar-benar *Westers klassiek*.

Kurikulum tersebut di atas kemudian mengalami sedikit perubahan, sebagai akibat Negeri Belanda diduduki oleh tentara Nazi Jerman dalam bulan Mei 1940. Sejak itu pelajaran bahasa Jerman di semua jenis sekolah dihapuskan, dan bahasa Prancis

yang sebelumnya merupakan mata pelajaran fakultatif pada AMS - Bagian B, mulai tahun ajaran 1940/1941 menjadi mata pelajaran wajib.

Perubahan tersebut terlihat dalam kurikulum AMS-Bagian B, sebagai berikut :

	Mata Pelajaran	Kelas		
		I	II	III
1.	Matematika	6	5	4
2.	Prakarya (Werkuitkunde)	-	2	2
3.	Ilmu Alam	3	3	5
4.	Kimia	3	3	5
5.	Ilmu Hayat	2	1	2
6.	Ilmu Falak	-	-	1
7.	Tatanegara	1	1	-
8.	PKK	-	1	1
9.	Memegang Buku	-	1	(2)
10.	Sejarah	3	2	2
11.	Ilmu Bumi	2	2	1
12.	Bahasa Belanda	4	4	4
13.	Bahasa Inggris	2	2	2
14.	Bahasa Prancis	4	2	2
11	Menggambar - Tangan	2	1	(2)
16.	Menggambar - Mistar	-	2	(1)
17.	Pendidikan Jasnmani	3	3	2
		35	36	34/35

Tatabuku dan Menggambar (tangan dan mistar) merupakan mata pelajaran pilihan bagi murid-murid kelas III.

Dengan kurikulum seperti tersebut di atas, AMS bermaksud untuk mempersiapkan murid-murid untuk masuk ke perguruan tinggi. Hal itu telah ditegaskan oleh Direktur Departemen *van Onderwijs en Erendienst* (sekarang Departemen P dan K) dalam surat keputusan mengenai peraturan AMS, yang menyatakan bahwa :

tujuan AMS adalah untuk memberi pendidikan tingkat menengah dan persiapan untuk perguruan tinggi, yang ke bawah (sic.) menyambung pendidikan Mulo bagian B atau sekolah yang sederajat dengan itu (art. 1).[34]

AMS mulai mengeluarkan lulusannya pada tahun 1922. Jumlah murid pada tahun ajaran 1939/1940 adalah 1.546 orang terdiri atas : AMS Negeri 1.065 orang, AMS bersubsidi dan yang dipersamakan 481 orang. Sedangkan sekolahnya berjumlah 10 buah (6 AMS Negeri dan 4 AMS bersubsidi dan yang dipersamakan).[35]

4.1.3.3 HBS (Hoger Burgerschool)

HBS disediakan bagi anak-anak golongan Eropa dan anak-anak bangsawan atau tokoh-tokoh terkemuka Bumiputra. Sekolah ini dibagi dalam dua bagian yaitu bagian atas dengan lama belajar 3 tahun (penjelmaan dari Gymnasium), dan bagian bawah dengan lama belajar 2 tahun. HBS mulai didirikan pada tahun 1867

Pendidikan HBS ini disesuaikan dengan HBS di Negeri Belanda, baik kurikulumnya maupun ketentuan-ketentuannya. Seperti halnya HBS di Negeri Belanda, HBS di Indonesia pun terbuka bagi semua suku bangsa asal memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam hal ini, murid-murid lulusan MULO-B dapat juga mengikuti pendidikan di HBS kelas IV (sebagai pendengar), asal dapat memenuhi persyaratan yang diminta, antara lain memiliki surat keterangan dari direktur MULO yang menyatakan bahwa murid yang bersangkutan prestasinya memenuhi syarat untuk mengikuti pelajaran di HBS kelas IV. Di samping itu masih ada berapa persyaratan yang cukup berat.[36a]

Jumlah HBS 5 tahun ini ternyata sangat terbatas sekali.[36b] Pada waktu itu di Jawa Barat (tidak- termasuk Jakarta), HBS hanya terdapat di Bogor dan Bandung (Jalan Belitung).[36c]

4.1.4 Pendidikan Kejuruan

Sekolah lanjutan tingkat atas kejuruan pada waktu itu mengalami pembinaan cukup baik, terbukti dengan banyaknya sekolah

kejuruan yang terutama terdapat di Pulau Jawa.[36d] Hal ini terjadi sebagai akibat pelaksanaan Politik Etis, dimana Pemerintah Hindia Belanda banyak mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan, terutama pendidikan kejuruan.[36e]

Pada waktu itu, sekolah kejuruan yang didirikan di Jawa Barat ialah :

a. Sekolah Perkebunan *(Cultuurschool)* di Bogor yang didirikan pada tahun 1911. Sekolah ini kemudian dipindahkan ke Sukabumi. Lama belajarnya 3 tahun dan terbuka bagi murid-murid lulusan sekolah rendah Eropa (Barat).
b. *Middelbare Landbouw School* (Sekolah Pertanian Menengah Atas). Didirikan di Bogor pada tahun 1920 dan menerima murid-murid lulusan MULO atau HBS 3 tahun.
c. Desa *Landbouwschooltjes* didirikan di Soreang sekitar tahun 1910.[36f] Pemerintah membuka sekolah-sekolah kejuruan itu rupanya karena mengingat bahwa tanah/daerah Jawa Barat sangat subur sehingga perlu adanya tenaga-tenaga yang terdidik untuk mengolahnya.

4.1.5 Pendidikan Tinggi

Pikiran-pikiran mengenai perlunya diadakan pendidikan tinggi di Hindia Belanda (Indonesia) secara resmi timbul dalam rapat umum Perkumpulan Hindia Belanda di Den Haag pada tanggal 1 Februari 1910.[36g] Atas dasar itu, maka pada tahun 1910 itu juga didirikan *Indische Universiteits Vereeniging* yang bertujuan untuk mendirikan pendidikan tinggi, baik melalui pemerintah maupun swasta. Inisiatif ini mula-mula timbul dari orang-orang Indo-Eropa, kemudian didukung oleh orang-orang Indonesia dan Belanda pengikut *Van Deventer (Ethische Koers)*[36h]

Namun demikian sampai tahun 1920 di Indonesia belum ada perguruan tinggi yang sebenarnya. Baru setelah kebutuhan akan tenaga insinyur semakin dirasakan, maka pada tahun 1920 atas prakarsa lembaga *Koninklijk Instituut voor Hoger Technisch Ondenwijs* didirikanlah sebuah sekolah teknik tinggi, yaitu *Tochnische Hoge School* disingkat THS (sekarang menjadi ITB) di

Bandung. Sekolah ini merupakan pendidikan tinggi pertama di Indonesia yang betul-betul memenuhi syarat sebagai perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini menerima lulusan AMS dan HBS dengan lama belajar 5 tahun.

Perguruan tinggi yang sederajat dengan THS dibuka di Jakarta, yaitu Sekolah Tinggi Hukum atau *Rechts Hogeschool* (RHS) tahun 1924 dan Sekolah Tinggi Kedokteran *(Geneeskundige Hogeschool)* tahun 1927.[36i]

4.2 Pendidikan Pada Masa Pergerakan Nasional

4.2.1 Tokoh-tokoh dan pemikirannya

4.2.1.1 Rd. Ayu Dewi Sartika

Pada tanggal 4 Desember 1884, Kota Bandung, ibukota Parahiyangan, telah dianugerahi Tuhan seorang putri yang kelak terkenal sebagai seorang putri bangsawan yang menjadi perintis emansipasi wanita Sunda pada khususnya wanita Indonesia pada umumnya. Dia merupakan "Dewi Penyelamat" bagi kaumnya karena telah mengangkat derajat wanita Indonesia dari kebodohan.[37]

Demikianlah pada tanggal tersebut di atas, di Kepatihan Bandung lahir seorang putri mungil yang diberi nama Raden Ayu Dewi Sartika. Ibunya bernama Nyi Raden Ayu Radja Permas. Beliau adalah putri Dalam Wiranatakusumah IV, Bupati Bandung periode tahun 1846--1874, yang biasa dipanggil "Dalem Bintang".[38] Ayahnya bernama Raden Somanagara, Patih Bandung pada masa pemerintahan Bupati RA.A. Martanagara. Rd. Somanagara adalah putra Hoofd Jaksa Bandung bernama Raden Demang Suriadipraja. Mereka adalah keturunan bupati Karanganyar.[39]

Sejak kecil pada diri Rd. Dewi Sartika sudah tampak sifat-sifat istimewa yang berbeda dengan sifat anak-anak perempuan lainnya pada masa itu. Ia seorang anak rajin, suka kepada segala sesuatu yang baru, dan telah tampak pula sifat-sifat kepemimpinannya.

Meskipun pada masa itu masyarakat wanita Sunda terikat oleh adat lama yang tidak mengizinkan anak-anak perempuan masuk sekolah, tetapi Rd. Dewi Sartika oleh orang tuanya dimasukkan ke sekolah Belanda, yaitu ELS (Europeesche Lagere School). Di sekolah ia termasuk ke dalam golongan murid yang maju, sungguh-sungguh dalam belajar dan disukai oleh teman-temannya. Sayang Rd. Dewi Sartika tidak dapat menamatkan sekolahnya (hanya sampai kelas 3). Rd. Dewi Sartika terpaksa harus meninggalkan sekolahnya karena musibah telah menimpa ayahandanya. Rd. Somanagara, ayah Rd. Dewi Sartika telah dituduh sebagai pelopor pemberontakan yang akan menggulingkan kedudukan Bupati Bandung masa itu yang bukan keturunan bangsawan Bandung, melainkan keturunan bangsawan Sumedang. Putusan jatuh, bahwa Rd. Somanagara harus menjalani hukuman buangan ke Ternate. Hukuman tersebut dijalankan bersama istrinya sampai beliau wafat di sana.[40]

Terhadap peristiwa yang menimpa diri Rd. Somanagara ini, versi lain menyebutkan bahwa Rd. Somanagara dibuang ke Ternate karena dituduh sebagai pimpinan pemberontakan melawan ketidakadilan pemerintah feodal kolonial Belanda. Komplotan pemberontak itu terbongkar setelah sebuah bom diketemukan di bawah panggung pacuan kuda di Tegallega Bandung, di mana para pembesar kolonial Belanda akan hadir menyaksikan pacuan kuda tersebut.

Sementara pengusutan berlangsung, Rd. Somanagara dipindahkan ke Mangunreja, Priangan Timur sebagai patih yang berdiri sendiri. Akhirnya putusan jatuh, bahwa Rd. Somanagara dinyatakan bersalah oleh pemerintah kolonial Belanda, dan sejak itu (tahun 1892) beliau dibuang ke Ternate sampai beliau meninggal di sana.[41]

Sepeninggal ayahnya, Rd. Dewi Sartika dipelihara oleh uwanya, Patih Cicalengka yang biasa dipanggil Aria Cicalengka. Oleh uwanya ia dididik dan dibekali bermacam-macam ilmu pengetahuan yang perlu untuk perempuan. Ia merasa bangga karena pada waktu itu ia merupakan satu-satunya diantara wanita-

wanita di lingkungannya yang sudah pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu ia seringkali dimintai pertolongan oleh keponakan-keponakannya untuk menulis, surat atau membacakan surat. Melihat kenyataan kehidupan gadis-gadis dan kaum wanita di lingkungannya itu, Rd. Dewi Sartika mulai berpikir bahwa bila mereka dibiarkan bodoh, hal itu dapat membahayakan bagi nasib kaum wanita itu sendiri. Oleh karena itu Rd. Dewi Sartika berniat untuk membantu anak-anak gadis belajar menulis dan membaca. Makin lama makin kelihatan pembawaannya untuk "mendidik" anak-anak. Secara sembunyi-sembunyi Rd. Dewi Sartika sering memberikan pelajaran membaca dan menulis kepada anak-anak pelayan kepatihan dan teman-teman gadisnya, dengan pecahan genting sebagai sabaknya dan arang sebagai kapurnya. Hasilnya cukup memuaskan, beberapa orang anak bisa membaca dan menulis, padahal "gurunya" baru berusia 10 tahun.[42] Ini sungguh merupakan suatu kejutan, sehingga menjadi buah mulut orang, sebab pada waktu itu jangankan anak-anak rakyat biasa, istri-istri kaum bangsawan pun pada umumnya masih banyak yang buta huruf. Waktu menginjak masa remaja Rd. Dewi Sartika kembali tinggal bersama ibunya di Bandung. Semula Rd. Dewi Sartika oleh uwanya akan dijodohkan dengan putra sulungnya. Tetapi ia menolak secara halus maksud uwanya itu dengan alasan ingin mendampingi ibunya yang baru kembali dari pengasingan di Ternate. Padahal maksud sebenarnya ia ingin bebas memilih sendiri calon suaminya sedangkan tujuan utamanya ia ingin melaksanakan cita-citanya mengangkat derajat kaum wanita dengan jalan memajukan pendidikannya.[43]

Pengalaman hidupnya yang pahit sebagai anak orang buangan dan kehidupan di sekitarnya, dimana kaum wanita tidak diberi kesempatan untuk mengejar kemajuan, serta penderitaan hidup yang dialami oleh ibunya, merupakan dorongan yang kuat bagi timbulnya ide Rd. Dewi Sartika, bahwa wanita tidak boleh hanya bergantung kepada suami, keluarga atau kebaikan orang lain, tetapi wanita pun harus dapat berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan kaum pria, kalau perlu melebihi kaum pria asal tidak meninggalkan kodratnya sebagai wanita.[44]

Atas bantuan Bupati Bandung R.A.A. Martanagara, cita-cita Rd. Dewi Sartika dapat dilaksanakan. Pada tanggal 16 Januari 1904 didirikanlah sebuah sekolah bertempat di Paseban Kulon, kompleks Pendopo Kabupaten Bandung dengan nama "Sakola Istri'.[45]

Pada tahun 1906, Rd. Dewi Sartika menikah dengan Rd. Kanduruan Agah Suriawinata, guru sekolah "Karang pawulang" Bandung, keluaran Hulpacte dan masih familinya. Dengan demikian keluarga Rd. Dewi Sartika merupakan keluarga pendidik. Semua tenaga dan pikiran, bahkan harta yang dipunyai oleh Rd. Dewi Sartika dicurahkan untuk kepentingan pendidikan. Dalam melakukan usahanya itu, Rd. Dewi Sartika mendapat bantuan penuh dari suaminya. Suaminyalah yang menjadi pembina di dalam mengelola sekolah tersebut sehingga pendidikannya menjadi tambah maju dengan pesat.[46]

Rd. Dewi Sartika menginginkan kaum wanita harus mengapai kemajuan dalam segala bidang tanpa melupakan kodratnya, agar senantiasa menjadi istri binangkit, ibu teladan yang penuh kesabaran, ramah dan riang, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Rd. Dewi Sartika telah mengorbankan segalanya baik pikiran, tenaga maupun harta. Hal ini bukan isapan jempol belaka, tetapi betul-betul terjadi. Misalnya pada waktu di sekolah Rd. Dewi Sartika akan diadakan pameran dalam rangka kenaikan kelas. Berhubung pada waktu itu sekolah benar-benar kekurangan biaya, maka Rd. Dewi Sartika dengan ikhlas telah menggadaikan perhiasannya, semata-mata untuk biaya penyelenggaraan pameran di sekolahnya. Bahkan rumah beliau sendiri pun yang terletak di Kebon Kalapa (sekarang terminal bis) dijual dan dibelikan sebidang tanah untuk mendirikan bangunan sekolah. Sedangkan beliau sendiri menempati rumah kontrakan.[47]

Demikianlah ketulus-ikhlasan dan dharma-bakti Rd. Dewi Sartika dalam membina sekolah untuk kemajuan pendidikan wanita Sunda (Jawa Barat) pada khususnya dan pendidikan rakyat Indonesia pada umumnya. Sampai akhir hayatnya pun beliau tidak mempunyai rumah lagi.

Atas jasa-jasanya dalam lapangan pendidikan bagi anak-anak gadis, dalam rangka usaha meningkatkan harkat derajat kaum wanita Indonesia ke tingkat yang lebih baik, pada ulang tahunnya yang ke-25, yaitu pada tahun 1929, Rd. Dewi Sartika dianugerahi tanda jasa "Bintang Perak" oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dan pada tahun 1934 untuk sekolahnya diberi gedung baru yang berlokasi di Jalan Kebon Cau.[48]

Pada tanggal 16 Januari 1939, Rd. Dewi Sartika menghadiri ulang tahun sekolahnya yang ke-35. Perayaan ini mendapat perhatian yang cukup, baik dari masyarakat Jawa Barat pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, maupun dari pihak pemerintah waktu itu. Tetapi malang tak dapat ditolak, enam bulan kemudian sejak saat itu, Raden Dewi Sartika mendapat musibah, yaitu pada tanggal 25 Juli 1939 beliau ditinggalkan oleh suaminya yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama beliau mengelola sekolahnya. Rd, Kanduruan Agah Suriawinata pulang ke Rakhmatullah. Walaupun demikian Rd. Dewi Sartika tidak patah di tengah jalan, beliau terus melanjutkan pengabdiannya didalam mendidik kaum wanita, sehingga pada tahun 1940 Rd. Dewi Sartika mendapat tanda jasa kerajaan sebagai *Ridder in de orde van Oranje Nassau* untuk pengabdiannya sebagai pendidik pertama anak-anak gadis.[49]

Di samping mendidik anak-anak, Rd. Dewi Sartika seringkali mendapat undangan dari organisasi-organisasi wanita untuk memberikan ceramah tentang pendidikan dan emansipasi wanita. Undangan itu tidak hanya dilakukan di kota-kota di Jawa Barat saja, akan tetapi pernah juga beliau memberikan ceramah-ceramah di Tegal, di Sekolah Kartini Semarang, dan pada sebuah Kongres Wanita di Surabaya.[50]

Ketika Belanda menyerah kalah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Pada saat itu suasana di Jawa Barat sebagai pusat pemerintahan menjadi sangat genting. Dalam suasana demikian itu "Sekolah Raden Dewi" tidak luput dari penggedoran Balatentara Jepang. Akhirnya sekolah hasil jerih payah Raden Dewi Sartika yang dibangun sejak tahun 1904 mengalami pembekuan karena diambil alih oleh Jepang, bahkan

Rd. Dewi Sartika dan semua guru-guru lama sekolah tersebut diberhentikan dan diganti dengan guru-guru pemerintah pendudukan Jepang. Sejak itu Rd. Dewi Sartika tidak sanggup lagi untuk membimbing anak-anak di sekolah karena sering sakit.[51]

Sejarah berjalan terus bangsa Indonesia akhirnya lepas dari belenggu penjajahan dan merebut kemerdekaannya. Dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu, berbagai peristiwa telah menghiasi lembaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan Jawa Barat merupakan kancah dan pusat dari perjuangan itu.

Demikianlah, dengan terjadinya peristiwa "Bandung Lautan Api" mulai tanggal 24 Maret 1946, sebagai reaksi perjuangan bangsa Indonesia menentang agresi Sekutu dan Nica, maka Rd. Dewi Sartika beserta keluarganya mengungsi ke luar kota Bandung. Mula-mula beliau menuju Leuwipanjang, terus ke Ciparay. Dalam keadaan sakit beliau disertai oleh anak, menantu dan cucunya meneruskan pengungsian ke Garut. Di Garut beliau tinggal di Hotel Ngamplang dan dapat sedikit beristirahat mengingat kesehatannya yang tidak mengijinkan harus terus menerus mengungsi menghindari pertempuran. Meskipun Rd. Dewi Sartika masih sakit, karena keadaan memaksa, maka pada bulan Mei 1947 beliau beserta keluarga mengungsi lagi ke Ciamis, dan sampai ke Cineam, suatu tempat di lereng gunung. Di tempat ini beliau menderita sakit keras hingga terpaksa harus dirawat di Rumah Sakit Cineam di bawah perawatan Dr. Sanitioso. Tuhan telah mentakdirkan bahwa riwayat perjuangan Rd. Dewi Sartika hanya sampai di situ. Pada hari Kamis tanggal 11 September 1947 pukul 9.00 pagi Rd. Dewi Sartika wafat di Rumah Sakit Cineam Ciamis dengan tenang dan disaksikan oleh keluarganya. Beliau wafat dalam usia 63 tahun (4 Des. 1841 - 11 Sep. 1947) dan dimakamkan di Cineam. Pada tahun 1951 makamnya dipindahkan ke makam keluarga yaitu makam para bupati Bandung di Jalan Karanganyar Bandung.[52]

4.2.1.2 Rd. Ayu Lasminingrat

Rd. Ayu Lasminingrat dilahirkan pada tahun 1843 di Kota Intan Garut. Beliau adalah putri Rd. Haji Muhammad Musa, Kepala Penghulu-Kabupaten Garut, pendiri Sekolah Raja dan penasehat pemerintah jaman itu.[53]

Walaupun Rd. Ayu Lasminingrat putri seorang bangsawan, tetapi beliau tidak disekolahkan karena pada waktu itu di Garut belum ada sekolah khusus untuk wanita. Sebagai gantinya, beliau "disekolahkan" di rumah Kontroleur Levisan (orang Belanda). Di sana Rd. Ayu Lasminingrat belajar menulis, membaca, berbahasa Belanda, dan pengetahuan lain yang berhubungan dengan kewanitaan. Oleh karena Rd. Ayu Lasminigrat memiliki otak cerdas, kemauan keras, cita-cita tinggi dan tekun belajar, maka segala pengetahuan yang diperolehnya dengan cepat dapat dikuasainya, sehingga beliau merupakan wanita Sunda pertama yang fasih bercakap-cakap dalam bahasa Belanda dengan orang-orang Belanda yang ada di Garut waktu itu.[54]

Walaupun Rd. Ayu Lasminingrat memiliki harkat dan derajat cukup tinggi, baik di lingkungan hidup keluarga maupun dalam pengetahuan, tetapi semua itu tidak sepenuhnya membahagiakan hati beliau. Kehidupan kaum wanita Sunda/Jawa Barat pada khususnya dan wanita Indonesia pada umumnya, yang masih terbelenggu kebodohan akibat adat lama dan juga penjajahan, selalu menjadi bahan pemikiran beliau. Dalam hal ini beliau telah merasakan apa arti pendidikan dan pengetahuan bagi kehidupan manusia.

Atas dasar semua itu, Rd. Ayu Lasminingrat berusaha mendobrak adat lama yang tidak mengizinkan kaum wanita memperoleh pendidikan. Pada tahun 1907 beliau membuka "Sekolah Kautamaan Istri" di lingkungan Pendopo Garut, dengan mengambil tempat di ruang gamelan. Di "Sekolah" itu beliau mulai mendidik beberapa orang putri bangsawan dan anak-anak pesuruh yang ada di lingkungan kabupaten. Mereka dididik dan diajari membaca dan menulis serta berbagai keterampilan wanita.[55]

Pendirian sekolah tersebut selain disebabkan R. Ayu Lasminingrat memang memiliki sifat/jiwa pendidik dan menaruh perhatian besar terhadap pendidikan wanita, juga karena tergugah oleh gagasan-gagasan Rd. Dewi Sartika yang seringkali berkunjung kepadanya.[56]

Selain sebagai pendidik, Rd. Ayu Lasminingrat juga merupakan penulis wanita (sastrawati) angkatan pertama. Beberapa buah penanya berupa buku-buku bahasa Sunda antara lain Warnasari jilid I dan II, dicetak dan diterbitkan oleh Balai Pustaka dan dijadikan koleksi Perpustakaan Rakyat pada tiap-tiap Sekolah Dasar, untuk dipinjamkan kepada anak-anak sekolah dan umum.[57]

Buku-buku karya Lasmaningrat isinya memang memenuhi selera anak-anak dan enak pula dibaca. Hal ini disebabkan Lasminingrat mempunyai kemampuan tinggi dan pengetahuan luas, juga karena ia mahir berbahasa Belanda, salah satu bahasa asing Eropa yang waktu itu sangat berpengaruh dalam pergaulan dan bidang kehidupan lainnya, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Penguasaannya terhadap bahasa Belanda tidak terbatas hanya dalam bercakap-cakap dengan orang-orang Belanda ketika itu, sampai-sampai berbicara dengan Gubernur Jenderal pun dilakukannya dengan santai.[58]

Selain itu, pengetahuannya tentang bahasa Belanda digunakan pula untuk menerjemahkan buku-buku bahasa asing tersebut ke dalam bahasa Sunda. Sesuai dengan bakat pembawaan Lasminingrat yang menyenangi pendidikan anak-anak, maka dalam hal penerjemahannya itu lebih diutamakan buku-buku yang bertemakan pendidikan anak-anak.

Hal itu dilakukan dengan mengingat pula pada masa itu buku-buku bacaan untuk anak-anak dalam bahasa Sunda sangat langka, dan buku-buku ilmu pengetahuan yang ada di negeri kita kebanyakan ditulis dalam bahasa Belanda. Berkat usaha dan kegiatannya itu, maka tidaklah mengherankan bilamana pengetahuan Lasminingrat lebih unggul dari wanita-wanita lain pada waktu itu, terutama di daerahnya sendiri. Hal ini disebabkan

pula berkat pergaulannya dengan orang-orang pandai baik orang asing maupun bangsa sendiri.

Setelah Lasminingrat menikah dengan Bupati Garut, Rd. Adipati Aria Wiratanudatar VIII, pada tahun 1912 Lasminingrat mendirikan sekolah khusus untuk wanita dengan nama Sekolah Istri. Di samping memperhatikan pendidikan, Lasminingrat tetap melakukan kegiatan mengarang. Diterjemahkannya buku-buku berbahasa Belanda ke dalam bahasa Sunda, seperti Warnasari dari *Verhalen van Moeder de Gans*, Kulit Kalde dari Putri Bianca, dan lain-lain. Buku-buku tersebut disadurnya sedemikian rupa sehingga merupakan cerita berseling dangding (lagu Sunda klasik), mungkin supaya gampang dicerna oleh pembacanya yang saat itu kebanyakan masih rendah taraf pendidikannya.[59]

Atas jasa-jasanya itu Lasminingrat selain dianugerahi tanda penghargaan, juga memperoleh gaji dari pemerintah Hindia Belanda. Lasminingrat wafat pada tahun 1948 di Garut dalam usia 105 tahun. Selanjutnya sekolah-sekolahnya dilanjutkan oleh Nn. Rd. Purnamaningrat, murid Lasminingrat yang pertama dan masih anak dari adik sepupu Lasminingrat.[60]

4.2.1.3 Nyi Rd. Siti Djenab

Pada tahun 1890, untuk ketiga kalinya Pasundan mencatat sejarah yaitu lahirnya seorang putri dari keluarga bangsawan. Kali ini Cianjur mendapat giliran anugerah tokoh pendidikan setelah kota Bandung dan Garut. Pada tahun itu lahir seorang putri yang oleh orang tuanya diberi nama Nyi Rd. Siti Djenab. Beliau adalah putra ketiga dari delapan bersaudara. Ayahnya bernama Rd. Martadilaga, putra Rd. Dipamanggala, patih Purwakarta. Ibunya bernama Nyi Rd. Siti Mariah yang berasal dari Brebes Jawa Tengah. Saudara-saudara Nyi. Rd. Siti Djenab adalah : R.A. Abdurakhman (Bupati Mester I), Nyi Rd. Siti Aisah, Ir. R. H. Muh. Enoch (Insinyur praktek pertama di Indonesia), Nyi Rd. Siti Djenar (Komis I Kantor Pos Cianjur), Nyi Rd. Siti Rukiyah. R. Mustarom (Patih t.b. Kepala *Volksvoorlichtingdienst* di Kantor Keresidenan Bogor), Nyi Rd. Siti Kuraesin (Kepala Urusan Pegawai RS. CBZ Jakarta).

Pada tahun 1904, Siti Djenab lulus dari HIS, dalam usia 14 tahun itu Siti Djenab sudah menaruh perhatian terhadap bidang pendidikan, yaitu membantu mengajar (magang) pada Sekolah Dasar *(Tweede Inlandse School)* Joglo, Cianjur. Setelah dua tahun sebagai guru magang *(Kweekeling)* pada sekolah tersebut di atas, pada tahun 1906 Siti Djenab mulai mengajar di "Sakola Kautamaan Istri" yang didirikan oleh Bupati R. Muharam Wiranatakusumah, sebelum beliau dialihtugaskan ke Bandung. Sekolah Kautamaan Istri Cianjur ini merupakan perpaduan Sekolah Raden Dewi di Bandung dan Sekolah Kautamaan Istri di Garut. Sejak itu Siti Djenab mengabdi pada bidang pendidikan anak-anak gadis, bahkan beliau sempat menjadi pimpinan sekolah tersebut.

Siti Djenab menikah dengan Tb. Djatradijaya, guru HIS Cianjur. Dari perkawinannya, Siti Djenab dianugerahi lima orang putra yaitu : Tb. Akhmad Sudarsono, Tb. Akhmad Muhammad, Rd. Siti Rakhmat, Rd. Siti Harsini, dan Rd. Siti Khaeroni.

Rd. Siti Djenab, seperti juga Rd. Dewi Sartika dan Rd. Ayu Lasmingrat, walaupun telah berkeluarga dan mendapat banyak rintangan dari masyarakat, tetapi beliau dengan teguh terus berusaha melaksanakan cita-cita untuk memajukan kaumnya sampai beliau pensiun. Atas jasa-jasanya itu Siti Djenab dianugerahi Bintang *Oranje Nassau voor Vrouw en Verdienste* dari Pemerintah Hindia Belanda pada masa Gubernur General *Tjarda Van Starkenborg Stachouwer* memegang kekuasaan di Indonesia.

Pada tahun 1950 Siti Djenab pensiun. Setahun kemudian pada tanggal 28 Februari, 1951, ia meninggal. Ia telah mendarmabaktikan hidupnya di bidang pendidikan kaum wanita selama kurang lebih 46 tahun.[61]

4.2.1.4 Dr. Danoedirdjo Setia Budi

Dr. Danoedirdjo Setia Budi semula bernama Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, lahir pada tanggal 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur dari seorang ayah berdarah campuran *Vries* (Perancis dan Portugis), sedangkan ibunya berdarah campuran

Jerman (Wendis) dan Jawa. Ayahnya lahir di Amsterdam pada tanggal 9 September 1850, sedang ibunya kelahiran Pekalongan. Oleh karena Douwes Dekker dilahirkan dan dibesarkan di daerah Jawa, maka darah Jawa lebih kuat mempengaruhi sifat dan jiwanya.[62]

Demikianlah, Douwes Dekker melewatkan masa remajanya yang pertama di Jawa Timur. Selanjutnya ia pindah ke Jakarta dan mengikuti pendidikan di HBS. Setelah selesai dari pendidikan tersebut, dalam usia 18 tahun ia menjalani kariernya sebagai pegawai pada perkebunan kopi Soember Doeren di Gunung Semeru. Di tempat pekerjaannya ini ia selalu membela kaum buruh bangsa pribumi. Oleh karena itu ia dipecat oleh atasannya, R. Yesse. Kemudian ia menjadi "laboran" dan setelah itu ia menjadi ahli kimia pada pabrik gula Pajarahan dekat Kraksaan, Pasuruan. Di sinipun ia tidak lama bekerja karena dipecat dengan alasan yang sama (membela petani tebu). Akhirnya ia kembali ke Surabaya sebagai penganggur.[63]

Pada usia 20 tahun Douwes Dekker bergabung dengan petani Transvaal, menjadi sukarelawan pada Perang *Transvaalse Boeren* melawan penghianat-penghianat Inggris. Atas jasa-jasanya Douwes Dekker mendapat penghargaan dan diangkat menjadi warganegara Transvaal oleh Presiden Transvaal, Paul Kruger.Ia diangkat menjadi ajudan salah seorang perwira tinggi dengan pangkat perwira bawahan.[64]

Pada tahun 1902, ia ditahan dan dipenjarakan oleh orang-orang Inggris di Pretoria. Dari Pretoria dipindah ke penjara Rogania (Sailan) dan pada tahun 1903 ia dipindahkan ke penjara Colombo.[65]

Setelah ke luar dari penjara Douwes Dekker kembali ke Jawa sebagai penganggur. Kemudian ia terjun ke bidang jurnalistik dan bekerja pada beberapa surat kabar dan majalah, antara lain pada *De Locomotif* (Semarang di bawah pimpinan Mr. P. Brooshoofd dan Mr Vierhout, *Surabayas Handelsblad* di bawah pimpinan Mr. Van Geuns. Kemudian ia bekerja pada *Batavias Nieuwsblad* di bawah pimpinan Y.E. Stokvis. Karena pimpinan Bataviasch Neuwsblad diketahui tidak sealiran dengan Douwes Dekker, maka

Douwes Dekker keluar dari surat kabar tersebut, kemudian ia menerbitkan majalah sendiri, yaitu *Het Tijdschrift* dan *De Epress*. Majalah yang disebut terakhir kemudian menjadi media perjuangan *De Indische Party*, yang dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912 di bawah pimpinan dia sendiri.[66]

Pemerintah Hindia Belanda menganggap bahwa *Indische Party* adalah perkumpulan politik yang membahayakan ketentraman umum. Oleh karena itu pada bulan Maret 1913 partai tersebut dinyatakan sebagai partai terlarang, sedangkan para pemimpinnya (Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan Douwes Dekker) pada bulan Agustus 1913 dibuang ke Negeri Belanda.

Douwes Dekker untuk beberapa waktu lamanya menetap di Negeri Belanda, bahkan ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu Ekonomi dan Politik di Universitas Zurich dengan predikat cum laude.[67]

Pada tahun 1917 Douwes Dekker dengan keluarganya kembali ke Indonesia (Bandung). Antara tahun 1918 dan 1920 Douwes Dekker kembali ditahan dan dipenjarakan di penjara Banceuy, kemudian dipindahkan ke penjara pusat di Semarang, selanjutnya dipindah lagi ke penjara di Jalan Sipayer Jakarta. Sampai ia dibebaskan oleh Gubernur Graaf van Limburg Stirum.[68]

Sekeluarnya dari penjara Douwes Dekker bekerja pada lembaga pendidikan *Preanger Institut van de vereeneging Volksonderwijs* di Jalan Kebon Kalapa No. 17 Bandung, di bawah pimpinan Ny. Meyer Ellenbaas, dan Douwes Dekker diangkat sebagai direktur di Sekolah MULO. Maka dengan demikian Douwes Dekker mengabdikan dirinya pada lembaga pendidikan tersebut yang kemudian berganti nama menjadi "Kesatrian Institut", suatu pusat pendidikan untuk membentuk ksatria-ksatria Indonesia. Di tempat ini Douwes Dekker berkenalan dengan seorang guru wanita bernama Nn. A. Wassington dan kemudian menjadi istrinya.[69]

Ksatrian Institut bertujuan untuk memberi kesempatan yang luas kepada penduduk bumiputra untuk menuntut ilmu. Pelajaran

yang diberikan, di samping ilmu pengetahuan umum juga diberikan pelajaran keterampilan dan pengetahuan dagang dengan maksud bila mereka telah usai sekolah dapat berdiri sendiri.

Pada tahun 1938, Ksatrian Institut yang telah dibina dengan susah payah oleh Douwes Dekker, mendapat sorotan tajam dari pemerintah Hindia Belanda, karena adanya laporan-laporan negatif tentang lembaga pendidikan tersebut. Akhirnya pada tahun 1940, lembaga tersebut dibekukan. Pada tahun 1941 Douwes Dekker ditangkap, kemudian untuk kesekian kalinya menjalani hukuman penjara. Dari penjara yang satu ke penjara yang lain. Hukuman tersebut bukan hanya dijalani di Pulau Jawa, tetapi juga di luar negeri, termasuk Negeri Belanda, di mana ia mendapat perlindungan dari Perhimpunan Indonesia yang bertempat di Jalan *Willem Brouwersplein.*[70]

Pada tanggal 6 Desember 1946, dengan melalui beberapa rintangan Douwes Dekker kembali ke Indonesia dan dapat berkumpul lagi dengan keluarganya, yang selama 5 tahun berpisah. Tetapi pada tanggal 22 Desember 1948, Douwes Dekker ditangkap lagi oleh Belanda dan ditahan di Jogjakarta selama 5 hari. Pada tanggal 27 Desember 1948 Douwes Dekker yang telah dibawa ke Jakarta, dibebaskan. Douwes Dekker kemudian pulang ke rumahnya di Jalan Lembang (sekarang Jalan Dr. Setiabudi) No. 410 Bandung, dan berkumpul kembali dengan keluarganya sampai beliau menutup usia satu tahun setelah merayakan ulang tahun yang ke 70.[71]

4.2.1.5 Kiyai Haji Abdul Halim

Kiyai Haji Abdul Halim adalah seorang pemimpin gerakan pembaharuan di Majalengka yang kemudian gerakan tersebut berkembang menjadi Persyarikatan Ulama. Ia lahir di kampung Ciborelang Majalengka pada tahun 1887. Kedua orang tuanya adalah orang yang taat kepada agama, terpandang di masyarakat. Bahkan ayahnya, Kiyai Haji Abdul Halim adalah seorang penghulu di Jatiwangi, Cirebon.[72]

Sesuai dengan lingkungan keluarganya, Kiyai Haji Abdul Halim sejak kecil telah mendapat pendidikan agama dan belajar

di beberapa pesantren. Sejak berusia 10 tahun ia telah mempelajari Al Qur`an dan Hadist pada pesantren Kiyai Haji Anwar di kampung Ranji Wetan, Majalengka. Kemudian ia belajar pada Kiyai Haji Abdullah, di kampung Lontangjaya. Selanjutnya ia belajar di pesantren Bobos, Cirebon, pada Kiyai Haji Suja. Selanjutnya ia belajar pada Kiyai Haji Akhmad Saubari di pesantren Ciwedus, Cilimus (Kuningan), pada Kiyai Haji Agus, di salah satu pesantren di Kanayangan, Pekalongan. Dari Pekalongan ia kembali lagi ke Ciwedus. Demikianlah Abdul Halim memperdalam ilmu agama dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain. Pada tiap-tiap pesantren ia belajar selama satu sampai tiga tahun, sampai ia berusia 22 tahun.[73]

Sebagai seorang muslim yang taat, Abdul Hahm pergi ziarah ke Mekkah, untuk menunaikan rukun Islam kelima dan kemudian memperdalam agama Islam di sana. Selama tiga tahun Abdul Halim tinggal di kota suci Mekkah, Abdul Halim banyak mempelajari serta memperdalam karya tulis Abduh dan Al-Afghani. Pengetahuan yang telah diperolehnya itu sering dijadikan topik ceramah atau diskusi dengan teman-temannya yang kebanyakan orang-orang Sumatera. Pada waktu di Mekkah, Abdul Halim pernah bertemu dengan Haji Mas Mansyur, yang kemudian menjadi pimpinan Muhammadiyah. Sedangkan yang menjadi gurunya di Mekkah diantaranya termasuk Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Akhmad Khayyath. Ia sempat juga berkenalan dengan Kiyai Haji Abdul Wahab (pendiri Nahdlatul Ulama), yang sedang belajar di Mekkah.[74]

Pendidikan, pengetahuan dan pengalamannya selama itu, merupakan faktor utama yang mendorong Kiyai Haji Abdul Halim untuk menyelenggarakan pendidikan Islam di daerahnya. Oleh karena itu sekembalinya dari Mekkah (tahun 1911), Kiyai Haji Abdul Halim berniat untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatnya dari tanah suci, antara lain pengetahuan di bidang pendidikan, seperti yang telah ia lihat di Bab al-Salam dan di Jiddah, di mana pendidikan agama itu mempergunakan sistem halakah, yaitu sistem kelas yang menggunakan meja, kursi dan pelajarannya disusun berdasarkan kurikulum.

Faktor lain yang juga telah menambah semangat Kiyai Haji Abdul Halim untuk melaksanakan niatnya ialah sikap dan tindakan kaum priyayi yang menganggap rendah kepada keluarganya. Dalam hal ini Kiyai Haji Abdul Halim ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa tanpa kaum priyayi pun ia akan mampu membina masyarakat melalui pendidikan.[75]

Enam bulan sekembalinya dari Mekkah, Kiyai Haji Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi bernama Hayatul Qulub, yang bergerak di bidang ekonomi dan pendidikan. Tetapi ternyata organisasi ini tidak bertahan lama karena mendapat saingan berat dari para pedagang Cina. Bahkan kadang-kadang persaingan itu pecah menjadi pertengkaran, baik mulut maupun fisik. Kejadian-kejadian itu oleh pemerintah dianggap sebagai suatu gangguan keamanan. Hal tersebut terjadi sekitar tahun 1915 setelah organisasi Hayatul Qulub berjalan kurang lebih 4 tahun. Namun demikian aktivitias Hayatul Qulub pada prinsipnya tetap diteruskan, tetapi kini lebih dititikberatkan pada bidang pendidikan, bahkan ditingkatkan dengan dibentuknya sebuah organisi baru yang diberi nama Majlisul Ilmi.[76]

Pada tahun 1916 Kiyai Haji Abdul Halim beserta anggota masyarakat terkemuka, termasuk para penghulu dan para pembantunya, mendirikan sebuah madrasah yang disebut Jam'iyat I'anatul Muta'allimin, kemudian berubah menjadi Persyarikatan Ulama.

Setelah organisasi tersebut berkembang di Pulau Jawa dan Madura, maka sejak tahun 1930 Kiyai Haji Abdul Halim mendirikan lagi organisasi dan lembaga pendidikan lain, yaitu organisasi wanita Fatimiyah (1930) dan Sekolah Islam Shanti Ashrama (1932) di Majalengka. Semua organisasi tersebut berada di bawah pengawasan langsung Kiyai Haji Abdul Halim sampai beliau meninggal pada tahun 1962 dalam usia 75 tahun.[77]

4.2.1.6 Kiyai Haji Akhmad Hassan

Akhmad Hassan dilahirkan di Singapur pada tahun 1887. Ayahnya bernama Akhmad berasal dari India dan bergelar pandit.

Ayah Akhmad Hassan biasa juga mendapat panggilan Sinna Vappu Maricar. Ia adalah seorang pengarang dalam bahasa Tamil dan pemimpin surat kabar "Nurul Islam" di Singapur. Ibunya bernama Muznah berasal dari Palekat Madras, tetapi lahir di Surabaya. Akhmad bertemu dengan Muznah di Surabaya ketika Akhmad berdagang di kota ini. Setelah menikah kemudian mereka menetap di Singapur.[78]

Sekitar umur tujuh tahun, Hassan belajar Al-Qur'an dan agama kemudian masuk Sekolah Melayu. Di sekolah ini ia belajar bahasa Arab, Tamil, dan Inggris.[79]

Karena sesuatu hal, Hassan tidak menamatkan sekolah. Kemudian Hassan membantu ayahnya bekerja di percetakan. Pada umur 12 tahun ia bekerja pada sebuah toko kepunyaan iparnya, sambil belajar mengaji pada Haji Ahmad Bukittiung dan Muhammad Thaib seorang guru yang terkenal di Minto Road, Singapur. Pelajaran yang diterima Hassan dari Haji Ahmad Bukittiung adalah cara-cara wudlu, sembahyang, dan puasa. Sedang dari Muhammad Thaib, Hassan memperoleh pelajaran Nahwu dan Sharaf. Ketika Muhammad Thaib pergi ke Mekkah, Hassan pindah belajar kepada Said Zbdullah Al-Musawi. Di sini Hassan hanya semata-mata belajar bahasa Arab selama tiga tahun. Di samping itu Hassan belajar agama pada Abdul Lathif, seorang yang terkenal di Malaka dan Singapur. Kemudian Hassan belajar pada Syekh Hassan dan Syekh Ibrahim. Semua itu ditempuh sampai tahun 1910 sambil melakukan berbagai macam pekerjaan antara lain sebagai pelayan toko, berdagang permata, minyak wangi, es, mengerjakan vulkanisir ban mobil dan kita-kira setahun sebagai kerani di *Jiddah Pilgrim's Office*, yaitu sebuah kantor yang mengurus perjalanan haji.[80]

Selanjutnya Hassan menjadi guru madrasah orang-orang India di Arab Street, Bagdad Street, dan Geylang, sampai sekitar tahun 1913. Kemudian ia menjadi guru tetap (menggantikan Padlullah Suhaimi) di Madrasah Assegaf, Jalan Suthan. Madrasah ini bertingkat Ibtida'iyyah dan Tsanawiyyah. Sekitar tahun 1912--1913 ia membantu "Utusan Melayu" yang diterbitkan oleh Singapore Press, dipimpin oleh Inche Hamid dan Sa'dullah

Khan. Pada waktu itu Hassan banyak menulis tentang pengetahuan agama yang bersifat nasihat-nasihat, anjuran berbuat baik dan mencegah kejahatan. Ia sering mengetengahkan persoalan-persoalan ini dalam bentuk sya'ir.[81]

Pada tahun 1921 Hassan berangkat ke Surabaya untuk berdagang mengurus sebuah toko milik pamannya, Abdul Lathif di kota itu. Pada mulanya niat Hassan semata-mata untuk mengurus perdagangan. Tetapi setelah dia bertemu dengan A. Wahab Hasbullah, pendirian Hassan berubah dan menaruh perhatian terhadap pendidikan Islam, lebih-lebih setelah bergaul rapat dengan Faqih Hasyim dari Kaum Muda.[82]

Pada tahun 1924 Hassan berangkat ke Bandung untuk belajar di sekolah pertenunan. Di Bandung Hassan tinggal pada keluarga Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persatuan Islam (Persis). Pergaulan Hassan dengan keluarga Persis itu telah menyebabkan ia memasuki organisasi tersebut pada tahun 1926, tiga tahun setelah organisasi itu berdiri[83], bahkan kemudian ia menjadi salah seorang tokohnya.

Sebagai salah seorang yang mempunyai peranan besar dalam Persatuan Islam, Hassan mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang beberapa masalah yang berkenaan dengan agama Islam dan dipandang penting untuk ditegaskan pada masa awal perkembangan Persatuan Islam. Hassan berpendapat bahwa dalam beribadah kepada Allah, seseorang harus melakukannya persis seperti apa yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadist yang dicontohkan oleh Nabi, tanpa tambahan atau pengurangan. Oleh. karena itu Hassan menolak bacaan "ushalli" untuk memulai sembahyang, bacaan "wabihamdih" dalam tasbih ruku dan sujud, bacaan "sayyidina" dalam syalawat tasyahhud, dan do'a qunut selain qunut nazilah, serta "qadlaussalah" yakni menunda sembahyang, karena semua itu tidak berdasar keterangan agama, dan haram untuk dikerjakan. Demikian pula upacara-upacara seperti talqin mayat pada waktu penguburannya, jamuan makan dan tahlil di rumah keluarga yang kematian, membaca maulid sambil berdiri, dan upacara tujuh bulan bagi orang hamil atau tingkeban. menurut Hassan adalah bid'ah.[84]

Pandangan Hassan tentang bid'ah ini sekaligus merupakan seruan kepada umat Islam untuk melihat kembali cara mereka melaksanakan ajaran Islam. Tentu saja hal ini mengundang beberapa tanggapan karena menyangkut suatu tradisi yang telah mapan di kalangan orang-orang Persis waktu itu dan masyarakat Islam pada umumnya. Banyak diantara anggota masyarakat Islam yang mengajukan alasan kenapa mereka melakukan amalan tersebut di atas. Namun demikian mereka pun meninjau kembali terhadap amalan yang selama itu biasa mereka lakukan.[85]

Pada tahun 1911, Hassan menikah di Singapura dengan Mariyam, seorang peranakan Tamil-Melayu dari keluarga pedagang dan pemeluk agama yang taat. Dari perkawinannya itu Hassan beroleh putra 7 orang (Abdul Qadir, Jamilah, Abdul Hakim, Zulaiha, Ahmad, M. Said, dan Manshur). Semua anak-anaknya dididik sendiri di sekolah Persatuan Islam

Pada tahun 1940 Hassan pindah ke Bangil dan menetap di sana sampai meninggal pada tanggal 10 Nopember 1958 dalam usia 71 tahun.[86]

4.2.2 Kelembagaan

4.2.2.1 Sekolah Rd. Dewi Sartika

Seperti telah disinggung di muka (sub bab 4.2.1 halaman). Sekolah Raden Dewi Sartika semula bernama "Sakola Istri" yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika pada tanggal 16 Januari 1904, bertempat di Paseban Kulon.[87] Sekolah ini merupakan sekolah pertama bagi gadis-gadis Indonesia. Pada waktu berdirinya sekolah tersebut hanya memiliki dua ruangan untuk belajar. Muridnya berjumlah 20 orang, dengan 3 orang tenaga pengajar, yaitu Rd. Dewi Sartika sendiri, Ibu Purma, dan Ibu Uwit.

Kurikulum yang diberikan di sekolah pimpinan Rd. Dewi Sartika ini disesuaikan dengan kurikulum Sekolah Kelas Dua *(Tweede Klasse Inlandse School)* milik pemerintah, tetapi ditambah dengan mata pelajaran keterampilan yang sesuai dengan kodrat wanita, seperti : memasak, mencuci, menyeterika,

membatik, menjahit, menisik, merenda, menyulam, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kepentingan rumah tangga. Selain itu diajarkan pula pelajaran agama, kesehatan, bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Pelajaran-pelajaran tersebut tidak hanya diberikan secara teori, akan tetapi diberikan juga dalam bentuk praktek.[88]

Perkembangan Sakola Istri cukup pesat. Pada tahun 1905, ruang belajar di Paseban Kulon sudah tidak memadai lagi, sebab jumlah muridnya meningkat. Oleh karena itu sekolah dipindahkan ke jalan Ciguriang, yang bangunannya lebih luas dan gurunya pun ditambah pula. Untuk mengimbangi makin bertambahnya murid, empat tahun kemudian yaitu pada tahun 1909 bangunan sekolah diperluas lagi sehingga menghadap ke Jalan Kebon Cau (sekarang Jalan Kautamaan Istri).[89]

Setelah dapat mengatasi segala tantangan yang ada, akhirnya dalam tahun itu juga (1909) sekolah itu baru dapat mengeluarkan lulusan pertama dengan mendapat ijazah. Pada tahun berikutnya (1910) nama sekolah itu diganti menjadi "Sakola Dewi Sartika". Pada tahun 1911 sekolah ini telah memiliki 5 kelas.[90]

"Sakola Dewi Sartika" tersebar di pelbagai kota kabupaten, antara lain di Garut, Tasikmalaya, dan Purwakarta. Pada tahun 1912 di Jawa Barat (Pasundan) ada 9 Sekolah Gadis (sekolah yang serupa) yang berarti 50% dari seluruh jumlah sekolah yang ada di Pasundan (Jawa Barat) pada waktu itu.[91] Murid-muridnya bukan saja anak-anak wanita dari kota, tapi banyak juga yang datang dari kewadanan dan kecamatan.

Pada tahun 1914, nama sekolah itu diganti lagi dengan nama "Sakola Kautamaan Istri", guna mendekati tujuan pendidikan di sekolah tersebut, yakni menghasilkan wanita utama. Pada waktu itu murid-muridnya makin bertambah banyak, bukan saja gadis-gadis yang berasal dari Bandung dan sekitarnya (Jawa Barat), tetapi ada pula yang datang dari Sumatra. Beberapa orang gadis dari Bukittinggi, setelah mereka menyelesaikan pendidikan di Sekola Kautamaan Istri Bandung, mereka pulang dan kemudian mendirikan Sekolah Keutamaan Istri di kampung halamannya.[92]

Sejak tahun 1920, tiap-tiap kabupaten di seluruh Jawa Barat sudah mempunyai Sekolah Keutamaan Istri.[93] Kemajuan sekolah ini mengundang perhatian masyarakat, termasuk pemerintah. Beberapa orang pejabat pemerintahan memerlukan datang untuk melihat sendiri dari dekat keadaan dan kemajuan sekolah itu, diantaranya Tuan Idenberg, Ny. Limburg van Stirumi, Ny. Tjarda van Starkenberg Stachouwer istri Gubernur Jenderal Hindia Belanda serta putrinya. Hal ini membuka jalan bagi sekolah itu untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Kunjungan ini telah mempertebal kepercayaan diri dan mempertinggi semangat Raden Dewi Sartika dalam membina sekolahnya.[94]

Atas usul Ny. Hillen dan Ny. Tijdeman yang sempat menghadiri perayaan ulang tahun ke-25 sekolah tersebut (16 Januari 1929), Pemerintah Hindia Belanda memberikan sumbangan sebuah sekolah baru yang mulai dipakai pada bulan September 1929. Sedangkan Rd. Dewi sendiri dianugerahi tanda jasa "Bintang Perak". Pada waktu itu sekolah tersebut telah memiliki 6 kelas, 3 kelas bagian atas dan 3 kelas bagian bawah. Di bagian bawah digunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar sedang di bagian atas bahasa pengantarnya bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Pelajarannya ditambah lagi dengan ilmu kesehatan, diantaranya cara mengurus bayi dan membuat makanan sehat yang diberikan kepada murid-murid kelas 6. Masalah tersebut diajarkan oleh Kepala Perawat Rumah sakit Emmanuel bernama L. van Arkela, seorang bangsa Belanda yang diangkat menjadi guru PPPK. Selain itu ditambahkan pula pelajaran senam, etika/sopan-santun, meskipun pelajaran tersebut sebenarnya tidak terdapat dalam rencana pelajaran/kurikulum sekolah dasar waktu itu.[95]

Demikianlah Rd. Dewi Sartika membina sekolahnya guna mendidik gadis-gadis agar kaum wanita Indonesia mencapai kemajuan dalam berbagai bidang tanpa melupakan kodratnya, sehingga mereka senantiasa menjadi "istri binangkit", ibu teladan, pendidik utama generasi penerus. Atas dasar itu, maka selanjutnya nama sekolah diubah lagi menjadi "Sekola Raden Dewi".[96]

Pada akhir masa belajar, biasanya bulan Sya'ban menjelang Ramadhan, diadakan perayaan perpisahan dengan murid-murid yang lulus dan mendapat ijazah. Dalam perayaan itu diundang para pejabat pemerintah, orang tua murid, dan anggota masyarakat lainnya. Salah satu acara perayaan itu ialah mendemontrasikan kepandaian murid-murid berupa pertunjukkan kesenian seperti sandiwara (toneel), tari-tarian, menyanyi, dan, pameran hasil kerajinan (menggambar, membatik, merenda, menyulam, menjahit, dan kerajinan tangan lainnya). Sedangkan jamuan yang dihidangkan kepada para tamu adalah hasil memasak murid-murid sekolah itu sendiri. Dengan cara begini maka minat para orang tua untuk memasukkan anaknya dan minat anak sendiri untuk masuk di sekolah makin meningkat.[97]

Sambutan luar biasa dari masyarakat dan pemerintah terjadi pada perayaan ulang tahun ke-35 (1939) sekolah ini. Beberapa orang pejabat pemerintahan (Bupati Bandung, Ny Residen Tacoma), tokoh masyarakat (Prof, Boostra, Atmadinata, Kosasih Surakusumah) dan utusan organisasi wanita (Pasundan Istri Kaum Wanita Palembang) memberi kata sambutan pada perayaan itu. Hal ini membuktikan betapa usaha-usaha Raden Dewi Sartika untuk memajukan kaumnya dihargai dan diterima baik oleh masyarakat maupun pemerintah pada waktu itu.[98] Itulah sebabnya Rd. Dewi Sartika pada tahun 1940 mendapat tanda jasa kerajaan sebagai "Ridder in de orde van Oranje Nassau" untuk pengabdiannya sebagai pendidik pertama anak-anak gadis.[99]

4.2.2.2 Sekolah Keutamaan Istri Lasminingrat

Kurang lebih tiga tahun setelah Rd. Dewi Sartika mendirikan "Sakola Istri" di Bandung, maka pada tahun 1907 Rd. Ayu Lasminingrat membuka "Sakola Kautamaan Istri" di Garut, dengan mengambil tempat di ruang gamelan kabupaten.[100]

Usaha untuk membuka sekolah ini tidak banyak menemui kesulitan seperti pendirian "Sakola Istri" Rd. Dewi Sartika. Hal ini disebabkan Rd. Ayu Lasminingrat seorang istri bupati (Bupati Garut, R.A.A. Wiratanudatar VIII) yang berwibawa dan disegani, serta mendapat bantuan dari pejabat-pejabat pemerintah berkedudukan tinggi.[101]

Namun demikian dalam hal mendapatkan murid ternyata tidaklah mudah. Hal ini terutama disebabkan oleh pengaruh adat lama yang beranggapan bahwa kaum wanita tidak perlu memperoleh pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, Rd. Ayu Lasminingrat pertama-tama mengerahkan anak-anak gadis sanak familinya dan anak-anak gadis para pegawai negeri untuk menjadi murid sekolah yang didirikannya.[102]

Demikian pula tenaga pengajarnya, adalah keluarga Rd. Ayu Lasminingrat, yaitu Surianingrum (kemenakan), Rd. Rajakusumah (cucu) dan Murtiah (seorang guru yang didatangkan dari Bandung).[103]

Pelajaran di sekolah ini pada dasarnya sama dengan pelajaran yang diberikan pada sekolah Rd. Dewi Sartika, yaitu menulis, membaca dan keterampilan wanita, seperti menjahit, menyulam, merenda, membordel, merajut, membatik, dan kerajinan tangan wanita lainnya, seperti membuat hiasan dari kerangka daun-daunan dan serat nenas yang telah diberi warna; membuat taplak meja, alas duduk, badingkut (selimut), dan lain-lain dari guntingan-guntingan kain sisa jahitan; dan lain-lain.[104]

Untuk memperkuat status sekolah tersebut, Rd. Ayu Lasminingrat ditemani oleh Dokter Meulder menghadap Gubernur Jenderal di Istana Bogor untuk memohon restu pendirian sekolah gadis itu. Usaha Rd. Ayu Lasminingrat berhasil dan sekolah tersebut disahkan sebagai suatu organisasi yang disebut *Vereeneging Kautamaan Istri Schoalen* dengan akte nomor 12 tanggal 12 Februari 1913. Dengan adanya pengesahan dari Pemerintah Hindia Belanda itu, maka jumlah Sakola Kautamaan Istri kemudian menjadi berkembang. Di kota Garut bertambah menjadi dua buah sekolah. Selanjutnya sekolah yang sama/sejenis berdiri pula di Distrik Tarogong, Cikajang, Bayongbong, dan di kota-kota lain di Jawa Barat, seperti di Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi Cicurug, Purwakarta, dan Rangkasbitung.[105]

Demikianlah "Sakola Kautamaan Istri" Lasminingrat berkembang bersama-sama dengan dipimpin oleh Dewi Sartika, bahkan ada kalanya Sakola Kautamaan Istri disuatu tempat

merupakan perpaduan antara sekolah Lasminingrat dengan sekolah Dewi Sartika.

4.2.2.3 Sekolah Siti Jenab

Pada tahun 1906 di Cianjur dibuka "Sakola Kautamaan Istri" yang didirikan oleh Bupati R. Muharam Wiranatakusumah sebelum beliau dipindahkan ke Bandung. Sekolah ini bertempat di Kampung Joglo, tidak jauh dari gedung Kabupaten Cianjur, dan dipimpin oleh Siti Jenab. Sekolah Kautamaan Istri di Cianjur ini merupakan perpaduan antara "Sakola Istri" Raden Dewi Sartika dengan "Sekola Kautamaan Istri" Lasminingrat.[106]

Pada permulaan pembukaan sekolah tersebut, banyak sekali cemoohan dan ejekan, terutama dari orang-orang yang fanatik agama. Tetapi Siti Jenab sebagai seorang guru dan pimpinan sekolah tersebut, tetap teguh dan berusaha terus menerobos segala rintangan.

"Sakola Kautamaan Istri" dengan lama pendidikan 3 tahun di Cianjur itu merupakan *Meisje Vervolg School*, oleh karena itu murid-murid yang diterima di sekolah tersebut adalah anak-anak gadis yang telah tamat Sekolah Dasar 3 Tahun. Dengan kata lain, "Sakola Kautamaan Istri" Cianjur adalah sekolah lanjutan dari Sekolah Dasar 3 Tahun. Dengan demikian, murid-murid yang diterima di sekolah itu langsung masuk di kelas IV.[107] Pelajaran yang diberikan pada dasarnya sama dengan pelajaran di Sekolah Raden Dewi, yaitu berhitung, menulis, bahasa Sunda, bahasa Belanda, bahasa Melayu, budipekerti, agama, dan pengetahuan/ keterampilan wanita, seperti membatik (biasa dikerjakan di rumah Siti Jenab), merenda, lanjutan dari : .... Merenda, dan lain-lain.[108]

Pertamakali "Sekola Kautamaan Istri" Cianjur pimpinan Siti Djenab memiliki murid sebanyak 27 orang, tetapi kemudian jumlah murid terus meningkat. Banyak murid lulusan Sekolah Kautamaan Istri Cianjur yang meneruskan sekolah ke Van Deventer School di Bandung, diantaranya Najmiati, Sarimaya, Kania, Romah Sutresna, Nunung Kurniasih, dan lain-lain. Bahkan

Najmiati setelah tamat dari *Van Deventer School*, melanjutkan ke *Kweekschool* di Salatiga.[109]

Sekarang, gedung sekolah tersebut di atas tetap berdiri di tempat semula, tetapi namanya pernah berganti-ganti. Pada zaman Jepang nama sekolah diganti menjadi Sekolah Rakyat Gadis. Setelah kemerdekaan namanya berubah menjadi Sekolah Rakyat, kemudian diganti lagi menjadi Sekolah Dasar St. Jenab, sampai sekarang.[110]

4.2.2.4 Bale Pawulangan Pasundan

Bale Pawulangan Pasundan adalah suatu badan yang dibentuk oleh Komisi Pengajaran Pasundan, dengan maksud untuk melaksanakan tujuan utama Paguyuban Pasundan, Oleh karena itu, sebelum membicarakan Bab Pawulangan Pasundan, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu sedikit tentang Paguyuban Pasundan, terutama mengenai perhatiannya terhadap bidang pendidikan dan pengajaran.

Paguyuban Pasundan didirikan pada tanggal 22 September 1914 di Batavia (Jakarta), dengan tujuan memajukan rakyat Sunda agar bertambah sejahtera, kuat dan hidup bahagia.[111]

Salah satu jalan yang ditempuh oleh Paguyuban Pasundan untuk mencapai tujuannya ialah melalui pendidikan dan pengajaran. Dalam hal ini Paguyuban Pasundan akan berusaha memperbanyak sekolah dan memperbaiki pengajaran. Di samping itu Paguyuban Pasundan juga akan membangkitkan minat suku bangsa Sunda terhadap sejarahnya dan terhadap pengetahuan kehidupan rakyat di daerah Pasundan, serta mempelajari dan memajukan pengetahuan bahasa Belanda, yang erat hubungannya dengan masalah pendidikan dan pengajaran.[112]

Untuk merealisasikan semua rencana tersebut Paguyuban Pasundan melalui komisi pengajarannya yang diketuai oleh R.L. Djajadiningrat kemudian membentuk dua buah badan, yaitu *Committee Studiefonds Pasundan dan Bale Pawulangan Pasundan*.

1. *Committee Studiefonds* Pasundan

Pengurus *Committee Studiefonds* atau *Komite*/Badan Dana Pelajar Pasundan terdiri atas :

Ketua	:	Roestamie
Wakil Ketua	:	Emo
Sekretaris	:	Karmadja
Komisaris	:	Soetisnasendjaja, Kartabrata. A. Wirasasmita, Sanoesi, dan H. Alex.[113]

Komite ini dibentuk dengan maksud untuk membantu murid-murid yang cerdas tetapi tidak mampu dalam hal biaya sekolah.[114] Dalam hal ini komite memberi bantuan kepada murid-murid keluaran MULO yang akan melanjutkan studinya. Biaya tersebut diperoleh komite dengan cara mengadakan pertunjukkan sandiwara, pertandingan sepak bola, lomba nyanyi kroncong, menerbitkan buku (misalnya buku Jaka Umbara), dan mencari hadiah atau sumbangan antara lain sumbangan uang dari Paguyuban Pasundan Cabang Purwakarta), Selain itu komite juga membantu anak-anak sekolah dengan menyediakan fasilitas akomodasi berupa asrama. Misalnya, asrama di Jalan Ciguriang 33 Bandung di bawah pengawasan R. Ema Bratakoesoema, yang dibuka pada tanggal 15 Agustus 1922.[115]

2. Bale Pawulangan Pasundan

Bale Pawulangan Pasundan diketuai oleh Ahmad Atmadja. Badan ini bertugas khusus untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang pendidikan dan pengajaran.

Tujuan Bale Pawulangan Pasundan adalah :

a. Melahirkan bangsa yang utama, dan berbudi pekerti luhur.
b. Menjunjung taraf kehidupan rakyat dengan jalan memberi kesempatan secara luas untuk mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik bagi orang-orang yang berhasrat menyekolahkan anak-anaknya.

c. Membendung masuknya kebudayaan Barat dan mempertebal rasa kesundaan, rasa kebangsaan Indonesia pada umumnya.[116]

Untuk mencapai tujuan Bale Pawulangan Pasundan khususnya dan Paguyuban Pasundan pada umumnya, maka Bale Pawulangan Pasundan menitikberatkan kegiatannya pada pendidik/pembangunan sekolah-sekolah. Hal itu dilakukan dengan mengingat, *pertama*, sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah dan badan swasta sangat berkurang (tidak mencukupi kebutuhan masyarakat) dan tidak memberi kesempatan kepada rakyat biasa untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran; *kedua*, jumlah penduduk, termasuk anak usia sekolah yang buta huruf, terutama di desa-desa masih sangat banyak, namun demikian hasrat untuk bersekolah di kalangan masyarakat pada waktu itu (tahun 1920-an) telah berkembang luas, hanya mereka merasa susah untuk mencari sekolah yang dimasukinya. Hal ini pernah dikemukakan oleh anggota Volksraad (Dewan Rakyat) wakil Paguyuban Pasundan dalam suatu sidang dewan tersebut, ".... bahwa pengajaran di Indonesia, sebagai makanan mental untuk masyarakat, pada dasarnya tidak lain daripada makanan yang menimbulkan kelaparan pada rakyat Indonesia".[117] Faktor ketiga ialah bahwa program sekolah-sekolah pemerintah hampir 100% melaksanakan program sekolah Belanda, sehingga menutup kemungkinan bagi masyarakat Pasundan khususnya, masyarakat Indonesia umumnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan sendiri.[118]

Atas dasar itu pada tahun 1924 Bale Pawulangan Pasundan giat mendirikan berbagai macam sekolah yang diawali dengan pembukaan HIS bersubsidi di Tasikmalaya. Enam tahun kemudian (1930) didirikan MULO bersubsidi, juga di Tasikmalaya.

Demikian sejak itu Bale Pawulangan Pasundan giat mendirikan berbagai macam sekolah swasta (sekolah Pasundan) di Jawa Barat. Kurikulum pada sekolah-sekolah

Pasundan terdiri atas: pengetahuan umum, bahasa Sunda, bahasa Belanda, pendidikan agama, kesenian Sunda (diantaranya pencak silat) dan lain-lain pengetahuan yang pada dasarnya sama dengan pelajaran yang diberikan pada sekolah-sekolah pemerintah yang sederajat. Dengan kurikulum ini anak didik diharapkan dapat menyadari dan bagaimana merasakan tinggi nilai kebudayaan Sunda.[119]

Perlu dikemukakan di sini bahwa antara tahun 1931-1938 Pemerintah Hindia Belanda tidak mendirikan lagi sekolah-sekolah bersubsidi, malahan justru akan mengeluarkan *Wildescholen Ordonnatie* yaitu undang-undang mengenai urusan sekolah-sekolah partikelir yang oleh pemerintah jajahan disebut "sekolah liar".[120]

Hal ini menimbulkan reaksi yang hebat di kalangan masyarakat, baik dari kalangan yang bergerak di bidang sosial, maupun dari kalangan yang bergerak di bidang politik. Pada tanggal 18 september 1932, para penentang ordonnantie itu mengadakan kongres di Bandung yang memprotes tindakan pemerintah mengeluarkan ordonnansi tersebut. Dalam hal ini Paguyuban Pasundan termasuk pihak yang paling gigih mengajukan protes, sekalipun kegiatan Paguyuban Pasundan dalam bidang pendidikan sedikit kemungkinannya terkena ordonnatie tersebut, sebab sekolah-sekolah yang didirikan Paguyuban Pasundan (Bale Pawulangan Pasundan) pada umumnya memenuhi syarat, bahkan diakui dan diberi subsidi oleh pemerintah. Oleh karena itu Paguyuban Pasundan bertekad untuk terus mendirikan sekolah-sekolah walaupun tanpa subsidi dari pemerintah[121], seperti telah ditetapkan dalam kongresnya di Bogor pada tahun 1930, bahwa Bale Pawulangan Pasundan akan terus mendirikan sekolah-sekolah dan terus bekerja dalam bidangnya, mengurus dan menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran.[122]

Demikianlah, antara tahun 1939-1940, di seluruh Jawa Barat terdapat kurang lebih 48 sekolah yang telah didirikan

oleh Bale Pawulangan Pasundan, antara lain : HIS di Tasikmalaya, Bandung, Ciparay, Purwakarta, Bogor, Sukabumi, Arjawinangun, Cirebon (HIS sore); MULO afd. der AMS di Tasikmalaya; *Standaard School* di Mr. Cornelis (Jatinegara), Schakel school di Kuningan dan Sukabumi, dan lain-lain sekolah *(Kweekschool dan Handelschool)*. Selain itu dibuka pula kursus-kursus, seperti *Schakel Cursus* dan Kursus K.E. di Tasikmalaya dan Purwakarta; *School Cursus* dan Kursus Ambtenaar di Sukabumi; Schakel Kursus dan Kursus Bahasa Belanda dan Inggris di Subang. Demikian pula dibeberapa kota di Jawa Barat lainnya, seperti di Sumedang, Cianjur Cikajang (Garut), Leles (Garut), Ciamis, dan Majalengka, terdapat sekolah-sekolah yang didirikan oleh Bale Pawulangan Pasundan.[123]

Dari sekian banyak sekolah-sekolah yang telah didirikan oleh Bale Pawulangan Pasundan, 20 sekolah diantaranya mendapat subsidi dari pemerintah.

4.2.2.5 Ksatrian Instituut

Ksatrian Instituut dibuka oleh Dr. E.F.E. Douwes Dekker yang terkenal pula dengan nama Dr. Danudirdjo Setiabudi, bekas salah seorang pemimpin *Indische Partij*. Lembaga pendidikan ini merupakan kelanjutan dari sebuah sekolah swasta di Jalan Kebun Kalapa 17 Bandung yang dipimpin oleh Ny. H.F. Mayer-Elenbaas.

Seperti telah dikemukakan, bahwa setelah keluar dari penjara di Jakarta. Douwes Dekker berusaha untuk dapat bekerja pada sekolah pimpinan Ny. Mayer. Hal ini diberitahukan kepada Residen Priangan. Residen kemudian mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum untuk meminta pertimbangan dan menyatakan keberatan Residen atas maksud Douwes Dekker, dengan mengingat suami Ny. Mayer tercatat sebagai seorang komunis.[124] Dalam hal ini rupanya Residen khawatir seandainya Dekker bekerja bersama Ny. Mayer. maka bisa-bisa Douwes Dekker mendapat pengaruh komunis, sehingga ia bergerak menentang pemerintah.

Akan tetapi Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum ternyata berpendapat lain.Melalui surat rahasia tanggal 15 Januari 1921, Gubernur Jenderal menyatakan bahwa "bagi seorang yang mengalami tekanan batin seperti Douwes Dekker, lebih baik diberi kesempatan untuk mendapatkan nafkah secara legal daripada menghasut rakyat".[125]

Dengan adanya pernyataan Gubernur Jenderal itu, maka Residen Priangan pun tidak berkeberatan lagi atas maksud Douwes Dekker tersebut di atas. Demikianlah sejak bulan September 1922 Douwes Dekker diperkenankan bekerja pada sekolah Ny. Mayer dan diangkat sebagai guru.[126] Sejak itulah Douwes Dekker mencurahkan perhatian dan mengabdikan diri sepenuhnya terhadap bidang pendidikan, dengan cita-cita ingin membantu pendidikan rakyat Bumiputera.

Kurang lebih satu tahun kemudian (1923), sekolah Ny. Mayer berganti nama menjadi *Prianger Instituut van de Vereeniging Colksonderwijs* (Institut Priangan dari Perserikatan Pendidikan Rakyat), dan Douwes Dekker diangkat menjadi direktur MULO dari lembaga pendidikan tersebut.[127]

Dengan kedudukan itu, Douwes Dekker dapat berperan lebih aktif. Hal ini terlihat jelas dari tujuan dibukanya Institut Priangan, yaitu untuk memberi kesempatan belajar yang lebih baik dan luas kepada anak-anak Bumiputera.

Kurikulum di sekolah rendah yang berada di bawah Institut Priangan disesuaikan dengan ELS (tidak dengan HIS) ditambah bahasa Belanda, itupun dilaksanakan atas desakan orang tua murid. Douwes Dekker sendiri sebenarnya tidak setuju kurikulum kedua sekolah pemerintah itu, karena dianggapnya tidak berdiri di atas dasar nasional. Douwes Dekker menghendaki pendidikan di sekolahnya lebih ditekankan pada pembinaan sikap hidup anak didik agar memiliki harga diri dan kesadaran nasional yang kuat. Pendirian Douwes Dekker itu pernah dikemukakan dalam salah satu suratnya kepada seorang kawan di Karawang :

> Yang terpenting di dalam sekolahku ialah adaya rasa harga diri manusia dan kepercayaan kepada diri sendiri

diajarkan sebagai bagian pendidikan untuk membina watak batin sekolah itu dan berbeda dengan sekolah-sekolah penjajah.[128]

Atas dasar itulah maka pada bulan Nopember 1924, Douwes Dekker mengubah Institut Priangan menjadi Ksatrian Institut. Tujuan dibukanya lembaga pendidikan baru itu dirumuskan sebagai berikut :

> Dalam arti susila, maka pengajaran selalu bertalian dengan kegembiraan hidup dan diarahkan untuk memperkuat dan menciptakan rasa harga diri, pengembangan inisiatif dan kesadaran kemerdekaan, meninggikan peradaban sendiri, satu dan lain hal berdasarkan rasa cinta kepada lingkungannya, tanah air dan bangsanya sendiri dan kemudian kepada kemanusiaan.
> Dalam arti kecerdasan otak, maka pengajaran terutama ditujukan untuk menambah pengetahuan tentang sumber-sumber bantu bagi perkembangan tanah air sendiri dan tentang kemungkinan-kemungkinan membangun apa yang berguna dan terhormat di masa mendatang.
> Pelaksanaan pengajaran akan bebas dari pengaruh agama dan rencana ketatanegaraan partai politik.[129]

Rumusan di atas menunjukkan bahwa Ksatrian Institut dititik beratkan pada pengajaran berdasarkan jiwa nasional dan pendidikan ke arah manusia yang berpikiran merdeka. Dengan kata lain, Ksatrian Institut merupakan lembaga pendidikan yang bernafaskan perjuangan pergerakan nasional. Hal ini tercermin pula dari tulisan P.F. Dahler dalam harian *Bintang Timoer* yang menegaskan bahwa Instituut itu bernama Ksatria, tempatnya para ksatria-ksatria kita. Seluruh Instituut bernafaskan kekuatan, semangat dan idealisme tak mengenal luntur dari Douwes Dekker.[130]

Untuk menunjang tercapainya maksud dan tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Ksatrian Instituut, maka gedung-gedung sekolah dari lembaga pendidikan itu dibangun sesuai dengan persyaratan kesehatan. Demikian pula kesehatan murid-muridnya selalu berada di bawah pengawasan dokter khusus. Di sekolah, murid-murid mendapat sarapan pagi yang cukup bergizi, sebab "tak akan ada jiwa yang sehat di dalam tubuh yang sakit".

Sekolah-sekolah rendah Ksatrian Instituut selain terdapat di Bandung, didirikan pula di Ciwidey dan Cianjur, serta terbuka bagi anak-anak Indonesia, keturunan Cina maupun Indo-Belanda.

Di sekolah rendah itu, murid-murid dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang memiliki kejuruan, yang tidak dimiliki oleh lulusan MULO, AMS, dan HBS, dengan maksud agar mereka mudah melanjutkan pendidikan ataupun mencari pekerjaan. Untuk keperluan itu, maka Ksatrian Instituut mendirikan sekolah menengah dagang yang disebut *Moderne Middelbare Handelsschool* (MMHS), dengan orientasi pendidikan berdasarkan pengalaman di Amerika Serikat.[131]

Dengan semboyan "Mengabdi Masa Depan Rakyat", maka pelajaran yang diberikan di MMHS berorientasi ke masa depan. Psikologi perdagangan diberikan dengan maksud untuk mengenal langganan dan pembeli. Rahasia penjualan, jiwa dari reklame dan keterampilan untuk membuat keuntungan diajarkan dengan tujuan untuk membawa bangsa kita ke arah kemajuan. Bahasa Cina dan Jepang diajarkan dengan maksud agar tamatan MMHS dikemudian hari diharapkan dapat meneruskan pelajaran ke perguruan tinggi di kedua negara itu, dan/atau mengadakan hubungan dagang dengan kedua bangsa tersebut. Bahasa Inggris sebagai bahasa dunia juga diberikan dan perlu dikuasai dengan baik oleh murid-murid MMHS. Pelajaran lainnya adalah teknik perdagangan meliputi pengetahuan tata-buku, pengetahuan dagang, ilmu perusahaan, dan ilmu biaya. Selain itu diberikan pula ilmu pengetahuan umum yang berhubungan dengan manusia/ masyarakat, yaitu sejarah kebudayaan, pertumbuhan peradaban, kemahiran merumuskan pendapat dan cara penyampaiannya di muka umum.

Kurikulum tersebut di atas dibuat dengan maksud agar pendidikan di Ksatrian Instituut berbeda sifatnya dengan pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah. Dengan kurikulum itu, lulusan MMHS diharapkan dapat menjadi pekerja atau pengusaha wiraswasta, yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan besar sehingga mereka menjadi golongan menengah dan dapat membangun masa depan bangsa dan tanah airnya.

Untuk mencapai tujuan itu, maka pendidikan di MMHS dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian bawah dengan lama belajar 3 tahun, dan bagian atas dengan lama pendidikan 2 tahun. Bagi murid-murid yang telah menempuh pendidikan selama 3 tahun diberikan kebebasan, apakah akan ke luar untuk terus bekerja, atau melanjutkan pendidikan kejuruan (spesialisasi) yang lebih tinggi dalam waktu 2 tahun lagi. Para lulusan MMHS dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi di Tokyo, Osaka, Hongkong, Manila, dan Rotterdam.

Selain itu, MMHS juga membuka jurusan jurnalistik dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada murid-murid yang berminat terhadap bidang itu dan ingin membangun masa depan nasionalnya melalui bidang pers/mass media.[132]

Perlu dikemukakan di sini bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kurikulum dan pendidikan, maka diadakan usaha menerbitkan sendiri buku-buku pelajaran, misalnya buku mengenai sejarah pertumbuhan lalulintas manusia di dunia sejak zaman dahulu kala *(Schema van de ontwikeling van het menslijk verkeer op aarde, oleh E.F.E. Douwes Dekker)*, buku-buku bahasa yang memuat pula uraian "mentalitas bangsa" (berhasil diterbitkan jilid pertama). Tatabahasa Jepang yang disusun oleh seorang Jepang dan seorang guru Indonesia *(Leerboek van de Japansche Taal,* 3 jilid, oleh H. Nagashami dan M. Sabirin), Sejarah kuna Indonesia, buku pelajaran sejarah dunia *(Wereld-Geschiedenis; oleh E.F.E. Douwes Dekker)*, dan buku pelajaran statistik.[133]

Selain sekolah tersebut di atas, Ksatrian Instituut juga membuka Sekolah Pendidikan Guru. Sekolah ini dibuka pada tanggal 1 Agustus 1935 dengan tujuan untuk mencapai :

1. adanya tenaga-tenaga pengajar yang baik dan spesialisasi;
2. terbentuknya dengan segera "balatentara" guru;
3. pendidikan yang murah, yang berarti keuntungan bagi negeri, gaji rendah, tempo yang lebih cepat untuk perluasan sekolah rakyat; dengan demikian membuat basis yang lebih luas bagi perkembangan bangsa.

Dengan berlandaskan pada semboyan "untuk tiap-tiap desa sekolahnya sendiri", maka murid-murid pada Sekolah Guru Ksatrian Instituut dipersiapkan sebagai guru-guru bagi sekolah-sekolah swasta Indonesia. Untuk keperluan itu, kepada murid-murid diberikan pengetahuan umum yang luas ditambah pengetahuan dagang dan perhubungan dengan masyarakat. Guru-guru lulusan Ksatrian Instituut harus bersedia masuk ke pelosok-pelosok daerah dan mampu mendirikan sekolah di desa-desa. Dalam melaksanakan tugas mulia itu mereka berpegang pada buku pedoman berjudul *Hoe krijg ik, zonder kapitaal mijn eigen school?* (Bagaimana caranya tanpa modal dapat mendirikan sekolah?). Dengan pengetahuan dagang yang telah diperolehnya, para guru harus dapat memegang tata-buku, mengatur administrasi dan menggali sumber- sumber keuntungan bagi sekolahnya dan bagi dirinya sendiri

Demikianlah Ksatrian Instituut menanamkan jiwa wiraswasta kepada anak didiknya sehingga mereka mampu berdiri sendiri dan turut membina rakyat melalui pendidikan.[134]

Sekolah pendidikan guru ini memang telah direncanakan oleh Ksatrian Instituut dengan cukup matang dan merupakan salah satu reaksi terhadap *Wilde Scholen Ordonantie* yang dikeluarkan oleh pemerintah tanggal 17 September 1932 (mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1932). Adanya rencana tersebut terlihat dari ucapan Douwes Dekker yang dikutip oleh P.F. Dahler.

> Bila kelak sekolah-sekolah liar telah merebut masa depan pengajaran, seperti yang telah direbutnya sekarang, maka pemerintah akan meminta syarat-syarat lebih tinggi bagi guru-guru. Pemerintah akan bertindak untuk kepentingan pengajaran, yang juga merupakan kepentingan kita. Kita akan menyambut bila hal itu terjadi kita harus melihat ke depan. Persiapan yang telah dilakukan harus mampu menyiapkan guru-guru lulusan sekolah kita sebagai "guru yang telah mendapat pendidikan baik serta berwewenang". (Garis bawah dari penulis) Dalam jumlah besar, mereka harus siap memegang kewajiban memenuhi kebutuhan pengajaran. Apa yang telah kita berikan, harus dilipatkan sepuluh kali kepada rakyat.[135]

Satu usaha lain yang cukup penting dari Ksatrian Instituut dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendidikan di kalangan rakyat ialah diterbitkannya majalah murid dan orang tua berjudul *De Ksatria, maanblad van de leerlingen van alle Ksatrian Scholen en hun Ouders*, dengan pimpinan redaksi R.M. Hoedojo Hoeksamadiman. Majalah tersebut diterbitkan sejak bulan Agustus 1937, beroplaag 2.000 eksemplar. Selain memuat berita-berita sekolah, majalah tersebut berisi pula berita-berita umum yang penting, baik nasional maupun internasional.[136] Dengan demikian, majalah tersebut selain merupakan alat penghubung antar murid, juga merupakan alat komunikasi antar sekolah dengan orang tua murid sehingga mereka mengetahui kegiatan sekolah dan situasi umum pada waktu itu. Hal ini sangat penting artinya bagi kaum pergerakan nasional. Itulah ciri khas Ksatrian Instituut

4.2.2.6 Pesantren Persatuan Islam (Persis)

Persis didirikan di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Mula-mula diketuai oleh Akhmad Hassan dengan Mohammad Natsir sebagai penasehat yang merangkap sebagai guru.[137]

Motivasi dari pendirian Pesantren Persis ini ialah : "Mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Qur'an dan Hadist, serta membersihkan Islam dari bid'ah dan khurafat". Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Persis mendirikan Pesantren dan Madrasah, juga menyelenggarakan pendidikan di waktu sore untuk anak laki-laki dan perempuan. Bahkan pada masa penjajahan Hindia Belanda Persis telah mempunyai Sekolah Guru dengan nama *Kweekschool* Pendidikan Islam (Pendis).[138]

Persis mengadakan pendidikan Islam sejak tahun 1924 yang dimulai oleh Haji Zamzam bersama dengan Akhmad Hassan dengan memberi pelajaran dan ceramah kepada anak-anak dan dewasa tentang keimanan dan hal menjalankan yang telah ditetapkan mengenai upacara agama.[139] Pada tahun 1927 dibuka kelas untuk para mahasiswa muslim yang belajar di sekolah-sekolah Belanda. Tahun 1930 didirikan Sekolah Dasar; dan pada tahun 1932 didirikan MULO serta Sekolah Pendidikan Guru di

Bandung di bawah pimpinan Moh. Natsir. Sejak Maret tahun 1936 sistem pendidikan pada Persis diseragamkan; dan mulai tahun 1938 Persis telah membuka sekolahnya di 5 tempat di Jawa.[140]

Demikianlah antara lain kegiatan dan perkembangan Persis di bidang pendidikan.

Tujuan pendidikan pada Persis adalah :

1. Mempersiapkan calon-calon Ulama yang tidak kaku menghadapi masyarakat.
2. Menghasilkan mubaligh-mubaligh yang memiliki kemampuan serta kesanggupan menyiarkan agama Islam.
3. Menghasilkan mubaligh-mubaligh yang sanggup dan tangguh di dalam membela serta mempertahankan agama Islam.
4. Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam yang sebenarnya.[141]

Sampai saat ini Persis masih tetap tangguh di dalam menyelenggarakan sekolah-sekolahnya, bahkan Persis di Bandung masih tetap menggunakan nama pesantren untuk madrasahnya sampai sekarang.

Sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Pesantren Persis di Bandung terdiri dari tingkat Ibtidaiyah/Tajhiziyah, Tsanawiyah, Muallimin dan Aliyah.

a. Tingkat Ibtidaiyah

Lama belajar pada tingkat ini adalah 6 tahun, terdiri atas kelas Tahdiri (persiapan) untuk 2 tahun yang pertama (kelas A dan B); setelah itu baru menjadi kelas I - II - III dan diakhiri dengan kelas IV. Pelajaran agama diberikan di kelas-kelas rendah sebanyak 75%, sedangkan pengetahuan umum hanya 25%, kemudian di kelas III dan IV pelajaran agama dan pengetahuan umum menjadi seimbang (50% - 50%). Setelah pengetahuan agama dikuasai oleh murid-murid, maka pemberian ilmu pengetahuan umum ditingkatkan menjadi 75%. Mulai kelas IV digunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar.

b. Tingkat Tajhiziyah

Tingkatan ini menampung lulusan SD untuk dididik selama 2 tahun supaya mereka dapat melanjutkan ke tingkat Tsanawiyah.

Untuk maksud itu, murid-murid dididik sehingga matang dalam pengetahuan agama dan bahasa Arab.

c. Tingkat Tsanawiyah

Tsanawiyah adalah lanjutan dari Tajhiziyah, dengan lama belajar 4 tahun. Pelajaran agama diberikan lebih banyak, sedangkan pelajaran pengetahuan umum diberikan hanya yang penting-penting saja, diantaranya ilmu mengajar dan perbandingan agama. Bahasa Arab diperdalam dan di samping itu diberikan juga bahasa Inggris.

d. Tingkat Mu'allimin

Tingkat ini merupakan lanjutan dari Tsanawiyah, dengan lama belajar 2 tahun. Di samping mempelajari bidang ilmiah, juga praktek kemasyarakatan adalah menjadi tugas pokok dari para siswa tingkatan ini. Kecuali praktek mengajar, diberikan pula praktek tabligh dan kepemimpinan.

Telah menjadi kebiasaan, apabila seseorang telah menyelesaikan pendidikan 2 tahun di tingkat ini, ia mendapat tugas ke luar daerah.

e. Tingkat Aliyah

Tingkat ini menerima lulusan Mu'allimin, dengan tujuan memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh murid pada tingkatan sebelumnya. Lama belajar ditingkat ini 3 tahun. Sejalan dengan tujuan Persis, di beberapa tempat di Jawa Barat, didirikan pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah yang dititik-beratkan kepada ilmu agama dengan kepatuhan yang sungguh-sungguh.[142]

4.2.2.7 Shanti Ashrama (Sekolah P U I)

Persatuan Umat Islam Indonesia (PUI) adalah sebuah perkumpulan Islam yang bersifat sosial yang berpusat di

Majalengka di bawah pimpinan Kiyai Haji Abdul Halim. Pada tanggal 16 Mei 1916, Kiyai Haji Abdul Halim mendirikan sebuah madrasah yang bernama Jam'iyat I'anatul Muta'allimin.[143]

Fakor yang mendorong Kiyai Haji Abdul Halim untuk mendirikan lembaga pendidikan tersebut ialah :

1. Pendidikan di Indonesia lebih dikuasai oleh golongan konservatif,
2. Keadaan masyarakat Islam di Indonesia sudah banyak yang menyimpang dari tuntutan agama;
3. ingin mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada kedua sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Hadist;
4. Pengaruh adanya organisasi Islam dan organisasi-organisasi lainnya yang menuju ke pembaharuan;
5. Ingin membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan.[144]

Pendirian madrasah Jam'iyat I'anatul Muta'allimin menarik perhatian alim ulama setempat dan banyak diantara mereka yang menentangnya, karena sistem madrasah tersebut merupakan sistem pendidikan yang sama sekali baru bagi masyarakat Majalengka, ialah suatu sistem yang menggunakan ruangan/kelas, bangku dan kursi sebagai tempat belajar. Selain itu madrasah ini menggunakan kurikulum dan metoda-metoda yang disesuaikan dengan pendidikan ala barat. Mata pelajaran yang diberikan ialah pengetahuan agama; ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan praktis, seperti pekerjaan tangan/kerajinan. Bahasa asing yang diberikan, di samping bahasa Arab juga bahasa Belanda dan bahasa Inggris.[145] Lama belajar adalah 5 tahun.

Pada permulaan berdirinya madrasah ini hanya memiliki 7 orang santri, yaitu Mokhamad Syafari, Abdul Fatah, Adnan, Akhmad Satori, Kosim, Jamalludin, dan Juhari. Sedangkan guru-gurunya ada 6 orang, yaitu Kiyai Haji Abdul Halim, Mualim Soleh, Mualim Asyari, Mualim Benyamin, Mualim Abhari, dan Mualim Abdurakhman.[146]

Dalam mengelola madrasahnya ini Kiyai Haji Abdul Halin beserta anggota-anggotanya selalu mengadakan hubungan dan peninjauan kepada organisasi-organisasi Islam lainnya, antara lain

dengan Muhammadiyah, Sarekat Islam, Jamiat Khair, dan Al-Irsyad di Jakarta. Dengan demikian PUI dapat mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh organisasi-organisasi Islam lainnya.[147] Hal ini telah mendorong kemajuan madrasah tersebut sehingga kualitasnya meningkat.

Dari hasil peninjauan itu Kiyai Haji Abdul Halim beserta pembantu-pembantunya lebih giat lagi memajukan madrasahnya dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah. Di samping itu, untuk mengatasi tantangan-tantangan dari pihak masyarakat, Kiyai Haji Abdul Halim mengadakan pendekatan dengan tokoh masyarakat setempat, alim ulama dan penghulu, untuk membicarakan dan memberikan pengertian kepada mereka tentang madrasah yang didirikannya itu. Maka dengan semangat pengabdian akhirnya Kiyai Haji Abdul Halim dapat merealisasikan cita-citanya.[148]

Atas nasihat H.O.S. Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam, Kiyai Abdul Halim mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar lembaga pendidikannya mendapat pengesahan badan hukum.

Usaha ini berhasil dengan keluarnya surat pengesahan Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 21 September 1917, No. akte 43. Berdasarkan surat pengesahan tersebut Jam'iyat I'anatul Muta'allimin diganti namanya menjadi Syirkatul Ulama, kemudian diganti lagi menjadi Persyarekatan Ulama.[149]

Setelah status madrasah itu kuat, pada tahun itu juga (1917) Kiyai Haji Abdul Halim mendirikan sebuah sekolah tingkat rendah(Ibtidaiyah), dan pada tahun 1923 mendirikan Sekolah Guru Madrasah Mu'allimin.

Makin lama madrasah Persyarekatan Ulama makin berkembang dan mendapat kemajuan pesat, sehingga pemerintah Hindia Belanda merasa curiga dan perlu mengadakan pengawasan yang lebih ketat lagi.[150] Namun demikian usaha Kiyai Haji Abdul Halim untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam terus dilakukan dengan giat. Dalam hal ini ia berpendapat bahwa untuk kemajuan perkembangan pendidikan, maka tempatnya harus jauh

dari kota. Suasana kota tidak cocok untuk belajar, karena kota adalah tempat yang banyak diliputi oleh hal-hal yang amoral. Tempat yang paling baik untuk mendidik watak dan moral yang luhur adalah tempat yang sunyi/tenang, dan bebas dari segala macam godaan duniawi.[151]

Gagasan selengkapnya mengenai pengembangan lembaga pendidikan Islam dilontarkan oleh Kiyai Haji Abdul Halim dalam Kongres Persyarikatan Ulama yang diadakan di Majalengka pada tahun 1932. Dalam konsep yang diajukannya itu, Kiyai Haji Abdul Halim menyatakan, bahwa di sekolah tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan semata-mata (ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum), tetapi juga diberikan ilmu pengetahuan praktis yang akan memberi jalan hidup kelak bila murid itu telah keluar dari sekolah. Pengetahuan praktis yang dimaksud ialah kerajinan tangan, perdagangan, dan pertanian bergantung pada minat murid yang bersangkutan. Sebaiknya sekolah itu diselenggarakan di suatu kompleks yang luas yang memungkinkan pengetahuan praktis itu dikerjakan.[152]

Haji Abdul Halim menjelaskan tentang latar belakang lahirnya konsep tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua keluaran sekolah pemerintah menggantungkan hidupnya (pekerjaannya) kepada lowongan kerja yang tersedia di kantor-kantor pemerintah atau perusahaan-perusahaan dan tidak mampu bekerja atas inisiatif sendiri. Sedangkan kekuatan pesantren atau madrasah pada umumnya menjadi guru agama atau kembali kepada orang tuanya untuk melanjutkan usaha mereka. Lulusan sekolah yang ideal, menurut pendapat beliau, adalah seorang yang telah siap (fisik, mental, kecakapan) memasuki suatu lapangan hidup tertentu dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Desa (luar kota) ingin dijadikan sebagai tempat yang ideal bagi pemuda-pemuda dalam menempuh hidup mereka. Bukankah tempat-tempat yang sepi sering menjadi sumber inspirasi yang melahirkan pikiran-pikiran mulia, sebaliknya kota-kota sering diasosiasikan dengan praktek-praktek kejahatan, kebejadan moral.[153]

Ternyata konsep K.H. Abdul Halim itu diterima baik oleh kongres dan mendapat dukungan dari seorang keluarga kaya penduduk desa Ciomas. Orang tersebut menyerahkan sebidang tanah yang cukup luas di Pasir Ayu, terletak kira-kira 10 kilometer dari kota Majalengka, untuk keperluan pelaksanaan konsep pendidikan tersebut. Maka didirikanlah kompleks pendidikan yang dinamai Shanti Ashrama. Pendidikan di sini dibagi atas tiga tingkatan, yaitu ibtidaiyah (sekolah dasar), tsanawiyah (sekolah lanjutan pertama), dan aliyah (sekolah lanjutan atas). Kurikulumnya terdiri atas mata pelajaran agama, mata pelajaran umum, dan pengetahuan praktis (keterampilan). Pengetahuan praktis meliputi pertanian, pandai besi, pertukangan kayu, pertenunan, dan perusahaan kimia, seperti membuat sabun. Murid-muridnya harus tinggal di asrama dengan disiplin yang keras, terutama dalam hal waktu belajar/bekerja dan etika pergaulan.[154]

Dalam rangka meningkatkan kualitas sekolahnya, K.H. Abdul Halim mempelajari sistem pendidikan di sekolah-sekolah lain. Bahkan sistem sekolah bukan Islam pun, seperti Shantiniketan yang didirikan oleh Rabindranath Tagore di India, dipelajari pula. K.H. Abdul Halim mengadakan hubungan dengan Jami'at Khair dan Al-Irsyad di Jakara.[155]

Konsep pendidikan K.H. Abdul Halim didasarkan atas ajaran Islam yang menyatakan bahwa perpaduan kepentingan keduniawian dan keakheratan hendaknya menjadi pedoman hidup setiap orang K.H. Abdul Halim tidak menghendaki seorang rnuslim hanya mengutamakan kepentingan akherat semata-mata, dengan mengabaikan kehidupan di dunia ini. Dan sebaliknya beliau juga menentang sikap yang hanya mengutamakan kehidupan dunia dengan meninggalkan kehidupan beragama.[156]

Sepeti halnya organisasinya, sekolah yang diasuh oleh Persyarikatan Ulama tidak tersebar luas ke lain daerah. Tetapi di daerah sekitar Majalengka, sekolah-sekolah tersebut berkembang cukup baik. Pada akhir tahun 1930-an ada sekitar 6--70 orang pemuda yang belajar di Shanti Ashrama sebagai pelajar tetap dan 200 orang lainnya yang berasal dari desa-desa di sekitarnya mengikuti pelajaran harian (tak menetap di asrama).[157]

Dalam perkembangan selanjutnya, Persyarikatan Ulama, tidak hanya mendidik kader-kader pria saja, tetapi kader-kader wanitapun mendapat pembinaan yang baik sekali, dalam rangka emansipasi wanita. Khusus untuk majelis kewanitaannya, pada tahun 1930 telah dibentuk organisasi yang diberi nama "Fathimiyah", mengambil nama dari salah seorang putri Nabi Muhammad S.A.W.[158]

Di bidang kesehatan masyarakat, Persyarikatan Ulama telah mendirikan sebuah poliklinik yang diberi nama "Pandi Mardi Mulya". Poliklinik ini di samping melayani kesehatan masyarakat, juga menampung orang-orang jompo yang diurus oleh majelis Fathimiyah.[159]

Pada tanggal 5 April 1952, Persyarikatan Ulama mengadakan fusi dengan Al-ittihadiyatul Islamiyah (All) pimpinan K.H. A. Sanusi yang didirikan di Sukabumi pada tahun 1931. Kedua organisasi tersebut, setelah bersatu diberi nama "Persatuan Umat Islam" (PUI).[160]

Setelah PUI berdiri, maka hampir 400 madrasah di Jawa Barat langsung berada di bawah asuhan PB PUI bagian pendidikan.

Menurut rencana tahun 1958 PUI menyelenggarakan madrasah-madrasah/sekolah-sekolah dengan susunan sebagai berikut :

1. Madrasah Diniah (Ibtidaiyah) : 6 tahun
2. Madrasah Tsanawiyah : 4 tahun
3. SD PUI : 6 tahun
4. SMP PUI/SMI : 3 tahun
5. Madrasah Pertanian : 4 tahun
6. Sekolah Guru PUI : 6 tahun
   yang terdiri dari 2 tingkat :

   a. Tingkat I : 3 tahun dan menerima tamatan madrasah PUI 6 tahun.

   b. Tingkat II : 3 tahun dan menerima lulusan ujian tingkat I, Tsanawiyah 4 tahun atau SMP PUI 3 tahun.

Fungsi Sekolah Guru ini ialah untuk menghasilkan guru-guru agama Islam. Kini PUI telah memiliki Perguruan Tinggi, yakni Fakultas Tarbiyah (sederajat dengan Faukltas Tarbiyah IAIN) bertempat di Majalengka. Mulai tahun 1976 telah dibuka SMA PUI di Tasikmalaya.[161]

Demikianlah usaha-usaha rakyat Jawa Barat pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dalam membina bidang pendidikan untuk bangsa dan negara. Sekalipun dalam alam penjajahan, tetapi dalam hal pendidikan, rakyat Jawa Barat tidak hanya menggantungkan diri kepada "kebijaksanaan" pemerintah.

Rakyat Jawa Barat yang diwakili oleh para cendekiawan, tokoh-tokoh terkemuka, dan para alim ulama yang menyadari arti dan pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, bangkit mendirikan, memupuk serta memelihara wahana pendidikan, baik berupa sekolah umum maupun berupa madrasah atau pesantren. Sebab sesungguhnya mendirikan sekolah adalah amal yang mulia.

Dengan didirikannya lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan Islam itu, diharapkan kehidupan lahir batin masyarakat akan seimbang. Peribahasa mengatakan bahwa "ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh".

Pengalaman dalam membina pendidikan ini, di jaman penjajahan Belanda ini, selanjutnya sangat bermanfaat sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan pada masa Pendudukan Jepang dan membina diri di alam Indonesia merdeka.

Catatan

1. I.K. Pasaribu dan B. Simandjuntak, *Pendidikan Nasional (Tinjauan Paeda-gogik Teoritis)*, Bandung, Tarsito, 1978, hal. 53.
2. Sartono Kartodirdjo; Marwati Djoned Poesponegoro; dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, jil V, edisi ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1977, hal. 35--36. Cf. Bernard H.M. Hiekke, *Nusantara: a history of Indonesia*, Bruxelles, A. Manteau SA, 1961, hal. 331; dan *Pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman*, Jakarta, Dep. PK. BP3K, 1979, hal. 63.
3. Bernard H.M. Vlekke, *loc. cit.*
4. Sartono Kartodirdjo, et al., *op. cit.*, hal. 38.
5. *Pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman, op. cit.*, hal, 63.
6. Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan dalam alam Indonesia merdeka, Jakarta, Gunung Agung, 1970, hal. 30--e2.
7. *Pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman, op. cit.*, hal. 66.
8. *Ibid.*; hal. 76.
9. Sumedi, Erawan, Adit Rosadi, S. Anjar Sumyana (ketiganya adalah Staf Pengawas Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil PK Propinsi Jawa Barat) dan Rd. Kusnadi, Kepala Kandep PK Kabupaten Kuningan, wawancara, November 1980.
10. Indonesia. Dep. PK. Proyek PPKD. Sejarah Daerah DKI Jakarta, Jakarta, Proyek PB2SID, 1978, hal. 118.

11. Sartono Kartodirdjo dkk.. *op. cit.*, hal. 145--147.

12. *Ibid.*, hal. 147--148.

13. Sugianto, Sedjarah Perkembangan Sekolah Lanjutan Umum Tingkat Atas di Indonesia, Jakarta, Widjaja, t.th., hal. 12.

14. Catatan nomor 9.

15. (Bedenkboek) Pagoejoeban Pasoendan, Bandung, t.th., hal.18-- 23, 36--37.

16. *Pendidikan di Indonesia......, op. cit.*, hal. 68.

17. Sartono Kartodirdjo dkk., *op. cit.*, hal. 125.

18 Catatan nomor 9.

19. *Sejarah Daerah DKI Jakarta*, Jakarta, Dep. PK. Proyek PB2SID, 1978, hal.118.

20 Sartono Kartodirdjo dkk.. *loc. cit.*

21. Edi S. Ekadjati dkk, *Sejarah Kebangkitan Nasional daerah Jawa Barat*, Dep. PK. Pusat Penelitian Sejarah & Budaya. Proyek PPKD Jawa Barat, 1978/1979, hal. 60.

22. Catatan nomor 9.

23. *Pendidikan di Indonesia lo c. cit.*

24. *ibid.* dan Sugianto, *loc. cit.*

25. Sugianto, *ibid.* Lihat juga: M. Vastenhouw. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, terj. Abdul Murad & M. Benyamin Achdiat, t.t., Jemmars, t-th.. hal. 53.

26. Sugianto, *loc. cit.*

27. *Handboek Indonesische Onderwijzers Bond 1942*, hal 1 04.

28. D.J.W.J. Kluiver, *Voorlichting bij de studiekeuze in Nederlandsch Indie*, Batavia, Kolff, 1933, hal. 24, lihat juga: *(Gedenkboek) Pagoejoeban Pasoendan, op. cit.*, hal. 23, 24.

29. Sugianto, *op. cit.*, hal. 12--13

30. M. Vastenhouw, *op. cit.*, hal, 54. Cf. *Pendidikan dIndonesia op. cit.*, hal. 70, dan I.J. Brugmans, *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch Indie*, Batavia, Wolters, 1938, hal 339.

31. Sugianto, *op. cit.*, hal. 14. Cf. I.J. Brugmans, *loc. cit.*

32. Sugianto, *op. cit.*, hal. 14, 17, 2SI 27.

33. *Ibid.*, hal. 20--23

34. *Ibid.*, hal. 20.

35. *Ibid.* hal. 14, 18--19.

36. *Pendidikan di Indonesia op. cit.*, hal. 70.

36a D.J.W.J. Kluiver, *op. cit.*, hal. 24--25.

36b I. Djumhur dan H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, Bandung, Ilmu, 1978, hal. 143.

36c. Sugianto, *op. cit*, hal. 24, 26.

36d. *Ibid.*, hal. 16--7.

36e *Pendidikan di Indonesia...*, *loc. cit.*

36f. I. Diumhur dan H. Danasuparta, *op. cit.*, hal. 143.

36g. SL. Van der Wal, *Pendidikan di Indonesia 1900 --1940*, Saduran A. Dasuki dan Sumarsono Mestoko, Dep. PK BP3K, 1977, hal. 21

36h. *Pendidikan di Indonesia op. cit.*, hal 72--73.

36i. *Ibid*,. hal. 73. Cf. I. Djumhur dan H. Danasuparta, *loc. cit.* dan R. Murray Thomas, *A Chronicle of Indonesian higher education,- the first half century 1920--1970*, Singapore, Chopmen Enterprises, 1973 hal. 19

37. Ratna Wilis, *Perjoangan Rd. Dewi Sartika*, Skripsi, Bandung, Unpad. Faktutas Sastra, 1967, hal.10

38. Putri bangsa Rd. Dewi Sartika, *wawancara*, *Bandung*, 13 Desember 1979.

39. Panitia Peringatan Hari Rd. Dewi Sartika, *Rd. Dewi Sartika.-Riwajat Hidup dan Perdjoangannya*, Bandung, BKOW Kodya Bandung, 1974, hal. 11.

40. Ratna Willis, *op. cit.*, hal. 11

41. Panitia Peringatan Hari Rd. Dewi Sartika, *op. cit.*, hal. 2.

42. *Ibid., hal.* 3.

43. Catatan nomor 38.

44. Rd. Ningrum Julaeha, *wawancara*, Bandung, Agust. 1980.

45. Panitia Peringatan Hari Rd. Dewi Sartika, *op. cit.*, hal. 4.

46. I. Djumhur dan H. Danasuparta, *op. cit.*, hal. 156.

47. Rd. Soeradiradja, d/h Vice Voorziter Paguyuban Pasundan. wawancara, Bandung, 17 Des. 1974.

48. Catatan nomor 38.

49. Panitia Peringatan Hari Rd. Dewi Sartika, *op. cit.*, hal. 8.

50. Catatan nomor 38.

51. Panitia Peringatan Hari Rd. Dewi Sartika, *op. cit.*, hal.10.

52. *Ibid.*, hal. 11.

53. E.M. Dachlan d/h Redacteur Sipatahunan, wawancara, Jakarta, September 1980.

54. Kadir Tisna Sutan, "Ibu Lasminingrat Pelopor Pendidikan yang terlupakan", *Kawit*, Bulletin Kebudayaan Jawa Barat, 24, I-- III, 1980, hal. 4.

55. Catatan nomor 53.

56. *Ibid*

57. Kadir Tisna Sudjana, *loc. cit.*

58. *Ibid.* hal. 4.

59. *Ibid*

60. *Mingguan Hari Pikiran Rakyat*, 6 April 1980.

61. Catatan nomor 53.

62. Keluarga Rd. Siti Jenab. *wawancara*, Cianjur, November 1980.

63. Margono Djojohadikusumo, *Dr E.F.E. Douwes Dekker*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hal. 19.

64. *Ibid.*, hal. 21.

65. *Ibid.*, hal. 22.

66. *ibid.*

67. *Ibid.*, hal. 28--29.

68. *Ibid*, hal 35.

69. *Ibid*, hal. 36.

70. Sartono Kartodirdjo dkk., *op. cit.*, hal. 268.

71. Margono Djojohadikusumo, *op. cit.*, hal. 43.

72. Ibid., hal. 60.

73. Deliar Noer, *The Modernist Muslim movement in Indonesia 1900--1942*, London, Oxford Univ. Press, 1973, hal. 70.

74. Edi S. Ekadjati dkk., *op. cit*, hal. 89.

75. Deliar Noer, *op. cit* hal. 71

76. *Ibid*

77. Edi S. Ekajati dkk, *op. cit*, hal. 90.

78. *Ibid*

79. Syafiq A. Mughni *Hassan Bandung Pemikiran Islam Radikal*, Surabaya, Bina Ilmu, 1980, hal. 11.

80. *Ibid.*, hal. 12.

81. Syafiq A. Mughni, *op. cit.*, hal. 14.

82. *Ibid*

83. Al-Ustadz Qois Atamami."Hasan Bandung", *Risalah*, 57, 7, th. hal. 32.

84. Syafiq Mughni, *op. cit.*, hal. 17.

85. *Ibid.*, hal. 31

86. A. Hassan, *Soal Jawab III*, Bandung, Diponegoro, hal. 1264.

87. Al-Ustadz Qois Atamimi, *op. cit.*, hal. 31.

88. Panitia Peringatan Hari Rd. Dewi Sartika, *op. cit.*, hal. 4.

89. Ibu Tardine (putri Bungsu Rd. Dewi Sartika), Bandung, *wawancara*, Desember 1979.

90. Edi S. Ekadjati dkk., *op. cit.*, hal. 102.

91. I. Djumhur dan H. Danasuparta,

92. Sartono Kartodirdjo dkk., *op. cit.*, hal. 243.

93. Panitia Peringatan Hari Rd. Dewi Sartika, *op. cit.*, hal. 8.

94. I. Djumhur dan H. Danasuparta, *loc. cit.*

95. Edi S. Ekadjati dkk., *loc. cit.*

96. Catatan nomor 38.

97. Panitia Peringatan Hari Rd. Dewi Sartika, *loc cit.*

98. Catatan nomor 38.

99. Edi S. Ekadjati dkk., *op. cit.*, hal 103.

100. I. Djumhur dan H. Danasuparta, *op. cit*, hal 156.

101. Kadir Tisna Sudjana, *op. ct*, hal. 5.

102. *Ibid.* Hal 4

103. *Ibid*

104. Catatan nomor 53

105. Kadir Tisna Sudjana, *op.cit*, hal.5

106. *Ibid*, hal. 4

107. Buldan Djajawiguna, *wawancara*, Cianjur, November 1980.

108. *Dokumentasi* keluarga Rd. Siti Jenab.

109. Putra-putri Rd. Siti Jenab, wawancara, Cianjur, November 1980.

110. *Dokumentasi* keluarga Rd. Siti Jenab.

111. Catatan nomor 108.

112. A.G. Pringgodigdo. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat 1977, hal.11

113. *Siliwangi*, 2, 1, 15 Juni 1921, hal 1--2

114. *Ibid.* Lihat juga: "Vergadering Comite Studiefonds Pasoendan di Bandung", *Siliwangi* 13, 1, 4. September 1921, hal. 2--3.

115. *Ibid*

116. Edi S. Ekadjati, dkk *op. cit*, 110--111.

117. Partai Kebangsaan Indonesia, *40 Tahun Berjuang*. Bandung, 1955, hal. 4.

118. H. Moh. Koerdi d/h Hofdredacteur Sipatahunan, *wawancara*, Bandung, 14 September 1974.

119. Oekar Bratakoesoema d/h Sekretaris Hoofdbestuur Paguyuban Pasundan, *wawancara*, Bandung, 10 Desember 1974.

120. R.K. Sukanda Bratamanggala, *wawancara*, Bandung: 22 September 1974.

121. Catatan nomor 118.

122. "25 Tahoen Pagoejoeban Pasoendan". *Gedenkboek Pasoendan*, Bandoeng, 1940, yal. 17.

123. Catatan nomor 118.

124. "25 Tahoen Pagoejoeban Pasoendan", *loc. cit.*

125. Sartono Kartodirdjo dkk., *op. cit.*, hal. 267.

126. *Ibid* haL 268.

127. *Ibid.* (Surat Gubernur Jenderal tertanggal 15 Januari 1923 No. 3A x Ge-heim).

128. *Ibid.*, hal. 268. Cf. Margono Djojohadikusumo, *op. cit.*, hal. 38.

129. Sartono Kartodirdjo dkk., *op. cit.*, hal. 268 - 269.

130. *Ibid*, hal. 269

131. *Ibid*, hal. 272

132. *Ibid*, hal. 279--270

133. *Ibid*, hal. 270--271

134. *Ibid*, hal. 271

135. *Ibid*, hal. 272--273

136. *Ibid*, hal. 272

137. *Ibid*, hal. 273

138. Syafiq A. Mughni, *op. cit.*, hal. 52.

139. I. Djumhur dan H. Danasuparta, op. cit, hal. 182.

140 Al- Ustadz Atamimi, *op. cit.*, hal. 32.

141. Syafiq A. Mughni, *op. cit.*, hal. 67 - 69.

142. Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam; Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*, New York, Cornell Univ. Press, 1970, hal 19.

143. I. Djumhur dan H. Danasuparta, *op. cit.*, hal. 183.

144. Deliar Noer, *op. cit.*, hal. 70.

145. Moh. Akim, *op. cit.*, hal. 33.

146. Usman *Said*, *Sumbangan Pendidikan Islam Terhadap Pembentukan Kepribadian Indonesia*, 19 68, hal. 33.

147. Moch. Akim, *op. cit.* hal. 17.

148. Deliar Noer, *op. cit.*, hal. 71

149. J. Darya Hidayat, *Perserikatan Ulama dan Perkembangannya*

(1916--1942). Skripsi, Sarjana Muda Sejarah, Bandung, Universitas Pajajaran, Fakultas Sastra, 1971, hal. 18.

150. Deliar Noer, *loc. cit.*

151. L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, hal. 320.

152. Delier Noer, *op. cit.*, hal. 72.

153. Edi S. Ekadjati, dkk., *op. cit.*, hal. 104--106.

154. Deliar Noer, *op. cit.*, hal. 71--72.

155. *Ibid.*, hal. 72.

156. *Ibid.*, hal. 73.

157. *Ibid.*, hal71.

118. *Ibid.* , hal. 70.

119. *Ibid.*, hal. 71. Cf. Darya Hidayat, *op. cit.*, hal. 25.

160. Darya Hidayat, *op. cit.*, hal. 25.

161. I. Djamhur & H. Danasuparta, *op. cit.*, hal. 167.

BAB V

PENDIDIKAN PADA JAMAN JEPANG DAN INDONESIA MERDEKA

5.1 Jaman Pendudukan Jepang

Pada tanggal 18 Maret 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda *Tjarda Starkenborgh Stachouwer* dan Panglima Militer (Legercom mandant) Ter Poorten atas nama Pemerintah Hindia Belanda menandatangani Kapitulasi di Kalijati (Subang) yang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. KNIL dibubarkan dan semua perlawanan dihentikan tanpa suatu pertempuran yang sengit. Padahal pada mulanya mereka mengumandangkan semboyan lebih baik mati berdiri dari pada berlekuk lutut.[1]

Dengan berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia memasuki suatu perioda baru yaitu periode pemerintahan pendudukan militer Jepang.[2]

Jepang menyerbu Indonesia, karena tanah air kita kaya akan bahan-bahan mentah dan tenaga manusia, yang sangat besar artinya bagi kelangsungan Perang Pasifik dan hal ini sesuai pula dengan cita-cita politik ekspansinya.[3]

Jaman penduduk Jepang di Indonesia, memperlihatkan gambaran buruk mengenai bidang pengajaran, bilamana dibandingkan dengan masa-masa akhir pemerintahan Hindia Belanda.

Perhatian terhadap pendidikan, bukan menjadi baik, akan tetapi sebaliknya. Di seluruh Jawa Barat hanya terdapat sekolah-sekolah rendah. Usaha-usaha untuk mempertinggi mutu-pelajaran tidak ada.[4]

Sesaat sesudah tentara pendudukan Jepang mulai berkuasa, tak ada satu sekolah menengah pun yang diperkenankan dibuka kembali. Lagi pula persiapan-persiapan ke arah itu belum diadakan. Masih banyak kesulitan-kesulitan yang perlu diatasi terlebih dahulu, lebih-lebih kesulitan mengenai guru, karena pemerintah kolonial Belanda tidak mempersiapkan secara khusus guru-guru Indonesia untuk sekolah-sekolah menengah, apalagi menengah atas, sehingga sampai saat terakhir dari masa penjajahan Belanda hanya ada beberapa orang guru Indonesia yang mempunyai wewenang penuh untuk mengajar sekolah lanjutan. Kesulitan lainnya ialah mengenai buku pelajaran. Semua buku pelajaran ditulis dalam bahasa Belanda, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang melarang pemakaiannya. Akan tetapi sebaliknya, karena kesulitan-kesulitan inilah yang rupanya mendorong bangsa Indonesia untuk melengkapi bahasanya dengan istilah-istilah baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan.[5]

Lagi pula penguasa Jepang hanya mendorong bangsa Indonesia agar giat mempelajari bahasa Jepang, suatu bahasa yang masih asing sama sekali, karena sebelumnya tak ada satu sekolah pun yang memberikan pelajaran bahasa Jepang, mungkin yang ada hanya di Perguruan Ksatriaan Institut di Bandung. Untuk maksud itu, Permerintah Militer Jepang membuka sekolah-sekolah yang khusus memberi pelajaran bahasa Jepang secara kilat. Sekolah-sekolah itu disebut "Nipongo Gakko". Selain bahasa Jepang, di sekolah itu diberikan pula latihan-latihan kemiliteran ala Jepang.[6]

Selain itu, ada pula pendidikan yang disebut *Hakko Ichiu*. Yang mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dengan bangsa Jepang dalam rangka mencapai "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya". Tetapi dalam kenyataannya bangsa Indonesia menjadi miskin dan menderita akibat kepentingan Perang Jepang.[7]

Dasar dari pendidikan di sekolah-sekolah pada waktu itu ialah pengabdian kepada pemerintah pendudukan dengan tidak mengindahkan pertumbuhan pribadi anak didik. Pendidikan diliputi

oleh suasana perang. Baik nyanyian-nyanyian, semboyan-semboyan dan latihan-latihan dihubungkan dengan persiapan-persiapan lahir-batin guna menghadapi perang. Dengan semboyan Asia Timur Raya atas dasar kemakmuran bersama, maka semangat Jepang dimasukkan di sekolah-sekolah. Untuk menghapuskan ingatan rakyat Indonesia kepada pemerintah Belanda, maka :

a. Pemakaian bahasa Belanda dilarang.
b. Pemakaian bahasa Indonesia diharuskan di semua tingkat sekolah.
c. Bahasa Jepang harus diajarkan di sekolah-sekolah.
d. Latihan-latihan militer diadakan di semua sekolah.
e. Adat istiadat dan sejarah Jepang perlu diperhatikan dan dianggap penting.
f. Ilmu bumi harus ditinjau dari sudut geopolitis.[8]

Sistim persekolahan di jaman pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan karena sistem penggolongan baik menurut golongan bangsa maupun menurut status sosial dihapuskan. Dengan demikian terdapat integrasi terhadap macam-macam sekolah yang sejenis. Sejak jaman Jepang bahasa dan istilah-istilah Indonesia mulai digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan.

5.1.1 Sekolah Rakyat (*Kokumin Gakko*)

Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang hanya ada satu macam sekolah untuk Sekolah Dasar, yaitu yang disebut Sekolah Rakyat, terbuka untuk umum dan semua golongan penduduk, lama pendidikan 6 tahun. Sekolah Rakyat terdapat di semua kota dan desa di seluruh Jawa Barat, atau di tempat-tempat yang dahulunya terdapat Sekolah Desa, Sekolah Kelas Satu, Sekolah Kelas Dua, HIS atau ELS.[9]

5.1.2 Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*)

Sebagai kelanjutan Sekolah Rakyat, adalah Sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko) lama pendidikannya 3 tahun. Baru dalam bulan September 1942, setelah beristirahat kurang lebih 5 bulan sekolah-sekolah menengah diperbolehkan dibuka kembali setelah diadakan persiapan-persiapan seperlunya. Sekolah Menengah Pertama

yang dibuka kembali antara lain di kota Bandung, Tasikmalaya, Bogor, Serang, dan di Purwakata.[10]

5.1.3 Sekolah Menengah Tinggi.

Sekolah Lanjutan Umum tingkat atas, yang dibuka dengan nama Sekolah Menengah Tinggi, mula-mula hanya ada 4 buah untuk seluruh Indonesia, yaitu di Jakarta, Semarang, Jogya dan Surabaya. Kemudian pada tahun 1943, dibuka dua buah SMT yaitu di Bandung yang dipimpin oleh Ir. Abdul Karim dan yang satu lagi di Surakarta.[11]

Sekolah ini mempunyai sifat pengajaran umum dan ditujukan untuk menyiapkan para pelajar guna melanjutkan pada Sekolah Tinggi. Yang diterima pada SMT ialah mereka yang lulus pada ujian penghabisan negeri Sekolah Menengah Pertama, di samping itu menampung juga murid-murid AMS baik negeri maupun swasta, dan murid-murid kelas IV & V HBS, selanjutnya masih dapat diterima pula murid-murid MOSVIA dan MHS, mengingat bahwa bagi sekolah-sekolah ini tidak terlihat ada kemungkinan untuk dibuka kembali. Lama pelajaran 3 tahun dan sekolah ini dipecah menjadi tiga jurusan yakni :

Bagian A jurusan Kesusastraan
Bagian B jurusan Ilmu Pasti dan Alam
Bagian C jurusan Ekonomi

Rencana pelajaran untuk bagian B tidaklah jauh berbeda dari rencana pelajaran AMS bagian B dahulu bahasa Indonesia sekarang menggantikan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib, sedangkan bahasa-bahasa asing lainnya tidak lagi diberikan. Agak kurang jelas arah bagian A bahasa Indonesia lebih banyak diberikan dari pada dibagian B, dan lebih mementingkan ilmu-ilmu sosial.[12]

Pemegang ijazah SMT bagian B dapat melanjutkan pelajarannya pada semua Sekolah Tinggi, tetapi pada dasarnya mereka disiapkan untuk Sekolah-sekolah Tinggi yang berdasarkan ilmu Alam/Pasti misalnya Sekolah Kedokteran dan Sekolah Tehnik Tinggi.

Bagi pemegang ijazah SMT bagian A/C dapat melanjutkan pelajarannya ke Sekolah-sekolah Tinggi yang pelajarannya sesuai dengan pelajaran semula, seperti SMT bagian A dapat melanjutkan ke Fakultas Sastra dan SMT bagian C dapat melanjutkan ke Fakultas Ekonomi.[13]

Kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai murid SMT pada umumnya hanya dipergunakan oleh anak-anak Indonesia asli saja. Guru-guru seluruhnya adalah guru-guru Indonesia, tetapi pada tiap sekolah masih ditempatkan lagi seorang militer Jepang, yang bertindak sebagai pengawas, baik untuk mengawasi guru, murid, maupun jalannya sekolah, sehingga kebebasan untuk bergerak terasa benar sangat dibatasi. Kekurangan akan tenaga guru, khususnya guru untuk ilmu-ilmu eksakta, pada umumnya diisi dengan tenaga mahasiswa, terutama dari GHS dan dari THS.[14]

5.1.4 Sekolah Kejuruan

Sekolah kejuruan menengah yang ada ialah Sekolah Pertukangan dan Sekolah Tehnik Menengah, sebaliknya pada jaman Jepang diberikan Sekolah Pelayaran dan Sekolah Pelayaran Tinggi di Cirebon dan di Bandung terdapat ST dan STM, sedangkan di Tasikmalaya terdapat Sekolah Pertanian.[15]

5.1.5 Sekolah Guru

Untuk mendidik guru terdapat tiga jenis sekolah, yaitu :

a. Sekolah Guru 2 tahun (Syoto Sihan Gakko)
b. Sekolah Guru 4 tahun (Guto Sihan Gakko)
c. Sekolah Guru 6 tahun (Koto Sihan Gakko)

Sekolah-sekolah Guru tersebut terdapat antara lain di kota-kota Bandung, Garut, Tasikmalaya, Bogor, Serang, dan di Purwakarta.[16]

5.1.6 Perguruan Tinggi

Hampir semua perguruan tinggi ditutup, kecuali yang ada itu ialah Sekolah Kedokteran Tinggi *(Ika Dai Gakko)* di Jakarta yang dibuka

kembali pada tahun 1943, juga Sekolah Ahli Obat *(Yaku Gakko)* di Jakarta dan Sekolah Kedokteran gigi *(Shika Gakko)* di Surabaya yang keduanya dibuka pada tahua 1943. Tahun 1944 dibuka Sekolah Tehnik Tinggi *(Kogyo Dai Gakko)* di Bandung, Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor dan pada awal tahun 1945 di Pasar Rebo Jatinegara dibuka Akademi Pemerintahan *(Kenkoku Gakko-in)*.[17]

Kalau digambarkan dalam suatu bagan, sistem persekolahan di jaman pendudukan Jepang tidak jauh menyimpang dan mirip dengan sistem persekolahan sesudah kemerdekaan. Yang berbeda hanya nama sekolah, sedang jenis sekolahan kejuruan, apalagi perguruan tinggi sangat terbatas. Jumlah Sekolah Dasar, menurun dari 21.500 menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20. Perguruan Tinggi/ Fakultas terdiri dari 4 buah dapat dikatakan untuk beberapa lama belum dapat melakukan kegiatan-kegiatannya. Jumlah murid sekolah merosot 30%, sekolah menengah merosot 90%. Guru-guru sekolah dasar kurang 35%, guru sekolah menengah yang aktif kira-kira tinggal 5%. Angka buta huruf tinggi sekali walaupun memang dilakukan usaha-usaha untuk pemberantasan buta huruf.[18]

Agar terdapat keseragaman dalam pengertian dan maksud-maksud pemerintah pendudukan Jepang, maka bagi guru diadakan latihan-latihan di Jakarta. Tiap-tiap kabupaten/daerah mengirimkan beberapa orang guru untuk dilatih. Latihan pertama dimulai pada bulan Juni 1942. Mata pelajaran yang diberikan pada mereka antara lain adalah : indoktrinasi mental ideologi mengenai *Hakko I Chiu* dalam rangka kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, bahasa dan adat istiadat Jepang, nyanyian dan lagu-lagu Jepang, olah raga, pendidikan tentang dasar-dasar pertahanan dan ilmu bumi yang ditinjau dari segi geopolitis.[19] Setelah selesai mengikuti latihan, mereka kembali ke daerahnya masing-masing untuk kemudian melatih guru-guru mengenai hal-hal yang mereka peroleh dari Jakarta.

Murid-murid sebagai pengemban masa depan Indonesia dalam rangka "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya", menerima gemblengan sedemikian rupa agar mereka memiliki dan bersemangat Jepang *(Nippon Seisyin)*, walaupun mereka itu orang-orang Indonesia. Kepada murid-murid dikenakan ketentuan dan indoktrinasi

ketat. Kepada mereka dibebankan kewajiban dan keharusan sebagai berikut :

a. Setiap pagi harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang.
b. Setiap pagi harus mengibarkan bendera Jepang *Hinomaru* dan memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang *(Tenno Heika)*.
c. Setiap pagi harus mengucapkan sumpah setia kepada cita.cita Indonesia dalam rangka "Asia Raya" *(Dai Toa)*.
d. Setiap pagi harus senam *(Taiso)* untuk memelihara semangat Jepang.
e. Melakukan latihan-latihan fisik dan militer.
f. Pelajar-pelajar pada waktu. yang ditentukan melakukan kerja bakti *(Kinrohosyi)* membersihkan asrama militer, jalan-jalan raya, menanam pohon jarak, mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan militer dan sebagainya.
g. Bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa pengantar dan bahasa Jepang merupakan bahasa wajib. Bahasa daerah diberikan di sekolah dasar di kelas I dan kelas II.[20]

Di samping pembukaan kembali bekas sekolah-sekolah pemerintah Belanda, juga diizinkan kembali sekolah-sekolah swasta, yaitu sekolah-sekolah yang diasuh oleh sesuatu badan swasta atau yayasan, misalnya Sekolah Agama Islam, Sekolah Taman Siswa, Sekolah Muhammadiyah, dan lain-lain. Sekolah-sekolah swasta yang dulunya diasuh oleh badan-badan Missi ataupun Zending pada umumnya dibuka kembali dengan catatan, bahwa sekolah-sekolah itu langsung diselenggarakan oleh pemerintah Jepang, sebagaimana sekolah-sekolah negeri. Mengenai pembukaan sekolah-sekolah swasta baru, pemerintah militer Jepang memberikan kesempatan kepada perkumpulan-perkumpulan untuk membuka sekolah-sekolah bagi golongan minoritas, misalnya, kepada perkumpulan Chung Hua Chiao Thung diizinkan membuka sekolah bagi penampungan anak-anak golongan turunan Cina.[21]

Dengan dikeluarkannya Osamu Seirei No. 22/2604 (1944) yaitu mengenai penertiban sekolah-sekolah swasta, kebebasan untuk membuka sekolah-sekolah baru diberikan kepada Jawa Hokokai, sedang swasta lainnya hanya diperkenankan untuk membuka sekolah kejuruan dan bahasa Pemberian izin demikian untuk Jawa Hokokai

tidak mengherankan, karena badan itu adalah badan/organisasi untuk membantu Jepang dalam usaha perangnya.[22]

Tetapi bagaimanapun kemerosotan dan kemunduran dalam bidang pendidikan baik kuantitas maupun kualitas sehingga kebebasan berpikir dan berbuat hilang lenyap, namun demikian banyak hal-hal yang sangat menguntungkan bagi Indonesia di kemudian hari. Hal-hal yang menguntungkan itu antara lain adalah :

a. Bahasa Indonesia berkembang secara luas di seluruh kepulauan. Istilah-istilah diciptakan untuk semua jenis kepentingan;
b. Buku-buku bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena dalam suasana perang hak cipta internasional diabaikan. Bahasa asing selain bahasa Jepang dilarang;
c. Seni bela diri dan perang dimiliki oleh para pemuda, khususnya untuk pelajar Indonesia ternyata berguna di dalam perang kemerdekaan Indonesia yang terjadi kemudian;
d. Perasaan rindu kepada kebudayaan dan kemerdekaan nasional berkembang dan bergejolak secara luar biasa;
e. Karena dalam suasana perang dan serba kekurangan kreativitas para guru berkembang, misalnya, apabila memperoleh buku dari kantor pengajaran *(Bunkyo Kyoku)*, maka mereka menerjemahkan langsung buku-buku bahasa asing. Alat-alat peraga diciptakan dari bahan-bahan yang ada dalam lingkungan sekitarnya;
f. Diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan, dan agama, ditiadakan sehingga semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan,
g. Bangsa Indonesia dilatih dan dididik untuk memegang jabatan pimpinan walaupun di bawah pengawasan orang-orang Jepang;
h. Sekolah-sekolah diseragamkan dan dinegerikan meskipun sekolah-sekolah swasta seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, dan sekolah-sekolah bekas Zending dan Missie diizinkan terus berkembang tetapi di bawah pengaturan dan diselenggarakan sesuai dengan sekolah negeri.[23]

Jadi jelaslah bahwa tujuan pendidikan pada jaman pendudukan Jepang adalah menghasilkan manusia buruh yang sesuai dengan

kebutuhan perang dan menghasilkan manusia Indonesia yang berjiwa dan bersemangat Jepang.

5.2 Jaman Indonesia Merdeka

Di atas telah dijelaskan, bahwa pendidikan pada jaman pendudukan Jepang sangat buruk, karena peranan pendidikan dan pengajaran dalam masa pemerintahan pendudukan Jepang, yaitu dimasukkan dalam urusan pemerintahan, jadi tidak mengutamakan pendidikan dan pengajaran untuk kepentingan pemuda dan pemudi Indonesia. Sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, segera mendapat kesempatan yang leluasa untuk menyesuaikan pendidikan dan pengajaran dengan kebutuhan dan cita-cita bangsa Indonesia.[24]

Pemerintah Indonesia yang segera dibentuk telah menunjuk Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Ki Hajar Dewantara dari tanggal 19 Agustus 1945 sampai 14 Nopember 1945, kemudian diganti oleh DR. T.G.S.G. Mulia SH dari 14 Nopember 1945 sampai 12 Maret 1946, disusul oleh Muhamad Syafei dari 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946 dan kemudian oleh Mr. Suwandi dari 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947. Karena pergantian Menteri yang sangat cepat, dan situasi negara yang masih belum teratur, maka perbaikan bidang pendidikan tidak banyak yang dapat kita harapkan dari mereka, baru setelah PP dan K di bawah pimpinan Suwandi SH, yang selalu berdekatan dengan lapangan pendidikan dan pengajaran sejak pemerintahan Belanda, dapat diadakan usaha-usaha yang positif.[25]

Maka sebagai modal dan pedoman pertama bagi rakyat dan pemerintah di lapangan pendidikan, dipergunakanlah "Rencana usaha pendidikan/ pengajaran" yang telah dipersiapkan pada hari-hari terakhir penjajahan Jepang itu. Dengan segera Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama (Ki Hajar Dewantara) mengeluarkan "Instruksi umum" yang memerintahkan kepada semua kepala-kepala sekolah dan guru-guru :

1. Mengibarkan "Sang Merah Putih" tiap-tiap hari di halaman sekolah;

2. Melagukan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian *Kimigayo* (lagu kebangsaan Jepang);
4. Memberi semangat kebangsaan kepada semua murid-murid, menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta segala upacara yang berasal Jepang.[26]

Pada masa Mr. Suwandi menjabat Menteri PP dan K telah dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia di Yogyakarta, yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara, merangkap sebagai anggota. Panitia ini dibentuk berdasarkan keputusan rapat Badan Pekerja KNIP tanggal 27 Desember 1945 atas pertimbangan pemerintah, bahwa untuk pembentukan negara dan masyarakat baru, perlu diadakan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.[27] Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No. 104/Bhg. Umum/46, Menteri PP dan K terhitung mulai tanggal 1 Maret 1946 telah mengesahkan anggota sebagai pedoman kerja panitia. Mr. Suwandi telah mengambil beberapa keputusan sebagai berikut :

a. Panitia bertugas merencanakan susunan baru untuk tiap-tiap macam sekolah (schooltype);
b. Menetapkan bahan-bahan pengajaran dan menimbang keperluan yang praktis dan tidak terlalu berat;
c. Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas, termasuk fakultas, dengan disertai daftar-daftar dan keterangan-keterangan yang langsung.

Pada tahun 1047, panita menyerahkan laporan kepada Menteri PP dan K (Mr. Suwandi). Suatu hasil Panitia Penyelidik pada waktu itu adalah mengenai perumusan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada waktu itu dirumuskan untuk mendidik warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Penekanannya pada penanaman semangat patriotisme. Penanaman semangat patriotisme ini memang sesuai dengan situasi pada waktu itu, di mana negara dan bangsa Indonesia sedang mengalami perjuangan fisik.[28]

Pada bulan Desember 1949, Republik Indonesia mengalami perubahan ketatanegaraan. Undang-undang Dasar 1945 diganti dengan

Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat. Walaupun demikian, landasan idiil pendidikan tetap tidak mengalami perubahan, tetapi tujuan pendidikan mengalami perubahan. Pada tanggal 5 April 1950 diundangkan undang-undang no. 4 tahun 1950 mengenai Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah oleh Presiden Republik Indonesia (Mr. Asaat) dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yaitu S. Mangunsarkoro. Dalam undang-undang no. 4/1950 bab II, pasal 3, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.[29]

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa bidang pendidikan setelah masa kemerdekaan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Perubahan-perubahan inipun menyangkut pula sistem persekolahan. Pada masa sebelum kemerdekaan, sistem persekolahan didasarkan kepada sistem golongan, baik golongan berdasarkan bangsa maupun status sosial. Tetapi setelah kemerdekaan, sistem persekolahan di Indonesia hanya mengenal tiga tingkatan pendidikan ialah :

a. Pendidikan rendah: pendidikan yang terendah di Indonesia adalah sekolah dasar. Pada tahun 1945 sekolah ini disebut Sekolah Rakyat (SR) dan lama pendidikan 6 tahun.
b. Pendidikan Menengah pendidikan menengah terbagi atas dua tingkat. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Masing-masing tingkat lamanya 3 tahun. Tingkat pendidikan menengah ini dibagi pula atas dua jenis sekolah yaitu Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.
c. Pendidikan Tinggi Dalam periode 1945--1950, kesempatan untuk meneruskan studi ke lembaga pendidikan tinggi terbuka lebar bagi setiap warga negara yang memenuhui syarat.

Adapun nama-nama sekolah ditetapkan sebagai berikut :

1.	Sekolah Rakyat	(SR)
2.	Sekolah Menengah Umum Bagian Pertama	(SMP)
3.	Sekolah Menengah Umum Bagian Atas	(SMA)
4.	Sekolah Menengah Ekonomi Pertama	(SMEP)

5. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA)
6. Sekolah Tehnik (ST)
7. Sekolah Tehnik Menengah (STM)
8. Sekolah Kepandaian Putri (SKP)
9. Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP)
10. Sekolah Guru 2 tahun setelah SR (SG-C)
11. Sekolah Guru 4 tahun setelah SR (SG-B)
12. Sekolah Guru 3 tahun setelah SMP (SGA)

Sekolah-sekolah yang banyak didirikan itu, kebanyakan adalah sekolah-sekolah pemerintah.[30] Sedangkan dari pihak swasta belum ada yang membuka sekolah, hal ini berlaku sejak Indonesia diduduki oleh Jepang.

Setelah kemerdekaan, sistem persekolahan di Indonesia memberi kesempatan belajar kepada segala lapisan masyarakat. Di dalam UUD 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 1 dikatakan bahwa : Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pun di dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran tahun 1950 Bab XI pasal 17 menyebutkan: Tiap-tiap warga negara Republik mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu. Dari penjelasan di atas pemerintah Indonesia memberikan kesempatan belajar yang sama kepada setiap anak baik untuk pendidikah rendah, menengah, maupun pendidikan tinggi, ini berarti bahwa setiap anak dari setiap golongan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memasuki sekolah tertentu. Persyaratan yang diperlukan hanyalah prestasi belajar anak itu. Apabila prestasi anak itu baik, maka kesempatan belajar terbuka baginya. Bagi anak yang mempunyai prestasi belajar yang baik tetapi kurang mampu dalam pembiayaan sekolah, pemerintah mengusahakan pemberian beasiswa, walaupun dalam jumlah terbatas.[31]

Sebagai akibat dari adanya kesempatan belajar yang diberikan kepada setiap anak, maka perkembangan murid dari tahun ke tahun selalu bertambah. Dalam tahun 1950 jumlah murid untuk SD, SLTP, dan SLTA mengalami pertambahan rata-rata 100% dibandingkan dengan jumlah murid tahun 1945. Sedangkan di Perguruan Tinggi,

jumlah mahasiswa mengalami pertambahan 200% lebih dibandingkan dengan keadaan tahun 1945. Pertambahan murid yang cukup tajam baik pada tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi, menunjukkan adanya minat yang besar untuk bersekolah dan mendapatkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Kesempatan belajar yang dibuka oleh pemerintah bagi setiap anak, tidak dibiarkan begitu saja oleh rakyat Indonesia, tapi dipergunakan sebaik-baiknya. Sebagian rakyat yang pada masa penjajahan tidak boleh memasuki jenis-jenis sekolah tertentu, saat itu dengan leluasa dapat memasuki sekolah-sekolah tersebut. Keinginan belajar rakyat yang makin meningkat memaksa pemerintah melakukan usaha-usaha untuk dapat menampung hasrat dan keinginan belajar mereka. Untuk itu pemerintah telah berusaha dengan menambah jumlah sekolah rakyat, mengubah SR 3 tahun menjadi SR 6 tahun, dan memperbaiki tingkat dan mutu pendidikan.[32]

Sebagai konsekuensi usaha-usaha peningkatan dan perbaikan dalam bidang pendidikan, pemerintah dihadapkan dengan masalah-masalah pokok yang menyangkut, gedung dan alat-alat pelajaran, tenaga pengajar, biaya dan kurikulum. Dalam masa revolusi fisik tidak sedikit gedung-gedung sekolah yang hancur. Demikian pula tidak sedikit gedung-gedung sekolah yang digunakan sebagai asrama-asrama tentara. Untuk mengatasi kekurangan gedung sekolah, pemerintah telah berusaha dengan jalan : mendirikan gedung-gedung sekolah baru, menyewa rumah-rumah rakyat untuk dijadikan gedung-gedung sekolah dan mengadakan sistem mengajar dua kali dalam sehari, yang berarti satu gedung sekolah dipergunakan oleh dua sekolah (sekolah pagi dan sekolah sore). Di samping usaha-usaha pemerintah, masyarakat pun turut berusaha secara gotong-royong membangun gedung sekolah serta peralatannya, yang kemudian disumbangkan kepada pemerintah. Usaha ini makin nampak hasilnya, setelah di kalangan masyarakat timbul organisasi Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) yang berhasil menhhimpun anggotanya untuk membantu dalam bidang pendidikan.[33]

Di samping masalah gedung sekolah yang dihadapi pemerintah, juga tenaga-tenaga pengajar sebelum masa kemerdekaan kebanyakan terdiri dari tenaga guru untuk sekolah dasar yang sebagian besar tidak

mempunyai latar belakang pendidikan guru yang lengkap. Setelah kemerdekaan kekurangan guru ini makin sangat terasa pada semua tingkat pendidikan. Tetapi yang terasa sekali ialah kekurangan tenaga guru pada tingkat pendidikan rendah. Untuk mengatasi kekurangan tenaga guru, Kementerian PP dan K menyelenggarakan suatu pendidikan guru yang segera dapat menghasilkan guru-guru. Jenis-jenis pendidikan guru yang diadakan pada masa itu ialah Sekolah Guru C, Sekolah Guru B, dan Sekolah Guru A. Lamanya belajar masing-masing 2 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun. Sejalan dengan pengadaan guru untuk tingkat pendidikan rendah, Kementrian PP dan K juga mengadakan usaha penambahan guru untuk tingkat pendidikan menengah. Pendidikan guru untuk SLTP dan SLTA dilakukan dengan melalui kursus-kursus yang lamanya 2 tahun. Kursus yang diadakan yaitu kursus bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Ilmu Bumi, dan Ilmu Pasti.[34]

Sangatlah penting peranan Menteri PP dan K (Mr. Suwandi) dalam usahanya mengubah sistem pendidikan dan pengajaran sehingga sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensi dari perubahan sistem itu, maka kurikulum pada semua tingkat pendidikan mengalami perubahan pula, sehingga yang semula diorientasikan kepada kepentingan kolonial maka kini diubah selaras dengan kebutuhan bangsa yang merdeka. Salah satu hasil dari Panitia Penyelidik Pengajaran yang menyangkut kurikulum ialah, bahwa setiap rencana pelajaran pada setiap tingkat pendidikan harus memperhatikan :

- Pendidikan pikiran harus dikurangi
- Isi pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari
- Memberi perhatian terhadap kesenian, pendidikan watak, pendidikan jasmani, dan kewarganegaraan dan masyarakat.[35]

Dalam Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4/1950, tercantum juga masalah kurikulum sebagai berikut :

- Kurikulum pendidikan rendah ditujukan untuk menyiapkan anak memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin, serta mengembangkan bakat dan kesukaannya.

- Kurikulum pendidikan menengah ditunjukan untuk menyiapkan pelajar ke pendidikan tinggi, serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam perbagai lapangan khusus, sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat.
- Kurikulum pendidikan tinggi ditujukan untuk menyiapkan pelajar agar dapat menjadi pimpinan dalam masyarakat, dan dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.[36]

Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan itu sudah tentu memerlukan biaya. Pengadaan gedung sekolah dan peralatan, pengadaan tenaga guru serta perubahan-perubahan dalam kurikulum banyak membutuhkan biaya. Tetapi berapa besarnya biaya pendidikan yang dikeluarkan dalam periode ini sangat sulit diperoleh angka-angka yang pasti mengingat periode tersebut merupakan periode perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan.

Sistem pendidikan diadakan dengan titik berat desentralisasi. Ini berarti bahwa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama menjadi urusan daerah (propinsi) dengan supervisi pusat, terutama dalam perencanaan pelajaran. Sekolah menengah atas menjadi kewajiban pusat, baik mengenai masalah keuangan, maupun mengenai mata pelajaran. Untuk sekolah-sekolah di bawah tanggung jawab propinsi atau daerah dapat dimintakan subsidi 40%, dari anggaran belanja. Selebihnya menjadi tanggung jawab daerah. Guru-guru harus mempunyai diploma yang diakui oleh pusat. Tiap-tiap propinsi harus mempunyai satu universitas negeri, para lektor atau guru besarnya harus mempunyai kualifikasi Negara. Selanjutnya juga dihidupkan kompetisi sehat untuk memilih perguruan-perguruan yang tinggi nilainya. Sebagai konsekuensinya daerah-daerah lebih diberikan bahagiannya daripada penghasilannya setahun, terhitung devisa. Daerah-daerah yang miskin dapat dipertimbangkan mendapat lebih banyak bantuan.[37]

Perkembangan pendidikan setelah proklamasi, di Jawa Barat menunjukkan kemajuan yang pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di luar Jawa Barat

Segera setelah Indonesia merdeka, didirikanlah sekolah-sekolah di seluruh wilayah Jawa Barat. Namun selama Perang Kemerdekaan pelaksanaan pendidikan mengalami banyak gangguan, terutama setelah terjadinya Aksi Militer Belanda pertama pada bulan Juni 1947. Di kota Bandung sendiri sejak 25 Maret 1946 praktis sekolah-sekolah ditutup, karena penduduk mengungsi ke luar kota akibat peristiwa yang disebut Bandung Lautan Api.

Di kota-kota lainnya di Jawa Barat hal serupa terjadi pula. Walaupun begitu, semangat juang dalam bidang pendidikan tetap besar, baik di kalangan guru-guru, murid-murid, maupun masyarakat pada umumnya. Di beberapa tempat di daerah kantong gerilya dibuka sekolah-sekolah. Murid-muridnya bukan hanya anak-anak penduduk setempat dan anak-anak yang turut mengungsi tetapi juga para pejuang kemerdekaan itu sendiri. Begitu pula guru-gurunya, sebagian waktu mereka digunakan untuk mengajar dan sebagian waktu lagi (terutama malam hari) digunakan untuk berjuang melawan musuh yang hendak menjajah tanah air mereka lagi. Banyak diantara murid-murid itu tidak dapat menyelesaikan sekolah mereka dan guru-guru terpaksa meninggalkan sekolah, karena tanah air dan bangsa menuntut jiwa dan raga mereka demi kemerdekaan. Baru setelah Perang Kemerdekaan usai mereka kembali ke dunia pendidikan.

Di kota-kota sekolah-sekolah itu secara berangsur-angsur dibuka lagi dengan berangsur-angsurnya keamanan. Sekolah-sekolah berlangsung normal kembali setelah Perang Kemerdekaan berakhir pada akhir tahun 1949.

5.2.1 Sekolah Rakyat (SR)

Guna melaksanakan pasal 30 UUD sementara RI, pemerintah mempunyai rencana 10 tahun perluasan SR, menuju ke Pelaksanaan Kewajiban Belajar, yang meskipun merupakan beban yang berat sekali, adalah kewajiban yang harus dipenuhui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Anak-anak yang dapat diterima di SR, adalah anak yang sudah berumur 7 tahun, lama belajar di SR 6 tahun. Sesudah tamat Sekolah Rakyat 6 tahun, murid-murid dari Sekolah Rakyat dapat melanjutkan

pelajarannya dengan melalui ujian masuk pada Sekolah-sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Sekolah Rakyat di Jawa Barat terdapat di kota-kota besar dan juga di desa-desa. Jumlah SR yang ada di seluruh wilayah Jawa Barat setelah proklamasi diperkirakan sebanyak 9.471 buah.[38]

5.2.2 Sekolah Menengah Pertama

Lama pelajaran pada sekolah ini 3 tahun, dan murid yang dapat diterima adalah murid-murid yang telah menamatkan SR 6 tahun dan lulus dalam ujian akhir. Di kelas III diadakan pemecahan menjadi dua bagian, ialah Bagian A (Sastra dan Administrasi Perdagangan) dan Bagian B (Bagian Ilmu pasti/alam). Bagi anak-anak yang lulus dalam ujian akhir SMP dapat meneruskan sekolahnya ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Dapat dikatakan, bahwa segenap ibukota propinsi atau ibukota kabupaten mempunyai satu atau lebih SMP. Di Jawa Barat terdapat di kota-kota:

Serang, Purwakarta, Subang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Cimahi. Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka.[39]

5.2.3 Sekolah Lanjutan tingkat atas (SMA)

Sekolah ini mempunyai sifat pengajaran umum dan ditujukan untuk menyiapkan para pelajar guna melanjutkan pada sekolah tinggi. Yang diterima pada SMA, ialah mereka yang lulus pada ujian penghabisan negeri SMP, lama belajar di SMA 3 tahun.

Di Jawa Barat didirikan SMA di kota-kota: Bogor, Bandung, dan Cirebon.

Di Bandung terdapat 3 buah SMA, yaitu SMA I B C, SMA II dan SMA III ABC.[40]

5.2.4 Sekolah Guru

5.2.4.1 Sekolah Guru B (SGA)

Lama pelajaran 4 tahun, yang dapat diterima di SGB ialah mereka yang lulus ujian masuk SMP. SGB menyiapkan calon-calon untuk menjadi guru SR. Pada dasarnya pelajaran 4 tahun itu sama dengan tiga tahun pelajaran umum, ditambah satu tahun pelajaran vak. Di seluruh Jawa Barat terdapat 14 SGB yang tersebar di kota-kota: Serang, Purwakarta, Depok, Bogor, Sukabumi Cianjur, Bandung, Cicalengka, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, dan Kuningan.[41]

5.2.4.2 Sekolah Guru A (SGA)

Sekolah ini menyiapkan pelajar-pelajar untuk menjadi guru kepala pada sekolah-sekolah rakyat atau guru pada sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang dapat diterima pada SGA, adalah tamatan SMP dan tamatan SGB Negeri dengan tidak melebihi umur 20 tahun dan murid SGB kelas III yang naik ke kelas IV dengan tidak melebihi umur 21 tahun. Lama pelajaran 3 tahun. Pemegang ijazah SGA dapat melanjutkan pelajarannya pada sekolah-sekolah tinggi yang pelajarannya sesuai dengan pelajarannya semula. SGA terdapat di kota Bandung dan Bogor.[42]

5.2.4.3 Sekolah Guru Kepandaian Puteri (SGKP)

Sekolah ini menyiapkan para pemudi untuk menjadi Guru Puteri dalam salah satu vak kewanitaan pada Sekolah Kepandaian Puteri dalam pelajaran rumah tangga atau jahit-menjahit.

Yang diterima pada sekolah ini adalah :

a. Tamatan SMP Negeri dengan angka 6 untuk bahasa Indonesia dan Pengetahuan umum.

b. Tamatan SKP Negeri dengan angka 7 untuk bahasa Indonesia dan Pengetahuan Umum.

Lama pelajaran 3 tahun sesudah SMP dan di kelas II diadakan pemecahan dalam 2 bagian, yaitu bagian A untuk pelajaran rumah tangga dan Bagian B untuk pelajaran jahit-menjahit. Pemegang

ijazah SGKP dapat melanjutkan pelajaran Kursus BI untuk Pendidikan Wanita . Di daerah Jawa Barat SGKP ialah di Jakarta.[43]

5.2.4.4. Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak (SGTK)

Sekolah ini menyiapkan para pemudi untuk dididik menjadi guru pada Sekolah Taman Kanak-Kanak. Yang dapat diterima pada sekolah ini adalah : murid-murid yang berijazah SMP atau SKP Negeri. SGTK di Jawa Barat terdapat di kota Bandun.[44]

5.2.4.5 Sekolah Guru Pendidikan Jasmani (SGPD)

Sekolah ini mendidik para pesiar untuk menjadi guru dalam mata pelajaran pendidikan jasmani pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Yang diterima adalah mereka yang berijazah SMP Negeri atau yang sederajat dengan mendapat sedikit-dikitnya angka 7 untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan umur tidak boleh lebih dari 25 tahun.

Lama belajar pada sekolah ini 4 tahun, terdiri dari 3 tahun pelajaran teori dan satu tahun pelajaran praktek. Pemegang ijazah SGPD dapat melanjutkan pelajarannya ke Fakultas Pendidikan Jasmani di Yogya atau ke Lembaga Pendidikan Jasmani di Bandung. SGPD di Jawa Barat terdapat di Banduing.[45]

5.2.5 Sekolah Kejuruan

Sekolah kejujuran yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat dibagi dua. Pertama yang diselenggarakan oleh Kementrian PP dan K, dan kedua yang diselenggarakan oleh kementrian-kementrian lain.

Sekolah-sekolah kejuruan yang diselenggarakan oleh Kementrian PP dan K ialah :

5.2.5.1 Sekolah Kepandaian Putri (SKP)

Sekolah ini menerima murid yang lulus ujian masuk sekolah lanjutan Tingkat Pertama. lama pelajaran 3 tahun, terbagi atas vak umum dan vak khusus.

Pada SKP diajarkan pengetahuan tentang rumah tangga dan menjahit. Pemegang ijazah SKP dapat melanjutkan pelajarannya

ke SGTK, atau dengan melalu saringan dapat diterima di SGKP. Di seluruh Jawa Barat terdapat 7 buah SKP, yang terdapat di kota-kota Bandung, Bogor, Sukabumi, Serang, Sumedang, Garut dan Jakarta.[46]

5.2.5.2 Sekolah Tehnik Pertama

Syarat masuk berijazah SR 6 tahun dengan tiada ujian masuk. Lama pelajaran 2 tahun. Dengan ujian masuk pemegang ijazah STP dapat diterima di kelas satu ST, Di seluruh Jawa Barat terdapat di 12 tempat antara lain di Serang, Purwakarta, Bogor, Cibadak, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, Cirebon, dan Majalengka.[47]

5.2.5.3 Sekolah Tehnik (ST)

Syarat masuk: Tamatan STP dengan melalui ujian masuk, lama pelajaran 2 tahun. Pemegang ijazah ST dapat melanjutkan ke STM kelas II dengan melalui seleksi, Di seluruh Jawa Barat terdapat di Serang, Sukabumi, Bandung dan Tasikmalaya.[48]

5.2.5.4 Sekolah Menengah Ekonomi Pertama

Yang dapat diterima murid adalah mereka yang lulus ujian masuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Lama pelajaran 3 tahun. Pemegang ijazah SMEP dengan seleksi dapat diterima di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA). Di seluruh Jawa Barat terdapat 9 buah sekolah yang tersebar di kota-kota Bogor, Sukabumi. Bandung, Ciamis, Tasikmalaya, Purwakarta, Cirebon, dan Garut.[49]

5.2.6 Sekolah Kejuruan Tingkat Atas

Sekolah-sekolah ini dapat dibagi dalam dua bagian ialah sekolah-sekolah yang langsung dikelola oleh Kementrian PP dan K dan ada yang dikelola oleh kementrian-kementrian lainnya.

5.2.6.1 Sekolah Tehnik Menengah (STM)

Sekolah ini menyiapkan para pemuda untuk dididik menjadi *Opzichter* dalam lapangan tehnik. Yang dapat diterima pada sekolah ini adalah mereka yang berijazah SMP Negeri dengan

angka 7 di bagian eksakta dan diterima di kelas I dan mereka yang berijazah Sekolah Tehnik dengan angka 7 untuk mata pelajaran eksakta dan diterima di kelas II. Lama pelajaran 4 tahun sesudah tamat SMP dan 3 tahun sesudah tamat Sekolah Tehnik.

Tamatan STM dapat melanjutkan pelajarannya ke Sekolah-sekolah Tinggi yang pelajarannya semua. Misalnya dari STM Bagian Kimia dapat melanjutkan ke Fakultas Tehnik Bagian Kimia.

Di seluruh Jawa Barat terdapat sebuah STM, yaitu yang ada di kota Bandung.[50]

5.2.6.2 Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA)

Sekolah ini semula disebut Sekolah Ekonomi Menengah dan menyiapkan pemuda-pemuda untuk memperdalam pengetahuannya dalam lapangan ekonomi baik untuk mengemudikan perusahaan-perusahaan sendiri, maupun bekerja pada pemerintah ataupun swasta. Yang diterima di sekolah ini ialah mereka yang berijazah SMP Negeri dan SMEP Negeri dengan melalui seleksi. Lama pelajaran 3 tahun setelah tamat SMP.

Pemegang ijazah SMEA dapat melanjutkan pelajarannya ke Fakultas Hukum Sosial dan Politik Bagian Ekonomi. Di seluruh Jawa Barat hanya ada satu sekolah, ialah yang terdapat di kota Bandung.[51]

5.2.7 Perguruan Tinggi

Peguruan Tinggi sebagai kelanjutan Sekolah Menengah Atas yang ada di Jawa Barat adalah : Fakultas Pertanian Atas yang ada di Jawa Barat adalah : Fakultas Pertanian di Bogor, Fakultas Kedokteran Hewan di Bogor, Fakultas Pengetahuan Pendidikan Jasmani di Bandung, dan Akademi Militer di Cimahi.[52]

5.2.8 Sekolah-sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Lain

1. Sekolah Guru Agama Islam di Banten, Bogor, Subang, dan Cirebon.

2. Sekolah Guru Agama dan Hukum Islam di Bandung.
3. Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di Bogor.
4. Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) di Bogor.
5. Sekolah Komandan Polisi di Sukabumi.
6. Sekolah Asisten Ahli Obat di Bandung,.
7. Sekolah Asisten Apotheker di Bandung.
8. Sekolah Analis di Bogor[53]

5.3. Sekolah-sekolah Swasta

Berdasarkan pengumuman bersama oleh Kementerian PP dan K RI dan Kementerian PP dan K RIS pada tanggal 30 Juni 1950 bangsa asing diperbolehkan membuka sekolah sendiri menurut kebutuhan masing-masing. Sekolah-sekolah ini bercorak swasta.

Sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh bangsa asing ada dua macam, yaitu sekolah-sekolah "Konkordan" Belanda dan sekolah-sekolah Cina. Di samping itu, terdapat pula sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri.

Sekolah-sekolah Belanda di Jawa Barat terdapat di Bogor dan Bandung sedang sekolah-sekolah Cina di Jawa Barat terdapat sekitar 50 buah sekolah yang tersebar di kota-kota besar di Jawa Barat, seperti di Bandung, Tasikmalaya, Bogor, dan Cirebon.[54] Sedangkan sekolah-sekolah Indonesia sendiri tersebar lebih luas lagi, bahkan sampai ada di beberapa kota kecil di Jawa Barat.

Adanya sekolah-sekolah swasta tersebut sungguh sangat membantu pihak pemerintah dalam tugasnya menyediakan sarana pendidikan bagi warga negaranya. Hal ini sekaligus pula menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar telah menyadari akan arti dan pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, apalagi bangsa yang merdeka. Hal ini terbukti bahwa kini lembaga pendidikan baik yang dibina langsung oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh pihak swasta, sama-sama diusahakan agar mutunya lebih meningkat baik sarananya maupun kualitas pendidikannya, dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Catatan

1. A.H. Nasution,. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia,* Jilid 1, Bandung, Angkasa, 1977, hal. 87.
2. *Ibid.,* hal. 90
3. *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman, Jakarta,* Dept, PP dan K, BP3K, 1979, hal. 88.
4. Sartono Kartodirdjo dkk., *Sejarah Nasional Indonesia,* Jilid VI, Jakarta, Balai Pustaka, 1977, hal. 172.
5. Sugianto, *Sejarah Perkembangan Sekolah Lanjutan Umum Tingkat Atas di Indonesia,* Jakarta. Wijaya, 1978, hal. 29.
6. *Ibid.,* hal. 30
7. *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman loc. cit..*
8. Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka,* Jakarta, Gunung Agung, 1970, hal. 33.
9. *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman, op. cit.,* hal 69.
10. Sugianto, *loc. cit.*
11. *Ibid.,* hal. 30
12. *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman, loc. cit.*
13. Indonesia, Kementrian PP dan K, *Penyelenggaraan Sekolah Sekolah di Indonesia,* Jakarta, 1951, hal. 17

14. Sugianto, *loc. cit.*

15. *Tjahaja*, 47, 3, 2 3, Nigatu, 2604 (1944)

16. *Pendidikan dari Jaman ke Jaman, loc. cit.*

17. *Asia Raya*, 1 Pebruari 1943.

18. *Suara Asia*, 28 April 1943.

19. *Suara Asia*, 9 Juli 1942.

20. *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman, op.cit*, hal.90.

21. *Suara Asia*, 14 April 1943.

22. *Djawa Baru*, No. 7, 4 Januari 1944.

23. *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman op. cit* Juli 91.

24. Soegarda Poerbakawtja, *op. cit*, hal 25

25. *Ibid*. hal 35

26. Djumhur & H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, Bandung, Ilmu, 1976, hal. 200.

27. Soegarda Poerbakawatja, *op. cit.*, hal. 37.

28. Djumhur & H. Danasuparta, *op. cit.*, hal. 204.

29. *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman, op. cit*, hal. 97.

30. Soegarda Poerbakawatja, *op. cit.*, hal. 51

31. *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman op. cit.*, hal. 100.

32. *Ibid.*, hal. 101.

33. *Ibid.*, hal. 104.

34. *Ibid.*, hal. 105.

35. *Ibid*, hal. 108.

36. *Ibid*, hal. 108.

37. I. Djumhur & Dana Suparta, *op. cit.*, hal. 209.

38. A. Suryadi, *Masyarakat Sunda Budaya dan Problema*, Bandung, Alumni, 1974., hal. 91.

39. Indonesia, Kementrian PP dan K, *op. cit.*, hal. 12.73.

40. *Ibid.*, hal. 93.

41. *Ibid.*, hal. 92.

42. *Ibid.* hal. 18.

43. *Ibid.* hal 20.

44. *Ibid.* hal 20.

45. *Ibid.* hal 78.

46. *Ibid.* hal 87.

47. *Ibid.* hal 15.

48. *Ibid.* hal 86.

49. *Ibid.* hal. 91.

50. *Ibid.* hat 21.

51. *Ibid.* hal. 90.

52. *Ibid.* hal 95.

53. *Ibid.*, hal. 68 - 69 - 70 - 71 72.

54. Soegarda Poerbakawatja, *op. cit.*, hal. 61.

BIBLIOGRAFI

A. B U K U

Asmar, Teguh dkk. *Sejarah Jawa Barat Dari Masa Pra Sejarah Hingga Masa Penyebaran Agama Islam.* Bandung, Proyek Penunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat, 1975.

Atja. *Siksa Kandang Karesian;* alih aksara. Bandung, Unpad. Lembaga Kebudayaan, 1973.

----------*Tjarita Parahijangan.* Bandung, Jajasan Kebudajaan Nusalarang, 1968.

-----------*Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari.* Jakarta, Ikatan Karyawan museum Pusat, 1970.

----------*Tjarita Ratu Pakuan.* Bandung, Lembaga Bahasa dan Sedjarah, 1970.

Buchori, R.E. *Risalah Riwayat Singkat Berdirinya Pesantren Asyrofuddin.* Ketikan Januari 1970.

Brugmans, I.J. *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch Indie.* Batavia, Wolters, 1938.

Burger, D.H. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* Disadur oleh Prajudi Atmosudirdjo. Djakarta, Pradnyaparamita, 1962.

Chijs, Van der. *Het Middelbaar School - Onderwijs te Batavia de Eerste Helft van de 19e Eeuw.* Batavia, Kolff, 1902.

Cortesao, Armando. *The Suma Oriental of Tome Pires.* London, The Hakluyt Society, 1944.

Dasuki, H.A. *Purwaka Caruban Nagari.* Indramayu, Sudiam, 1978.

Day, Clive. *The Dutch in Java: The Policy and Administration.* Kuala Lumpur, Oxford Univ. Press, 1966.

Djojohadikusumo, Margono. *Dr. E.F.E. Douwes Dekker.* Jakarta, Bulan Bintang, 1975.

Djumhur, i. dan H. Danasuparta. *Sejarah Pendidikan* Bandung, Ilmu, 1976.

Dokumentasi Keluarga Rd. Siti Jenab. Cianjur.

Ekadjati, Edi S. *Cerita Dipati Ukur.- Suatu Karya Sastra Sejarah.* Disertasi. Jakarta, Universitas Indonesia, 1979.

----------- *(ed.). Masyarakat dan Kebudayaan Sunda.* Bandung, Pusat Ilmiah dan Pembangunan Regional (PIPR) Jawa Barat, 1980.

---------- *Priangan Historiography.* Paper Presented at the Historical Conference Dutch - Indonesia. Lage Vuursche, 1980.

---------- *dkk. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Barat* Dep. PK. Pusat Penelitian Sejarah & Budaya. Proyek PPKD Jawa Barat, 1978/1979.

Federspiel, Howard M. *Persatuan Islam, Islamic Reeform in Twentieth Century Indonesia.* New York, Cornell Univ. Press, 1970.

(Gedenkboek) Pagoejoeban Pasoendan. (Bandoeng), t.th.

Gedeboek Pasoendan, Bandung, 1940.

Geldern, Robert Heine. *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja diasia Tenggara.* Terj. Deliar Noer. Cet. ke. 2. Jakarta, 1972.

Haan, F. de. *Priangan* III. Batavia, BGKW, 1910.

Hageman, J. "Geschiedenis der Soendalanden". *TBG,* XVI, 1866.

Handboek Indonesische Onderwizers Bond 1942.

Hardjasaputra, A. Sobana. *Pemerintahan Daerah Jawa Barat Pada Masa Revolusi Fisik (September 1945 -- Juni 1948).* Skripsi Sarjana Sejarah. Bandung, Unpad. Fakultas Sastra, 1980.

Gedenkboek HIK Bandoeng 1866--1941 (Bandoeng) 1941.

Hartgerink, H.J.H. *De Staten-General en het Volksonderwijs in Nederlandsch-Indie (1848 -- 1918).* Batavia, Wolters, 1942.

Hassan, A. *Soal Jawab III.* Bandung, Diponegoro, t.th.

Hassan A. Zaeni. *Sekilas Lintas Sedjarah Pesantren Buntet Tjirebon* Tjirebon, LPI Buntet, 1970.

Hidayat J. Darya. *Perserikatan Ulama dan Perkembangannya (1916- -- 1942).* Skripsi Sardjana Muda Sedjarah. Bandung, Unpad. Fakultas Sastra, 1971.

Indonesia. Dep. PK- Proyek, PPKD. *Sejarah Daerah DKI Jakarta.* Jakarta, Proyek PB2SID, 1978.

Indonesia. Kem. PP dan K. *Penyelenggaraan Sekolah-sekolah di Indonesia.* Djakarta, 1951

Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia.* Jil. IV dan V. Jakarta, Balai Pustaka, 1977.

Kluiver, D.J.W.J. *Voorlichting Bij de Studiekeuze in Nederlandsch-Indie.* Batavia, Kolff, 1933.

Kosim E. dkk. *Sejarah masuk dan Berkembangnya agama Islam di Jawa Barat khususnya di Cirebon dan Pamijahan.* Laporan Penelitian. Bandung, Unpad. Fakultas Sastra, 1974

Leupe, P.A. "Verhael van de Belegeringhe der stadt Batavia in't Coninckrijck van Jaccarta, Anno 1628, den 22 Augustij". *BKI,* III, 1855.

Laur. J.C van. Indonesian Trade and Society. Bandung, W. van Hoove, 1955.

Meerten, Henri Charles van. *Overzicht van de Hervorniing van het Preanger Stelsel* Proefschrift. Leiden, Groen, 1877.

Mughni, Syafiq A. *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal.* Surabaya, Bina Ilmu, 1980.

Nasution, A.H. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia.* Jil. ke- 1. Bandung, Angkasa, 1977.

Noer, Deliar. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 -- 1942.* London, Oxford Univ. Press, 1973.

Norduyn, J. "Traces of and Old Sundanese Ramajana Tradition". *Indonesia,* 12. Cornell Modern Indonesia Project.

Panitia Peringatan Hari Rd. Dewi Sartika. *Rd. Dewi Sartika; Riwayat Hidup dan Perdjoangannya* Bandung, BKOW Kodya Bandung, 1974.

Partai Kebangsaan Indonesia. *40 Tahun Berdjuang* Bandung, 1955.

Pasaribu, I.L. dan B. Simandjuntak. *Pendidikan Nasional Tinjauan Paedagogik Teoritis).* Bandung Tarsito, 1978.

Pendidikan di Indonesia dari Jaman Ke Jaman. Jakarta. Dep. PK. BP3K, 1979.

Pleyte, C.M. "De Patapaan Adjar Soeka Resi, Ouders gezegd de Kluizenarij op den Goenoeng Padang". *TBG,* LV, 1913.

Post, P. *Het Volksonderwijs in Nederlandsch-Indie.* Batavia, Wolters, 1932.

Prasodjo, Sudjoko. dkk *Profil Pesantren* Jakarta, LP3ES 1974.

Pringgodigdo, A.G. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* Jakarta. Dian Rakyat, 1977.

Propinsi Djawa Barat, Kempen, 1953.

Poerbakawatja, Soegarda. *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka.* Djakarta, Gunung Agung, 1970.

Said, M. dan D. Mansoer. *Mendidik Dari Zaman Ke Zaman* Tjet. ke-3. Djakarta, Dian Rakjat, 1965.

Said, Usman. *Sumbangan Pendidikan Islam Terhadap Pembentukan Kepribadian Indonesia. 1968.*

Saleh Danasasmita. *Ya nu Nyusuk Na Pakuan.* Bandung, Unpad. Lembaga Kebudayaan, 1973.

Sardjo, Marwan dkk. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia.* Jakarta, Dharma Bhakti, 1979.

Stapel, F.W. *Geschiedenis van Nederlandsch-Indie.* V. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1940.

Stoddard, L. *Dunia Baru Islam.* Jakarta.

Soebantardjo. *Sari Sedjarah Eropah-Amerika* Djil. ke-2. Jogjakarta, Bopkri, 1961.

Sugianto. *Sedjarah Perkembangan Sekolah Landjutan Umum Tingkat Atas di Indonesia* Djakarta, Widjaja.

Suryadi, A. *Masyarakat Sonda Budaya dan Problema* Bandung, Alumni, 1974.

Sutaarga Amir. *Prabu Siliwangi.* Bandung, Duta Rakjat , 1965.

Thomat R. Murray. *A Chronicle of Indonesian Higher Education; The first Half' Century, 1920--1970.* Singapore, Chopmen Enterprises, 1 973,

Tjandrasasmita, Uka. *Sultan Ageng Tirtajasa Musuh Besar Kompeni Belanda.* Djakarta. Jajasan Kebudajaan Nusalarang, 1967.

Tudjimah. *Seh Yusuf Makasar 1626 --1699.* Prasaran Pada Seminar Sedjarah Nasional I I, Yogyakarta, 1970.

Vastenhouw, M. *Sejarah Pendidikan di Indonesia.* Terj. Abdul Murad dan M. Benyamin Achdiat. t.t., Jemmars, t.th.

Viekke, Bernard H.M. *Nusantara: a History, of Indonesia.* Bruxelles, A. Nanteau S.A.. 1961.

Wal, SL. Van der. *Pendidikan di Indonesia 1900--1940.* Saduran A. Dasuki dan Sumarsono Mastoko, Dep. PK. BP3K, 1977.

Willis, Ratna. *Perdjoangan Rd. Dewi Sartika* Skripsi Sardjana Muda Sedjarah. Bandung, Unpad. Fakultas Sastra, 1967.

B. Surat kabar dan Majalah

Asia Raya, 1 Pebruari 1943.
Djawa Baru, 4 Januari 1944.
Kawit: Bulletin Kebudayaan Jawa Barat, 24, I--III, 1980.
Mingguan Pikiran Rakyat, 6 April 1980.
Risalah, 57, 7, Th. .... hal. 32.
Siliwangi, 15 Juni 1921 dan 4 September 1921.
Suara Asia, 9 Juli 1942; 14 dan 28 April 1943.
Tjahaya, *47*, *3*, *23* Nigatu 2604 (1944).
Varia, 625, 8 April 1970.

C. Wawancara

Buldan Djajawiguna. Cianjur, November 1980.
Dudu Surawinata. Sumedang, 18 September 1980.
EM. Dachlan (Wartawan/Eks. Pengurus Paguyuban Pasundan). Jakarta, September 1980.
H. Moh. Koerdi, d/H Hoofdredacteur Sipatahunan. Bandung, 14 September 1974.
Adit Rosadi, S. Anjar Sumyana, Sumedi Erawan (ketiganya adalah Staf Pengawas Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Pk Propinsi Jawa Barat). Bandung, November 1980.
Haji Said Raksakusumah (Dosen Sejarah IKIP - Unpad). Bandung. 4 Januari 1970.
Keluarga Rd. Siti Jenab. Cianjur, November. 1980.
Kiyai Enco. Kuningan, 20 Agustus 1980.
Kiyai Moh. Abdullah. Kuningan, 17 Agustus 1960.
Kiyai Moh. Badruddin. Kuningan, 20 Agustus 1980.
Kiyai Ukasah. Sumedang. 18 September 1980.
Putra-Putri Rd. Siti Jenab. Cianjur, November 1980.
Putri Bungsu Rd. Dewi Sartika. Bandung, 13 Desember 1979.
Rd. Kusnadi (Kepala Kandep PK Kabupaten Kuningan). Kuningan. November 1980.
Rd. Ningrum Julaeha. Bandung, Agutus 1980.
Rd. Soeradiradja. Bandung, 17 Desember 1974.
R.K. Sukanda Bratamanggala. Bandung, 22 Sept. 1974.

Ibu Tardine (Putri Bungsu - Rd. Dewi Sartika). Bandung, Desember 1979.
Oekar Bratakoesoema, d/h Sekretaris Hoofdbestuur Paguyuban Pasundan. Bandung, 10 Desember 1974.